

# **PERILAKU POLITIK**

*Dialektika Teoritis-Empiris  
Untuk Penguatan Demokrasi  
di Era Post Truth*



Ihsan Hamid

# **PERILAKU POLITIK**

*Dialektika Teoritis-Empiris  
Untuk Penguatan Demokrasi  
di Era Post Truth*

 Sanabil

## PERILAKU POLITIK

Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth

Penulis : Ihsan Hamid  
Editor : HM. Zaki  
Layout : Muhammad Amalahanif  
Desain Cover : Muhammad

ISBN : 978-623-7881-41-4  
Cetakan I : Agustus 2020

*All right reserved.*

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital, atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Penerbit :  
Sanabil  
Jln. Kerajinan 1  
Puri Bunga Amanah Blok C/13  
Telp. 0370-7505946  
Email : [sanabilpublishing@gmail.com](mailto:sanabilpublishing@gmail.com)  
[www.sanabil.web.id](http://www.sanabil.web.id)

# DAFTAR ISI

Daftar Isi.....v

## BAB I

PROLOG ..... 1

## BAB II

SEJARAH PERILAKU DAN BUDAYA POLITIK ..... 5

A. Sejarah dan Perkembangan Perilaku Politik ..... 5

B. Perilaku dan Budaya Politik di Era *Post Truth*..... 15

C. Titik Temu Makna Perilaku Politik dan Budaya Politik..... 33

## BAB III

KONSEPTUALISASI UMUM TENTANG PERILAKU  
POLITIK.....43

A. Kerangka Teori Perilaku Politik.....44

B. Model dan Fungsi Perilaku Politik.....62

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik ..... 70

D. Potret Perilaku Politik Organisasi: Melihat Jejak  
Langkah Politik NW ..... 79

BAB IV .....	111
PERSPEKTIF DASAR TENTANG BUDAYA POLITIK.....	111
A. Definisi Budaya Politik.....	113
B. Tipologi Budaya Politik .....	123
C. Realitas Budaya Politik Era <i>Post Truth</i> .....	135
D. Budaya Politik Pesantren: Telaah Pola Hubungan Kiyai dan Santri dalam Patronase Politik .....	140

## BAB V

DESIMINASI PERILAKU POLITIK LEWAT PEMILU .....	151
A. Demokratisasi Lewat Pemilu.....	152
B. Hakikat Pemilu: Pembaruan Kontrak Sosial .....	155
C. Sejarah dan Perjalanan Pemilu di Indonesia.....	159
D. Analisis Berbagai Model Sistem Pemilihan Peresiden dalam Kerangka Penguatan Demokrasi di Indonesia. ....	176
E. Pemilu dan Upaya Membangun Pemerintahan <i>Good Governance</i> .....	178

## BAB VI

EPILOG .....	185
Daftar Pustaka .....	187
Tentang Penulis .....	199

# Bab I

## PROLOG

**K**ompleksitas dinamika politik yang terjadi dua dekade terakhir ini kembali memicu diskusi dan perbincangan terkait budaya politik. Selain karena erat berkaitan dengan perkembangan politik di suatu negara, budaya politik juga berhubungan erat dengan dinamika model dan bentuk partisipasi politik masyarakat yang berkembang dimasa modern saat ini. Artinya, perkembangan politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh perkembangan budaya yang ada dalam masyarakat negara tersebut. Pendidikan, inprastuktur politik dan pemahaman politik masyarakat sangat memengaruhi perkembangan budaya politik terutama seperti yang kita lihat di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Hal ini ditunjang oleh pilihan bangsa Indonesia yang sudah memilih sistem demokrasi sebagai sistem politik Indonesia yang didalamnya memiliki tujuan ideal dalam hal pengakuan atas hak-hak politik warga negara yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan UU Perpolitikan lainnya.

Berdasarkan pemahaman teoritis, kita memahami bahwa budaya terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Demikian halnya dengan kebiasaan yang ingin serba praktis dan instan, cepat serta mudah

dalam menyelesaikan dan memenuhi segala sesuatu kebutuhan. Kebiasaan tersebut berubah menjadi sebuah budaya pragmatis atau instan. Budaya serba praktis dan instan di Indonesia tersebut kini telah menjadi kebudayaan secara nasional, tidak hanya berjalan di suatu wilayah atau daerah tertentu, namun di seluruh Indonesia. Tak terkecuali sikap pragmatis tersebut kemudian juga sangat kuat mewarnai dinamika perpolitikan. Kecendrungan munculnya sikap pragmatis dalam kehidupan politik tersebut menjadi sinyalemen nyata bahwa realitas politik akhir-akhir ini mengalami pergeseran pola dan strategi dalam perebutan-perebutan kekuasaan, yang semula misalnya dalam mempengaruhi pilihan politik masih dengan pola-pola yang sederhana, tatap muka langsung, sekarang menjadi dapat dilakukan lewat akses media sosial. Namun dibalik kemudahan akses teknologi tersebut ternyata memunculkan berbagai dinamika baru, salah satu yang paling parah adalah terkait perebutan simpati publik dalam mempengaruhi pilihan politiknya dengan menggunakan konten-konten hoax atau berita bohong, entah yang terkait isu SARA maupun isu lain yang mendeskreditkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak sehat. Perilaku semacam inilah yang kemudian oleh para pemikir dianggap sebagai bagian dari wujud era post truth yang saat ini dihadapi oleh dunia global.

Ditinjau dari sisi lain, dalam tataran empiris, budaya politik warga negara akan nampak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, dalam proses rekrutmen politik partai politik atau lembaga legislatif, pada proses kampanye politik dan aktivitas menyalurkan suara

politiknya dalam pemilu (eksekutif dan legislatif) maupun dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Pola-pola perilaku politik yang nampak ke permukaan dan cenderung menjadi hal yang biasa secara umum, dapat mengindikasikan bahwa telah terjadi proses pelebagaan perilaku politik warga negara menjadi budaya politik. Tentu saja perilaku politik yang dikehendaki untuk menjadi budaya politik warga negara Indonesia adalah budaya politik yang bisa membangun secara konstruktif bagi pendewasaan sistem politik Indonesia. Artinya budaya politik tersebut semakin menjadi bagian yang mencirikan bahwa pendidikan politik warga negara Indonesia semakin berkualitas. Bukti adanya peningkatan kualitas budaya politik warga negara adalah dalam hal proses politik yang didalamnya setiap warga negara terlibat atau melibatkan diri. Dia berpartisipasi politik secara dewasa dalam menentukan pilihan dan keputusan politiknya. Sehingga korelasi antara perilaku politik, budaya politik dan demokrasi nampaknya akan dapat kita lihat pada proses politik yang sudah lewat atau yang akan datang. Tahapan dalam pemilu dan pilkada dapat dijadikan sebagai barometer untuk melihat seberapa besar tingkat kualitas ketiga konsep tersebut dilaksanakan secara ideal oleh warga negara dalam berpolitik.

Dalam rangka memperkuat bacaan dari berbagai perspektif untuk melihat dinamika-dinamika politik tersebut, pembahasan sederhana yang ada dalam buku ini diharapkan dapat membantu memberi pemahaman tersebut. Sehingga pembaca menjadi semakin dewasa dalam menentukan sikap-sikap politiknya kedepan.



## BAB II

# SEJARAH PERILAKU DAN BUDAYA POLITIK

Dalam membincang perilaku dan budaya politik sangat erat kaitannya dengan sejarah. Perilaku dan budaya politik tersebut secara historis tentu terbentuk atas dasar adanya konsepsi yang dinamis akibat munculnya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam sebuah kelompok yang memiliki sisi keunikan tersendiri. Sehingga menimbulkan berbagai bentuk penafsiran-penafsiran dalam sudut pandang yang berbeda, akibatnya para pemikir dan teoritikus politik sangat fleksibel dalam memberikan pemaknaan terhadap dinamika perilaku dan budaya politik tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut lebih mendalam, maka dapat disimak lebih melalui pembahasan berikut ini.

### A. Sejarah dan Perkembangan Perilaku Politik

Munculnya aliran *political behaviour* (perilaku politik) telah melalui sejarah panjang terhadap berbagai dinamika dan pegulatan pemikiran politik. Berawal sejak pertengahan abad ke-19, analisis politik sudah mulai didominasi oleh ajaran ilmiah, yang mencerminkan dampak semakin meningkat dalam aliran positivisme itu sendiri. Hal ini ditandai dengan terus

menggeliatnya kuliah-kuliah saint politik yang sebelumnya sekitar tahun 1870-an sudah mulai diperkenalkan di universitas-universitas di Oxford, Paris dan Columbia, dan pada tahun 1906 *American Political Science Review* diterbitkan untuk menjadi media pengembangannya. Antusiasme terhadap sains politik memuncak pada sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, terutama di Amerika Serikat,<sup>1</sup> dengan munculnya satu bentuk analisa politik yang kajiannya banyak mengambil konsentrasi pada behavioralisme (aliran kajian terhadap perilaku politik).

Sehingga untuk pertama kalinya, ini memberikan kepada ilmu politik nilai-nilai ilmiah yang kuat karena ia menyediakan apa yang sebelumnya tidak tersedia: data yang objektif dan terukur yang digunakan untuk menguji hipotesis. Kemajuan ini menandakan bahwa jika sebelumnya kajian politik atau perilaku politik banyak dikaji melalui aspek kualitatif (normatif), maka setelah adanya gerakan saint politik kajian yang mengarah pada penguatan dalam aspek kuantitatif (empiris) atau jumlah-jumlah dalam membaca gejala perilaku politik terus berkembang, sekaligus menandakan sebagai periode awal terhadap kajian dalam upaya mengukur persentase-persentase dukungan dalam politik.

Para analis politik seperti David Easton (1979) menyatakan bahwa ilmu politik dapat mengadopsi metodologi dari ilmu pengetahuan alam dan ini memunculkan perkembangbiakan model studi baru di area yang paling cocok untuk penggunaan

---

<sup>1</sup> Andrew Heywood, *Politik Edisi Keempat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 21-22.

metode-metode penelitian kuantitatif, seperti misalnya perilaku voting, perilaku para legislator, dan perilaku dari para politisi dan pelobi.<sup>2</sup> Setelah fase itu, kajian model behaviorisme kemudian telah menghasilkan, dan terus menghasilkan, pengetahuan yang tak ternilai di bidang-bidang seperti studi voting, studi-studi kuantifikasi politik lainnya.

Selain itu, jika ditelusuri lebih mendalam dalam tataran empiris latar belakang sejarah munculnya kajian perilaku politik, maka kita akan menemukan bahwa kajian perilaku politik merupakan pendekatan dalam ilmu politik yang dikembangkan oleh kaum *behavioralis* dengan melihat dan menekankan pada aspek individual sebagai insan politik daripada melihat sistem-sistem atau pun lembaga politik. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati perilaku-perilaku individual dengan melihat pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakannya, termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan pendapat politik dan memperoleh kecakapan politik serta menyadari peristiwa-peristiwa politik yang berlangsung.<sup>3</sup>

Secara historis, dalam perkembangannya perilaku politik merupakan gerakan protes kaum *behavioralis*<sup>4</sup> terhadap aliran

---

<sup>2</sup> Andrew Heywood, *Politik Edisi Keempat*, 22.

<sup>3</sup> David E. Epter dalam bukunya *Introduction to Political Analysis* (Cambridge: Winthrop Publisher, 1997), dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul, *Pengantar Analisa Politik* terj. Tim Penerjemah Yasogama (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 330.

<sup>4</sup> Istilah Behaviorisme pertama kali digunakan di Barat oleh John B. Weston (1878-1958), seorang psikolog yang menganggap pengetahuan sebagai

tradisional<sup>5</sup> dalam politik, yang kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu saja dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui kegiatan gerakan langsung.<sup>6</sup> Gerakan dan protes kaum behavioralis tersebut<sup>7</sup> mulai timbul dan berkembang di Amerika pada tahun

---

akibat hubungan dari ransangan dan tanggapan. “instrumentalisme perilaku” itu kemudian mengilhami pandangan baru mengenai kehidupan politik sebagai model dalam melihat dan mempelajari fenomena sosial politik, yang kemudian lambat laun menjadi kajian dan pendekatan tersendiri dalam Ilmu Politik. Lihat dalam bukunya S.P. Varma, *Modern Political Theory*, di terjemahkan edisi Indonesia dengan judul *Teori Politik Modern*, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 71.

<sup>5</sup>Aliran tradisional atau yang sering juga disebut pendekatan *legal-institusional*, mulai berkembang pada abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan yudikatif. Sehingga pendekatan ini lebih sering bersifat normatif. Adapun tokoh pemikir dari aliran ini adalah Eric Voegelin, Leo Strauss, dan Jhon Hallowel. Penjelasan ini dapat dilihat dalam bukunya S.P. Varma, *Modern Political Theory*, 27.

<sup>6</sup> Penjelasan tersebut dapat dibaca dalam bukunya S.P. Varma, *Modern Political Theory*, 83-84 dan 95.

<sup>7</sup>Eksistensi dan perkembangan aliran behavioralis tidak serta merta bebas dari kritik, justru banyak kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisional, kemudian dari kalangan pemikir neo-marxis dan bahkan dari kalangan penganut aliran tradisional itu sendiri. Pemikir tradisional seperti Eric Voegelin dan Jhon, mengkritik aliran behavioralis dengan argumentasi bahwa pendekatan itu terlalu steril karena menurutnya terlalu menolak masuknya nilai-nilai dan norma-norma dalam penelitian politik. Juga kritik yang dilontarkan adalah pendekatan perilaku tidak memiliki relevansi dengan realitas politik dan terlalu banyak memusatkan

1950-an sesuai perang dunia II, dengan tokohnya antara lain Gabriel Almond, David Easton, Karl Deutsch, Robert Dahl, dan David Apter.<sup>8</sup> Adapun sebab-sebab kemunculannya menurut Albert Somit dan Joseph Tanenhaus adalah: Pertama, sifat deskriptif dari ilmuwan politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari dalam konteks sosial politik. Kedua, ada kekhawatiran bahwa, jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, maka ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, secara garis besar protes pemikir kaum behavioralis terhadap pemikir tradisional adalah pertama, kelompok tradisional telah mengembangkan ilmu politik yang tidak memiliki sifat-sifat sebagai penghasil pengetahuan politik reliabel, kedua, banyak pengetahuan politik yang reliable

---

perhatian terhadap masalah yang kurang penting, seperti survey mengenai perilaku politik, sikap politik, dan pendapat umum. Selain itu aliran tradisional mengklaim bahwa pendekatan behavior tidak peduli atau buta terhadap masalah-masalah sosial seperti konflik dan pertentangan-pertentangan yang lainnya. Penjelasan lebih lanjut tentang ini dapat dilihat dalam bukunya Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 79. Bahkan dengan adanya kritik dari kaum behavioralis itu sendiri maka aliran behavioralis terbagi menjadi dua aliran yakni Behavioralis Teoritis dan Behavioralis Positif. Penjelasan lebih lanjut tentang dua aliran ini dapat dilihat dalam bukunya S.P. Varma, *Modern Political Theory*, 90.

<sup>8</sup>Lihat dalam bukunya S.P. Varma, *Modern Political Theory*, 88 dan 90.

<sup>9</sup>Pendapat Somit dan Joseph di atas dapat dilihat dalam bukunya Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 74.

dapat diterima dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan metode-metode alternatif, namun demikian kaum behavioralis tidak sepenuhnya membuang pendekatan yang digunakan oleh kaum tradisional, seperti sistem politik dan lembaga-lembaga yang ada sistem politik tersebut.<sup>10</sup>

Dalam konteks perilaku politik pemilih, pendekatan behavior merupakan perspektif tersendiri yang dapat digunakan dalam melihat perilaku politik individu maupun kelompok. Adapun perhatian utama perspektif behavioral ini menurut Apter adalah terletak pada hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, termasuk bagaimana proses pembentukan pendapat politik, bagaimana kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana cara orang menyadari peristiwa-peristiwa politik. Kategori-kategori pemikiran seperti ini biasanya dianggap sebagai ideologi, sistem kepercayaan yang menciptakan pola-pola tingkahlaku yang penuh makna, sehingga secara langsung menjadi proses penting dalam menentukan perilaku politik.<sup>11</sup>

Selain itu, salah satu pemikiran pokok dari pendekatan behavioral (perilaku) menurut Varma adalah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal, karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih

---

<sup>10</sup>Lihat dalam bukunya S.P. Varma, *Modern Political Theory*, 73-74.

<sup>11</sup> Penjelasan dan pendapat Apter di atas dapat dilihat dalam bukunya Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer; Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), 95.

bermanfaat untuk mempelajari perilaku perorangan (behavior) manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi kemasyarakatan, kelompok elit, gerkan nasional, atau suatu masyarakat politik.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Budiarjo, pendekatan ini tidak menganggap lembaga-lembaga formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. Jika penganut pendekatan behavior mempelajari parlemen, maka yang dibahas antara lain perilaku anggota parlemen seperti pola pemberian suaranya (*voting behavior*) terhadap rancangan undang-undang tertentu, pidato-pidatonya, giat tidaknya membuat undang-undang, cara berintraksi dengan teman sejawatnya, kegiatan *lobbying*, dan latar belakang sosialnya. Tapi selain itu, mereka juga pada umumnya meneliti tentang orientasinya terhadap kegiatan tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, harapan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Singkatnya behavioralisme merupakan keyakinan bahwa teori-teori sosial harus dibangun di atas landasan dari perilaku yang dapat diamati, menyediakan data yang terukur untuk penelitian. Sekaligus fase berkembangnya kajian behavioralisme tersebut bisa kita baca sebagai fase awal dimulainya kajian ilmu

---

<sup>12</sup> Lihat dalam bukunya S.P. Varma, *Modern Political Theory*, 95.

<sup>13</sup> Pendapat dan penjelasan Budiarjo di atas dapat dilihat dalam bukunya Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, 74.

politik yang mengarah pada kajian-kajian yang berusaha membaca gejala dan kecendrungan-kecendrungan politik seperti misalakan dalam survey politik.

Adapun sejarah awal munculnya mengenai budaya politik, sebenarnya masih berkaitan erat dengan sejarah munculnya perilaku politik di atas, dimana budaya politik sebetulnya mulai muncul dan mewarnai wacana ilmu politik pada akhir Perang Dunia II, sebagai dampak perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat. Sebagaimana diungkapkan oleh banyak kalangan ilmuwan politik, setelah PD II selesai, di Amerika Serikat terjadi apa yang disebut revolusi dalam ilmu politik, yang dikenal sebagai *Behavioral Revolution*, atau ada juga yang menamakannya dengan *Behavioralism*.<sup>14</sup>

Behavioral revolution terjadi dalam ilmu politik adalah sebagai dampak dari semakin menguatnya tradisi atau madzhab *positivisme*, sebuah paham yang percaya bahwa ilmu sosial mampu memberikan penjelasan akan gejala sosial seperti halnya ilmu-ilmu alam memberikan penjelasan terhadap gejala-gejala alam, dalam ilmu sosial, termasuk ilmu politik. Paham ini sangat kuat diyakini oleh tokoh-tokoh besar sosiologi, seperti *Herbert Spencer*, *Auguste Comte*, juga *Emile Durkheim*.

Paham positivisme merupakan pendapat yang sangat kuat di Amerika Serikat semenjak *Charles E. Merriam* mempeloporinya di Universitas Chicago, yang kemudian dikenal sebagai *The Chicago School* atau Madzhab Chicago, yang memulai

---

<sup>14</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Pustaka Pelajar*, (Yogyakarta, 1999), 97.

pendekatan baru dalam ilmu politik (*Somit and Tannenhaus, 1967; Almond and Verba, 1963; Almond, 1990*).

Salah satu dampak yang sangat menyolok dari behavioral revolution ini adalah munculnya sejumlah teori, baik yang bersifat *grand* maupun pada tingkat menengah (*middle level theory*). Kemudian, ilmu politik diperkaya dengan sejumlah istilah, seperti misalnya *sistem analysis, interest aggregation, interest articulation, political socialization, politic culture, conversion, rule making, rule application, dan lain sebagainya*.

Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Sebagaimana yang tersirat dalam adjektif yang disandangnya, kebudayaan politik menunjuk pada perwujudan kebudayaan di dalam konteks kehidupan yang lebih terbatas, yakni kehidupan politik. Mereka yang menaruh perhatian untuk menganalisa hubungan antara struktur dan operasi komunitas politik dengan kebudayaan di mana mereka beroperasi telah merumuskan kebudayaan politik secara mendalam. Teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang dikembangkan dalam memahami sistem politik.

Teori tentang sistem politik yang diajukan oleh David Easton, yang kemudian dikembangkan pula oleh Gabriel Almond, ini mewarnai kajian ilmu politik pada kala itu (1950-1970). Dan diantara kalangan teoritisasi dalam ilmu politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada 1960-an dan 1970-an, yaitu *The Civic Culture*. Civic Culture inilah yang menurut Almond dan Verba merupakan basis bagi budaya politik yang membentuk demokrasi.<sup>15</sup>

*Almond* (1965:20), menunjukkan bahwa “tiap sistem politik mewujudkan dirinya didalam pola orientasi-orientasi dan tindakan-tindakan politik tertentu”. Dalam pengertian yang hampir sama, *Lucian W. Pye* (1965:24) mendefinisikan budaya politik sebagai “the ordered subjective realism of politic, tertib dunia subjektif politik”. Definisi *Verba* (1965:31) berikut merupakan yang paling jelas. “budaya politik”, demikian katanya, “menunjuk pada sistem kepercayaan-kepercayaan tentang pola-pola interaksi politik dan institusi-institusi politik.”<sup>16</sup>

*Almond* menunjuk bukan pada apa yang diyakini orang tentang kejadian-kejadian tersebut kepercayaan-kepercayaan yang dimaksud dapat mengenai beraneka jenis, berupa kepercayaan-kepercayaan empirik mengenai situasi kehidupan

---

<sup>15</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1999, 99.

<sup>16</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 1999, 98.

politik, dapat berupa keyakinan-keyakinan mengenai tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang harus dihayati di dalam kehidupan politik dan semuanya itu dapat memiliki perwujudan atau dimensi emosional yang sangat penting.

## **B. Perilaku dan Budaya Politik di Era *Post Truth***

Bergulirnya Revolusi Industri 4.0 memaksa masyarakat disemua belahan dunia kian tidak bisa lepas dari teknologi informasi, rasanya semua aspek kehidupan manusia diwarnai dengan penggunaan teknologi digital. Diantara salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari suksesnya Revolusi Industri 4.0 seperti saat ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan media massa, baik itu terkait jenisnya, penggunaannya, dampaknya, dan industri yang berkembang didalamnya. Melalui media massa dimana segala jenis informasi dapat diperoleh dengan mudah baik itu informasi dengan konten positif maupun negatif sekalipun.

Tidak mengherankan jika kemudian perkembangan media massa ini sangat pesat dan begitu mudah mempengaruhi kehidupan masyarakat, entah terkait pola pikir maupun tingkah laku yang kemudian mengakibatkan banyak bermunculan berbagai macam gejala dalam semua lini kehidupan, salah satu yang paling signifikan menimbulkan berbagai macam gejala sosial adalah dinamika politik, salah satu didalamnya disebabkan oleh menguatnya pemanfaatan media massa dengan segala isu dan konten yang sedemikian rupa, baik yang benar maupun salah, fakta maupun kebohongan dalam upaya mempengaruhi

asumsi dan pilihan masyarakat saat momentum tertentu dalam politik yang melibatkan media arus utama dan para pembuat opini.

Dimana fakta-fakta bersaing dengan hoax dan kebohongan untuk dipercaya publik. Media mainstream yang dulu dianggap salah satu sumber kebenaran harus menerima kenyataan semakin tipisnya pembatas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Sehingga masyarakat lebih mencari pembenaran daripada kebenaran, yang kemudian kondisi tersebut dalam istilah populer kita kenal dengan sebutan *post truth*.

Isu *post truth* dalam dunia politik dewasa ini kian menguat bahkan sangat efektif mempengaruhi dan membentuk perilaku dan budaya politik, karena dalam kondisi tertentu digunakan sebagai alat propaganda untuk menyerang suatu golongan, kelompok, atau lawan politik tertentu. Fenomena *post truth* seringkali menjadi alat propaganda elit politik untuk memperebutkan kekuasaan.

Namun, untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan terkait *post truth* dalam sub bab ini, sebelum nanti membahas kaitannya dengan politik, akan dipaparkan sebatas pengertian *post truth* dan sejarah kemunculannya.

Jika ditelusuri lebih mendalam istilah *post truth* pertama kali, digunakan pada tahun 1992 oleh Steve Tesich, ia adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah *post truth* tersebut. Ia menggunakan istilah tersebut dalam artikelnya yang berjudul *The Government of Lies* di majalah *The Nation* yang

diterbitkan pada tanggal 6 Januari 1992. Ia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan situasi atau latar belakang Skandal *Watergate* yang terjadi di Amerika (1972-1974) dan yang terjadi pada Perang Teluk Persia untuk menunjukkan situasi masyarakat pada saat itu yang tampaknya “nyaman” hidup dalam dunia yang penuh kebohongan. Ia melihat bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan sekelumit kebenaran yang ditegakkan dan dengan bebas memilih untuk hidup pada ruang *post-truth*. Dilain sisi pemikir lain yang mencoba mengelaborasi penggunaan istilah *post truth* juga, yakni Ralph Keyes dalam bukunya *The Post truth Era* (2004) dan comedian Stephen Colber mempopulerkan istilah yang berhubungan dengan *post truth* yaitu *truthiness* yang kurang lebih maksudnya sama sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali.<sup>17</sup>

Adapun arti *post truth* secara etimologis berasal dari kosakata Bahasa Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, *post* artinya *after* (setelah) dan *truth* artinya *quality or state of being true* (kualitas atau dalam keadaan benar atau kebenaran). *Truth* merupakan kata benda dari kata sifat *true*.<sup>18</sup>

Jadi secara sederhana *post truth* artinya setelah atau paska-kebenaran. Kemudian populer disebut era *post truth* atau era paska-kebenaran karena dalam rentang masa ini penggunaan akal yang melandasi kebenaran dan pengamatan fakta sebagai

---

<sup>17</sup> Kharisma Dhimas Syuhada, *Etika Media di Era Post Truth*, dalam Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol.V No.1, April 2017, 77.

<sup>18</sup> Kharisma Dhimas Syuhada, *Etika Media di Era Post Truth*, 77.

basis pengukuran obyektifitas seakan-akan tak penting dalam mempengaruhi opini, pemikiran, maupun perilaku publik, mereka para pengagum *post truth* menganggap benar salah tidak penting yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana tercapainya tujuan-tujuan yang mereka sudah targetkan dengan cara instan dan pragmatis. Adapun secara lebih rinci Oxford Dictionaries<sup>19</sup> memaknai bahwa *post truth* merupakan istilah atau iklim yang berhubungan dengan atau mewakili situasi-situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibanding fakta-fakta yang obyektif.<sup>20</sup>

Kejadian dan peristiwa-peristiwa yang sering kita saksikan hari ini, di era *post truth* ini telah menjadi ancaman bersama karena banyaknya saluran komunikasi yang digunakan. Yang menjadikan semua informasi beredar secara bebas dan tidak diverifikasi di Internet, kemudian memberikan kemungkinan terjadi kesalahan informasi dan propaganda pada skala yang sebelumnya hampir tidak mungkin terjadi. Akibatnya, sekarang mungkin untuk berbagi berita palsu lebih sering terjadi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, juga karena fakta bahwa media sosial telah memungkinkan proliferasi akun palsu yang tampak otentik atau menyesatkan yang membantu menyebarkan kebohongan, paling sering ditujukan kepada publik. *Post truth* telah mewakili gelombang populisme yang begitu berbahaya yang mengagungkan vulgaritas dan

---

<sup>19</sup> Lihat dalam *The Oxford English Dictionary* (London: Oxford University Press, 1993), Volume 1, cet. I.

<sup>20</sup> Kharisma Dhimas Syuhada, *Etika Media di Era Post Truth*, 77.

kebohongan, dengan implikasi yang tidak hanya soal etis, tetapi mengganggu kestabilan politik domestik dan geopolitik global.

Dalam situasi tersebut, informasi-informasi *hoax* memiliki pengaruh yang jauh lebih besar ketimbang fakta yang sebenarnya. Selain ditandai dengan merebaknya berita *hoax* di media sosial, era *post truth* juga ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi yang sejak awal memang sudah mengabaikan prinsip objektif dan rasionalitas.

Sehingga dalam rentang masa ini, politisi acap kali kita temukan sering mempengaruhi masyarakat dengan cara menomorsatukan sensasionalitas dan menggerakkan emosionalitas diberbagai flatform media yang mereka gunakan, yang berwujud dalam berbagai bentuk dan tindakan perilaku politik baik saat kampanye maupun dalam momen sosialisasi politik lainnya. Mereka membuat masyarakat menjadi lebih tertarik dengan kehebohan sebuah berita begitu juga mereka lebih terpengaruh dengan barita dan hal-hal yang menyentuh perasaan, seperti membuat rasa gembira, melahirkan sikap sedih, kecewa, marah, dan seterusnya.

Hal semacam itulah yang akhir-akhir ini semakin menguat mewarnai percaturan perpolitikan di Indonesia. Saat pilpres, pileg dan pilkada serentak tahap pertama kemarin, propaganda dan kampanye-kampanye dengan konten yang provokatif, rasis, serta sentiment keagamaan terus menguat yang diperparah oleh kondisi pemanfaatan isu dan berita *hoax* seputar tema tersebut. Hal ini terkonfirmasi nyata dengan adanya pembelahan kelompok pendukung masing-masing calon terutama dalam

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 kemarin. Masing-masing pendukung calon presiden dan wakil presiden dengan sadar memaksimalkan penggunaan media sosial untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat, termasuk salah satunya dengan menggunakan konten dan isu-isu yang terindikasi hoax. Sehingga dunia media sosial menjadi gaduh dan sesak dengan berbagai sebaran informasi pada saat itu.

Namun jika ditelusuri lebih mendalam, era *post truth* sebetulnya mendapat momentumnya karena adanya kondisi massa yang sudah cukup jenuh dan membenci limpahan pesan dan rayuan, yang semua berujung meminta untuk membeli, mengonsumsi, memilih, memberi pendapat, atau ambil bagian di kehidupan sosial politik. Era *post truth* saat ini mengutamakan bagaimana melihat dan membaca versi fakta yang lebih dekat dengan ideologi dan kepentingan masing-masing. Masyarakat dipaksa untuk tidak menggunakan akal sehat dan rasionya, seolah yang dia manfaatkan dan penuhi adalah keinginan masyarakat yang sesaat yang mereka butuhkan, sehingga pola yang terjadi adalah barter barang dengan suara. Lalu apa kebaruan era *post truth* dibandingkan kebohongan yang sejak dulu sudah terjadi dan sering dipraktikkan dalam politik?

Menjawab hal tersebut, Johannes Haryatmoko, mengemukakan apa saja kebaruan dari *post-truth*. Menurutnya terdapat lima kebaruan yang menandai era *post-truth*: (1) luasnya akses ke konten informasi berkat digitalisasi komunikasi, (2) masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui medsos berkat demokratisasi media dan jurnalisme warga, (3) masyarakat lebih rentan menerima informasi yang

keliru karena berkembang komunitas-komunitas seideologi, (4) teknologi telah merancukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika, dan (5) kebenaran tidak perlu lagi difalsifikasi atau dibantah, tetapi kebenaran menjadi nomor dua.<sup>21</sup> Kelima kebaruan itu memberi peluang politisi yang haus kekuasaan untuk merekayasa agar prasangka negatif kelompok-kelompok masyarakat diintensifkan melalui manipulasi emosi mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Masih senada dengan pendapat di atas, Nayef Al-Rodhan, mengemukakan bahwa *Post truth sejatinya* menarik emosi dan lebih dari sekadar fakta dan bukti. Menurutnya sebuah berita dan konspirasi palsu bisa menjadi viral dalam hitungan jam, menciptakan realitas alternatif dan melayani tujuan propaganda yang sudah disusun. Lebih jauh ia melihat bahwa *post truth* merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan demokrasi di seluruh dunia. Ia menambahkan peta kondisi geopolitik di era berita palsu juga menjadi kian rumit karena *post truth* mengganggu elemen mendasar dari diplomasi dan politik internasional, yaitu dari sisi komunikasi.<sup>22</sup> Baik komunikasi level elit individu ke individu, komunikasi resmi diplomasi kenegaraan, maupun komunikasi-komunikasi dengan tujuan

---

<sup>21</sup> Haryatmoko. (2017, November 15). Ketika Emosi Dominasi Politik. *Kompas.Id*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/opini/2017/11/15/ketika-emosi-dominasi-politik/>

<sup>22</sup> Al-Rodhan, N. (2017, June 7). *Post truth* Politics, the Fifth Estate and the Securitization of Fake News. *Global Policy Journal*. Retrieved from <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/07/06/2017/post-truth-politics-fifth-estate-and-securitization-fake-news>

tertentu. Karena dinamika *post truth* ini terjadi hampir disemua Negara dengan pola dan model yang hampir sama, dengan substansinya pemaknaan arti *post truth* secara global hampir sama.

Al Rodhan lebih lanjut melihat bahwa terdapat karakteristik utama dari *post truth* tersebut diantaranya: (a) mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional, (b) mengabaikan data dan fakta, (c) mengutamakan dan memviralkan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu, (d) mengkombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya, (e) mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu, dan (f) memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban televisual, online, android, dan media sosial<sup>23</sup> Terlihat Rodhan disini dapat mengidentifikasi dengan baik model gejala *post truth* itu sendiri.

Tapi sebetulnya jika ditelaah lebih mendalam, kondisi *post truth* pada akhir-akhir ini diperparah oleh kondisi sebagian besar masyarakat atau publik yang cenderung diantaranya: (a) perilaku bermedia sosial sangat pragmatis. Masyarakat malas melakukan penelusuran apakah informasi atau berita yang diterima merupakan fakta atau hoax. (b) minimnya budaya literasi. Akibatnya masyarakat tidak memiliki cukup informasi

---

<sup>23</sup> Setiawan, I. (2017). Media sosial, politik post-truth, dan tantangan kebangsaan. website: <http://matatimoer.or.id/wp-content/uploads/2017/09/Media-sosial.pdf>

terkait suatu hal, sehingga tidak mampu membedakan antara yang fakta dan hoax. (c) belum adanya filterisasi informasi dan konten yang dibuat atau diterima secara ketat oleh platform media sosial yang digunakan, akibatnya masyarakat merasa bebas-bebas saja membuat konten tanpa ada yang melarang lewat sistem. (d) belum maksimalnya hukuman bagi pembuat dan penyebar berita hoax. sehingga masyarakat menjadi tidak merasa takut dan bersalah, jikapun mereka dihukum biasanya karena ada yang melaporkan jika keberatan, tapi jarang yang sengaja diproses hukum akibat berita dan informasi hoax yang disebarkannya.

Apalagi jika sudah berkaitan dengan momentum pesta politik, setiap pemilu seperti Pilpres atau Pileg. Intensitas aktifitas bermedia sosial masyarakat semakin meningkat tajam karena mereka menggunakan media sosial sebagai media kampanye dan promosi untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas calon yang didukung sehingga calon yang didukung menang, dan tidak hampir semua calon juga pada saat itu pasti menggunakan media sosial untuk promosi dan sosialisasi bahkan komunikasi dengan masyarakat. Pada saat itulah, kemudian banyak berseliweran berita dan informasi hoax baik yang sengaja diproduksi untuk tujuan tertentu, sehingga dalam hal ini dibutuhkan kecerdasan masyarakat dalam bermedia sosial terutama dikalangan anak muda yang hampir sebagian besar menggunakan media sosial. Secara bersamaan pada saat itulah, kemudian post-truth itu kian tumbuh subur dan melahirkan hoax sebagai anak kandungnya.

Saking karena populernya penggunaan kalimat *post truth* dalam satu dekade terakhir ini, ditahun 2016, Oxford menjadikan kata *post truth* sebagai “*Word of the Year*”. Kalimat paling populer pada tahun itu, karena jumlah penggunaan istilah *post truth* di tahun 2016 meningkat 2000 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015. Adapun alasan mengapa kurva penggunaan kata *post truth* melambung tinggi di tahun 2016. Sebagian besar penggunaan kata ini, hampir selalu disematkan pada dua momen politik paling berpengaruh di tahun 2016; yakni keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (*Brexit*) serta terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.<sup>24</sup> Secara lebih konseptual Oxford Dictionaries juga menjelaskan bahwa terpilihnya ‘*post-truth*’ sebagai ‘*Word of The Year*’ karena dipengaruhi oleh cara yang ditempuh kebanyakan orang masa kini untuk mendapatkan informasi yang berbasis pada media sosial yang serba instan yang kadang tidak memperdulikan kredibilitas dan kebenaran informasinya belum jelas asal usulnya.

Hal itu sangat dimungkinkan terus terjadi karena kecenderungan menguatnya cara-cara baru terkait dengan pembentukan opini publik muncul dari media alternatif seperti blog pribadi, YouTube, saluran pesan instan seperti WhatsApp, Telegram dan Facebook, atau jaringan media sosial lainnya seperti Snapchat, instagram atau Twitter, telah mengalahkan model jurnalisme tradisional konvensional seperti media cetak, dan elektronik.

---

<sup>24</sup> Kharisma Dhimas Syuhada, *Etika Media di Era Post Truth*, 76.

Bayangkan saja, saat ini terkadang sebuah Tweet sederhana dapat meledak dan viral sehingga dapat memobilisasi massa dan memberikan efek yang tak terbayangkan bila dibandingkan beberapa tahun lalu. Penyebaran berita hoax menyebabkan kebohongan menjadi hal yang lumrah dan karenanya, muncul relativisasi kebenaran. Nilai atau kredibilitas media agak memudar dibandingkan dengan pendapat pribadi. Fakta-fakta itu sendiri menjadi nomor dua, sementara bagaimana sebuah cerita diceritakan lebih diutamakan daripada apa isinya.

Karena itu, ini bukan tentang apa yang telah terjadi, melainkan tentang mendengarkan, melihat, dan membaca versi fakta yang lebih dekat dengan ideologi setiap orang. Padahal, tidak semua hal yang ada di platform tersebut merupakan kebenaran. Internet telah mengubah cara orang berkomunikasi, tidak hanya dalam hal kecepatan, tetapi juga dengan memungkinkan individu untuk menemukan dan menyatu di sekitar kelompok lain dengan bias yang mirip dengan mereka sendiri, sehingga memperkuat keyakinan mereka.

Akibatnya, sekarang mungkin untuk berbagi berita palsu lebih sering terjadi daripada berita yang diverifikasi, juga karena fakta bahwa media sosial telah memungkinkan proliferasi akun palsu yang tampak otentik atau menyesatkan yang membantu menyebarkan kebohongan, paling sering ditujukan kepada publik. *Post truth* mewakili gelombang populisme berbahaya yang mengagungkan vulgaritas dan kebohongan, dengan implikasi yang tidak hanya etis, tetapi mengganggu kestabilan politik domestik dan geopolitik global.

Misalkan seperti yang sempat disinggung diatas, bahwa dengan diawali oleh dua momen penting; yakni riuhnya Pilpres di Amerika melalui kemenangan Donald Trump, dan keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit). Pada kedua momen itu, berita hoax dengan sangat mudah disebarkan kepada masyarakat luas dan mempengaruhi opini publik.

Selama kampanye misalkan Trump ditengarai menggunakan *fake news*, antara lain menuduh Obama dan Hillary sebagai pendiri ISIS, adanya 30-an juta imigran ilegal dan deportasi massal, tingkat pengangguran Amerika 42%, moderator debat capres tidak netral karena pendukung Partai Demokrat, dan masih banyak lagi. Setelah kebohongan dikonfirmasi dengan fakta, kubu Trump enteng menyebutnya sebagai bukan kebohongan, melainkan "*alternative facts*." New York Times membuat pernyataan bernada keluhan, "*We have entered an age of post truth politics*." Sebuah studi dari PolitiFact menemukan 70% dari pernyataan-pernyataan Trump terkategori *mostly false*, *false*, dan *untruth*. Atas "prestasi" itu, Trump dianugrahi *Lie of The Year* 2015 dan 2017.<sup>25</sup>

Pada kasus kedua, referendum Inggris Raya; Kampanye Referendum UE dipenuhi dengan klaim liar tentang Inggris, tetap bersama atau keluar. Baru-baru ini kandidat favorit Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson dipanggil Pengadilan London karena dituduh menyebarkan berita hoaks mengenai keharusan Inggris membayar GBP350 juta, jika Inggris

---

<sup>25</sup> Lusi, S. S. (2019, May 3). Melampaui "Post-Truth." *Detik.Com*. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4534507/melampaui-post-truth>, tanggal 25-07-2020.

tidak keluar dari Uni Eropa (UE). Berita hoaks itu yang menyiratkan Inggris harus keluar dari UE (Brexit) yang disebarluaskan melalui kampanye Johnson, ketika ia memulai cuti dari pekerjaannya jelang referendum Brexit, melansir dari Reuters.<sup>26</sup>

Dengan kejadian yang hampir sama, di Ukraina misalkan, tumbangnya presiden mereka diawali dengan sebuah status di medsos yang dibuat seorang jurnalis di Facebook yang dilanjutkan dengan seruan berkumpul di Lapangan Maidan di Kiev. Di Mesir, medsos mengambil peran penting dalam penumbangan Presiden Husni Mubarak, 2011. Sementara di Jerman, partai ultra-kanan mendapatkan 12,6% kursi di parlemen dengan cara menyebarkan ketakutan melalui medsos bahwa para pengungsi dari Suriah mendapat lebih banyak keuntungan daripada orang asli Jerman.<sup>27</sup>

Lalu bagaimana dengan post truth di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan mendasar tersebut Hasil penelitian Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia tahun 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 92,40 % berita hoaks diterima masyarakat melalui sosial media seperti facebook, twitter, instagram serta path. Sementara sebanyak 62,80 % diterima

---

<sup>26</sup> Akurat.com. (2019). Calon PM Inggris Johnson Dipanggil Pengadilan Atas Hoaks Brexit. Diakses 26-07-2020, from akurat.co website: <https://akurat.co/ekonomi/id-640121-read-calon-pm-inggris-johnson-dipanggil-pengadilan-atas-hoaks-brexit>

<sup>27</sup> Sulistyono, E. (2017, November 28). Medsos dan Fenomena "Post-Truth". *Koran Sindo*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1261141/18/medsos-dan-fenomena-post-truth->. Tanggal 26-07-2020

melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan sebanyak 34,90 % melalui situs web.<sup>28</sup>

Sementara jika dilihat dari jenis informasinya, peringkat pertama jenis hoaks yang diterima masyarakat terdiri dari sebanyak 91,80 % berupa hoaks masalah sosial dan politik, baik itu terkait Pilkada ataupun tentang Pemerintah. Kedua, adalah masalah SARA sebanyak 88,60 %, Kesehatan sebanyak 41,20 %, makanan dan minuman sebanyak 32,60 %, penipuan keuangan sebanyak 24,50 %, Iptek sebanyak 23,70 %, sisanya adalah jenis hoaks seperti berita duka, candaan, bencana alam, serta lalu lintas.<sup>29</sup> Pola peningkatan diseminasi berita hoaks semakin meledak oleh kepentingan kekuasaan Pilpres dan Pileg serentak 2019.

Menjelang beberapa hari sebelum pilpres dan pileg 2019 Kompas merilis artikel berjudul “*Lunturnya Kearifan Berpolitik di Era Post Truth*”. Artikel ini menggarisbawahi bahwa Indonesia juga tak luput dari badai *post truth* yang dapat dirasakan dalam kontestasi lima tahunan ini. Kedua momen ini (Pilpres dan Pileg) kental diwarnai sifat-sifat destruktif: saling nyinyir, saling memfitnah, saling menghujat dan masih banyak lagi yang diniatkan untuk mendekonstruksi lawan demi meraih keuntungan politik. Politik di era *post truth*, lebih banyak

---

<sup>28</sup> Mastel. (2017). *HASIL SURVEY MASTEL TENTANG WABAH HOAKS NASIONAL*. Retrieved from <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoaks-nasional-2017>. Dakses tanggal 02-7-2020.

<sup>29</sup> Mastel. (2017). *HASIL SURVEY MASTEL TENTANG WABAH HOAKS NASIONAL*. Retrieved from <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoaks-nasional-2017/>. Dakses tanggal 02-7-2020.

ditandai oleh para aktor dan simpatisan politik yang lebih mendahulukan perasaan dan emosi dibandingkan fakta objektif yang sesungguhnya. Termasuk pendapat grup afiliasi yang dianggap lebih benar bahkan dianggap mutlak benar daripada pendapat yang di luar kelompok afiliasinya. Hal ini semakin meruncing oleh adanya media sosial sebagai medium sakti era *post truth*. Penguasaan informasi sebagai sebuah komoditas berharga saat ini konfigurasinya berubah total. Dulu, sebelum ada media sosial, kekuasaan atas informasi dipegang hanya pihak-pihak tertentu saja, yaitu pemerintah, elite, dan pers. Hadirnya media sosial nyaris membuat semua orang bisa menguasai dan menyebarkan informasi.<sup>30</sup>

Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, rilis Kompas di atas tidaklah mengherankan. Dilansir Detik.com Sabtu, 26 Agustus 2017, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani mengungkapkan bahwa sebanyak 6.000 situs internet telah diblokir. Situs-situs yang diblokir tersebut kebanyakan terkait penyebaran hoaks. Situasi ini mencapai puncak pada Pilpres dan Pileg 2019 yang lalu. Pemerintah terpaksa membatasi akses internet di seluruh Indonesia pada 22 Mei 2019 pasca pengumuman hasil Pilpres oleh KPU, dan berlanjut pada pemblokiran ribuan akun media sosial.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kompas. (13 Maret 2019). Lunturnya Kearifan Berpolitik di Era "Post-Truth." *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/09014261/lunturnya-kearifan-berpolitik-di-era-post-truth?page=all>. Dakses tanggal 10-6-2020.

<sup>31</sup> Detik.com. (2017). Samuel Aribjani Kasus Hoaks dan 324 Hate Speech Sepanjang 2018. Retrieved August 23, 2019, from Detik.com website:

Dalam keterangan tertulis (27/5/2019) Kominfo telah menutup dua ribuan akun medsos dan situs web sebelum dan selama pembatasan akses sebagian fitur platform medsos dan layanan pesan instan. Sebanyak 551 akun Facebook telah diblokir. Lalu 848 akun Twitter, Instagram dengan 640 akun, 143 akun YouTube, serta masing-masing 1 untuk url website dan LinkedIn. Dengan demikian total ada 2.184 akun dan website yang diblokir. Dalam pemblokiran ini, Kominfo pun bekerja sama dengan penyedia platform digital.

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 antara Basuki Tjahaja Purnama dengan Anies Baswedan juga disinyalir sebagai bentuk fenomena *post truth*. Dua calon berasal dari latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Ujaran kebencian dan potongan-potongan informasi yang tak utuh dari beberapa peristiwa bertebaran bak hujan yang tak kunjung reda di dunia maya. Sepanjang kampanye Pilkada DKI Jakarta, media sosial dipenuhi ujaran kebencian, berita hoaks, dan informasi menyesatkan.

Contoh potret kasus-kasus gemilangnya *post truth* di atas adalah sebagian dari sekian banyak yang bisa kita temukan di negara lainnya. Mengutip Victoria Prego, Presiden Madrid Press Asociation, bahwa penggandaan berita palsu adalah fakta yang secara serius mengancam kesehatan sistem demokrasi seperti yang kita ketahui sampai sekarang, di mana informasi profesional yang jujur serasa tidak berdaya. Dan sebenarnya,

---

<https://news.detik.com/berita/d-4272642/Samuel-ada-53-kasus-hoaks-dan-324-hate-speech-sepanjang-2017>. Dakses tanggal 10-6-2020.

mereka tidak berdaya melawannya. Karena kebenaran yang tak terbantahkan adalah bahwa media tradisional telah kehilangan kredibilitas dengan mayoritas populasi. Kepercayaan yang pernah mereka tempatkan di media telah digantikan oleh keyakinan praktis yang tak terbatas pada informasi yang mereka terima melalui media sosial. Namun bias warga yang antusias dan menyerah terhadap cara baru berkomunikasi dan menerima informasi, dapat dipahami karena hal itu jauh dari para perantara yang, sampai sekarang, adalah surat kabar atau televisi. Warga negara sekarang adalah master dan penulis dari lingkungan informatif mereka sendiri.<sup>32</sup>

Ditengah tumbuh suburnya *post truth* tersebut secara politik, terdapat dampak positif secara ekonomi lewat pemanfaatan media sosial yang ditandai dengan berkembangnya *marketplace* yang mempertemukan penjual dan pembeli, *e-commerce*, UMKM yang memanfaatkan toko *online*, jasa transportasi online (Gojek, Grab, dll), rental mobil rumahan dan berkembangnya *economic sharing resources* sehingga semakin masifnya *start-up* bisnis, yang membuka peluang usaha baru, menciptakan pasar baru dan menggunakan sarana promosi baru yang efektif dan efisien berkat pemanfaatan positif media sosial.

Sangat disayangkan ketika budaya politik *post truth* menjadi lebih dominan dan menggeser peran strategis media sosial.

---

<sup>32</sup> Prego, V. (2017, March). Informative Bubbles. *UNO-Magazine*, 20–21. Retrieved from [https://www.uno-magazine.com/wp-content/uploads/2017/03/UNO\\_27\\_ENG\\_alta.pdf](https://www.uno-magazine.com/wp-content/uploads/2017/03/UNO_27_ENG_alta.pdf). Dakses tanggal 20-6-2020.

Diakui atau tidak, bangsa ini memang masih menyimpan banyak permasalahan yang bisa dikomodifikasi oleh individu atau kelompok tertentu untuk kemudian diledakkan melalui viral di media sosial. Persoalan SARA, misalnya, bisa setiap saat dimanfaatkan untuk “memobilisasi kecemasan dan ketakutan” komunitas tertentu apabila individu atau kelompok yang berbeda dalam hal agama atau suku berkuasa.<sup>33</sup>

Banyak cara telah dilakukan untuk membendung badai hoaks dalam *era post truth* ini. Upaya dilakukan baik dari sisi penyedia layanan (platform) yakni oleh pembuat aplikasi media sosial itu sendiri seperti oleh perusahaan Facebook, WA, IG, Twitter, dll namun tetap belum maksimal. Oleh pemerintah, dalam hal ini dengan membuat regulasi yang didalamnya mengatur bentuk hukuman, ancaman dan lain-lain, tapi juga masih belum efektif karena penerapannya di lapangan masih belum bisa maksimal. Dan pencegahan oleh gerakan atau inisiatif-inisiatif lembaga-lembaga non pemerintah (seperti irisan keagamaan, ormas, akademisi, dll) tapi juga belum berhasil sepenuhnya. Dengan demikian, pencegahan terbaik harus tetap dimulai dari diri individu masing-masing, dengan baca, teliti, carai kebenarana informasinya baru dishare atau dibagikan.

Dalam batas tertentu ulasan-ulasan di atas tersebut merupakan gambaran nyata bagaimana perilaku dan budaya politik global pada era *post truth* saat ini sedang melanda dunia global, dan telah menjadi ancaman serius yang kapanpun siap

---

<sup>33</sup> Setiawan, I. (2017). Media sosial, politik post-truth, dan tantangan kebangsaan. Dakses tanggal 10-6-2020 dari <http://matatimoer.or.id> website: <http://matatimoer.or.id/wp-content/uploads/2017/09/Media-sosial.pdf>

akan menjadi trigger utama dalam menciptakan berbagai kekacauan secara lokal, global, maupun internasional jika tidak mampu dikendalikan dengan baik. Pada posisi ini diharapkan peran serta semua elemen bangsa dan masyarakat global untuk kemudian dapat bertindak dan bertingkah laku dengan dasar rasionalitas yang berbasis pada data dan fakta yang ada. Sehingga *post truth* itu sendiri dapat dihindari.

### **C. Titik Temu Makna Perilaku Politik dan Budaya Politik**

Jika ditelusuri lebih jauh terkait munculnya dua kajian politik yang saling melengkapi secara konstruksi keilmuan ini, kita akan menemukan bahwa sebetulnya kajian perilaku politik maupun budaya politik merupakan pandangan yang sama-sama berasal dari kajian sosiologi, psikologi dan antropologi yang kemudian diadopsi dan didialogkan dalam Ilmu Politik. Ketika telah menjadi kajian dalam Ilmu Politik sikap atau perilaku tersebut dalam sebuah kelompok masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kesiapan untuk bertindak, yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon atau menilai masalah-masalah politik yang terjadi, dan kemudian terakhir nanti diungkapkan dalam berbagai bentuk ekspresi dan gerakan politik.<sup>34</sup>

Maka secara sederhana “perilaku” dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk atau reaksi dari suatu perasaan yang kemudian

---

<sup>34</sup> Chilcote, Ronald, *Teori Pebandingan Politik*, (Terjemah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010, 59.

berwujud perilaku. Hal ini terkait bagaimana sikap seseorang tersebut merespon dalam bentuk mendukung atau menolak dari obyek tertentu.<sup>35</sup> Dengan kata lain, perilaku merupakan rangkuman dari kondisi psikologis atas pengetahuan dan perasaan yang akhirnya menunjang sebuah sikap tertentu. Jika dihubungkan dengan politik, maka perilaku politik dapat kita maknai sebagai sebuah kecenderungan individu yang kemudian menjadi perilaku kolektif di dalam sebuah sistem politik untuk tujuan dan kemenangan tertentu.

Secara garis besar, sikap senantiasa tidak konstan, banyak faktor yang melatarbelakangi seorang tokoh politik maupun masyarakat umum menentukan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting bagi dirinya, media massa, partai politik dan faktor emosional. Pemikiran yang membentuk perilaku politik individu dan perilaku kolektif masyarakat atau bangsa terhadap suatu sistem politik yang telah bertahan lama akhirnya membentuk semacam pola-pola politik masyarakat, hingga menghasilkan keputusan politik atas dasar sikap-sikap tersebut. Hal inilah yang kemudian membentuk yang namanya budaya politik.<sup>36</sup>

Dalam pembahasan budaya politik pada buku “Pengantar Sosiologi Politik”, Elly M. Setiadi dan Usman Kolip menjelaskan bahwa budaya politik adalah: “kecenderungan berperilaku

---

<sup>35</sup> Azwar, Syaifuddin, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4.

<sup>36</sup> Setiadi, M. Elly dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 95.

individu di dalam suatu sistem politik yang berlaku dalam suatu negara. dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan kajian yang utama dan bersifat empiris. Artinya, pendapat orang-peroranglah yang membangun kesimpulan penelitian”.<sup>37</sup>

Ulasan yang terkenal yang sering digunakan sebagai bahan rujukan biasanya dihubungkan dengan Budaya Politik yang dirumuskan oleh Gabriel Almond dan Powell. Tiga hal yang mempengaruhi sebuah orientasi keputusan atau sikap politik ditentukan oleh orientasi kognisi, orientasi afeksi dan orientasi evaluasi.

Penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga Orientasi tersebut adalah bagaimana Orientasi Kognisi dipahami sebagai pengetahuan dan kepercayaan mengenai suatu masukan atau informasi khususnya dalam sistem politik, serta peranan-peranan dan output sistem politik. Orientasi afeksi sering diartikan sebagai perasaan keterikatan dan keterlibatan, penolakan dan aliansi mengenai sistem politik yang dapat mempengaruhi rasa kecewa, sedih dan bangga terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi evaluasi dipahami sebagai konklusi atas kedua orientasi sebelumnya untuk menilai, berpendapat mengenai obyek politik. Ketiga orientasi tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan terkombinasi dalam berbagai pola interaksi. Pola tersebut akan membentuk tuntutan yang diajukan terhadap suatu sistem politik, respon

---

<sup>37</sup> Setiadi, M. Elly dan Usman Kolip. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*, 94-95.

terhadap hukum serta dukungan atau bahkan penolakan terhadap perilaku dalam peranan dan langkah politiknya.

Perilaku politik atau tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara adalah suatu kegiatan baik perorangan maupun kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan politik (Pemerintah). Istilah perilaku politik dalam perkembangan selanjutnya sangat terkait dengan konsep budaya politik. Kedua konsep ini tidak bisa terpisahkan antara satu dengan lainnya.

Namun sejatinya kedua konsep ini berbeda jika dipahami secara lebih luas. Perilaku politik lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang disebabkan cara pandang individu atas sistem politik yang dilaksanakan dalam aktivitas berpolitik dia. Sedangkan budaya politik lebih berkonotasi pada pelebagaan dari perilaku politik warga negara yang telah menyatu dalam aktivitas sosial dan politik.

Pada tataran praksis, budaya politik warga negara akan nampak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, dalam proses rekrutmen politik partai politik atau lembaga legislatif, pada proses kampanye politik dan aktivitas menyalurkan suara politiknya dalam pemilu (eksekutif dan legislatif) maupun dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Pola-pola perilaku politik yang nampak ke permukaan dan cenderung menjadi hal yang biasa secara umum, dapat mengindikasikan bahwa telah terjadi proses pelebagaan perilaku politik warga negara menjadi budaya politik. Tentu saja perilaku politik yang dikehendaki untuk menjadi budaya politik warga negara Indonesia adalah

budaya politik yang bisa membangun secara konstruktif bagi pendewasaan sistem politik Indonesia. Artinya budaya politik tersebut semakin menjadi bagian yang mencirikan bahwa pendidikan politik warga negara Indonesia semakin berkualitas. Bukti adanya peningkatan kualitas budaya politik warga negara adalah dalam hal proses politik yang didalamnya setiap warga negara terlibat atau melibatkan diri. Dia berpartisipasi politik secara dewasa dalam menentukan pilihan dan keputusan politiknya.

Selain adanya usaha dalam menemukan korelasi makna dari dua istilah tersebut, perilaku politik dan budaya politik, sebetulnya terdapat satu istilah juga yang terkadang perlu dipertegas posisi titik temu maknanya dengan dua istilah yang sudah dibahas di atas, istilah yang penulis maksud tersebut adalah istilah “partisipasi politik”. Penggunaan kata partisipasi politik ini terkadang juga dapat mengecoh pemahaman kita jika belum ditemukan posisi substansi persamaan maknanya dengan dua istilah di atas tersebut, sehingga perlu saya kemukakan disini.

Jika ditelaah lebih jauh, kita akan menemukan bahwa ternyata maknanya perilaku politik dan partisipasi politik sebagai mana yang sering digunakan oleh pemikir-pemikir keilmuan politik di Indonesia maupun pemikir global selama ini, makna dan maksud dari perilaku politik dan partisipasi politik itu substansinya sama sehingga selalu dimaknai sama. Dimana sama-sama menunjukkan sebuah aktifitas politik individu atau kelompok warga negara dalam memilih pemimpin, mempengaruhi kebijakan, *lobbying* dan lain

sebagainya. Sehingga penulis mengartikan dua istilah tersebut juga dengan makna yang sama dalam kajian ini.

Hal ini merujuk dari adanya persamaan penggunaan substansi dua makna kata tersebut oleh Avery Leiserson, dalam bukunya *Parties and Politics An Institutional and Behavioral Approach* (New York: Alfred A Knopf, 1958), demikian pula Anthoni H. Birch dalam bukunya *The Concepts of Modern Democracy 2<sup>nd</sup> Edition* (Canada: Simeultaniusly Published, 2001) dan oleh Robert J. Huckshorn, *Political Parties in America Second Edition* (California: Cole Publishing Company, 1980), juga oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya, *Memahami Ilmu Politik*,<sup>38</sup> Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik dan perilaku politik sama-sama merupakan kegiatan politik, yakni warga negara yang memiliki jabatan dalam pemerintahan dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan sedangkan masyarakat tidak memiliki kewenangan, akan tetapi dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat. Dengan demikian, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.

Memperkuat pemahaman di atas terkait makna partisipasi politik, secara etimologi partisipasi berarti keikutsertaan. Dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan

---

<sup>38</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999), 141.

kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, atau terlibat sebagai penyelenggara dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>39</sup> Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington partisipasi politik juga mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Pengertian lainnya adalah partisipasi politik berupa kegiatan memengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak: langsung berarti dia melakukan sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, 143

<sup>40</sup> Rush, Michael & Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 128.

<sup>41</sup> Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Renika Cipta

Ramlan Surbakti<sup>42</sup> mengelompokkan partisipasi politik menjadi dua yaitu:

### 1. Partisipasi Aktif

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik. Yang termasuk pada partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan.

### 2. Partisipasi Pasif

Adalah kegiatan yang berorientasi pada proses *output*. Kegiatan yang termasuk pada partisipasi pasif adalah kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.<sup>43</sup>

Partisipasi politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara, tapi tidak semua warga negara berperan serta dalam proses politik. Menurut pendapat beberapa ahli beberapa faktor yang menyebabkan orang mau atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik antara lain:<sup>44</sup>

#### 1. Status sosial dan ekonomi

Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status

---

<sup>42</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 145

<sup>43</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 145.

<sup>44</sup> Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. 146-147.

ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik

## **2. Situasi**

Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

## **3. Afiliasi politik orang tua**

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik<sup>10</sup>.

## **4. Pengalaman organisasi**

Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpolakan dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama<sup>11</sup>. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Ibnu Kencana<sup>12</sup> partisipasi politik merupakan penentuan sikap

dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap pertanggung jawaban bersama baik dalam situasi politik yang melibatkan dukungan.

#### **5. Kesadaran politik**

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

#### **6. Kepercayaan terhadap pemerintah**

Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

#### **7. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal.**

Dari beberapa pendapat diatas, penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan variabel kesadaran politik dan variabel situasi yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, dalam pemilihan wali kota Padang tahun 2008.

## **BAB III**

# **KONSEPTUALISASI UMUM TENTANG PERILAKU POLITIK**

**B**ab ini mencoba mendiskusikan kerangka teoritis tentang perilaku politik. Ini penting sebagai sebuah upaya untuk mencoba memahami dan mendalami pengertian perilaku politik baik secara etimologi maupun terminologi serta bagaimana menurut pendapat para pemikir politik. Berikutnya dilanjutkan dengan pembahasan tentang model dan fungsi perilaku politik, serta membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang individu atau kelompok dalam menentukan sikap perilaku politiknya.

Selain itu, untuk mempermudah mendapatkan pola atau model bacaan dalam menganalisa perilaku politik itu sendiri dalam tataran empiris, disini penulis kemukakan dalam pembahasan sub bab terakhir ini terkait potret perilaku politik organisasi: melihat jejak langkah politik NW, Sehingga, melalui pembahasan dalam bab ini dapat memberikan pemahaman teoritis maupun tataran empiris tentang konseptualisasi umum perilaku politik itu sendiri.

## A. Kerangka Teori Perilaku Politik

Dalam analisa politik modern perilaku politik atau partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang.<sup>1</sup> Di Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang misalnya telah menjamin hak-hak politik terhadap warga negaranya melalui Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dan pasal 28.<sup>2</sup> Hal ini menegaskan bahwa hak politik yang diaktualisasikan dalam bentuk perilaku politik atau partisipasi politik merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara. Namun, sebelum membahas lebih dalam tentang perilaku politik dan komponennya, ada baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan perilaku politik.

Perilaku politik secara etimologis merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris yakni *political behaviour*, kata tersebut terdiri dari dua suku kata yakni kata *political* dan *behavior*, dalam kamus Oxford dijelaskan bahwa kata *political* berarti hal-hal yang menyangkut negara, warga negara, pemerintahan dan kebijakan.<sup>3</sup> Sedangkan arti kata dari

---

<sup>1</sup>Lihat Sa'd Ibrahim Jum'ah, *As-Syabab Wa Al-Musyarakah As-Siyasiyah* (Kairo: Dar Ats-Tsaqafah Li' An-Nasyr wa At-Tauzi, 1984), 32.

<sup>2</sup>Lihat Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat; Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 88-89.

<sup>3</sup>Lihat dalam *The Oxford English Dictionary* (London: Oxford University Press, 1993), Volume 1, cet. I, 772.

*behaviour* adalah cara seseorang dalam melakukan hubungan dengan pihak luar.<sup>4</sup>

Sedangkan jika ditelusuri dalam pengertian bahasa Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap tidak saja ucapan akan tetapi gerak tubuh atau badan, sedangkan politik adalah segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara dan negara lain.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perilaku politik adalah suatu bentuk keikutsertaan warga negara dengan cara yang terorganisir dalam membuat keputusan-keputusan politik, dengan keikutsertaan yang sukarela dan atas kemauan sendiri, didasari atas rasa tanggung jawab terhadap tujuan-tujuan sosial secara umum, dan dalam koridor kebebasan berfikir, bertindak, dan kebebasan mengemukakan pendapat.<sup>6</sup>

Adapun pada tataran terminologis, perilaku politik adalah kegiatan antara pemerintah dengan masyarakat ataupun sebaliknya yang memiliki unsur pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik, misalnya seperti yang

---

<sup>4</sup> Lihat dalam *The Oxford English Dictionary*, Volume VII, cet. I, 1074.

<sup>5</sup> Lihat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. 1, 671 dan 694.

<sup>6</sup> Lihat Sa'd Ibrahim Jum'ah, *As-Syabab Wa Al-Musyarakah As-Siyasiyah*, 32.

dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yang mengatakan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat, diantara lembaga-lembaga pemerintah, dan diantara kelompok individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.<sup>7</sup>

Secara lebih rinci, Gabriel Almond berpendapat bahwa partisipasi politik atau perilaku politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, menurutnya perilaku politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator politik.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perilaku politik menurut Almond terbagi ke dalam tiga kategori yakni artikulasi kepentingan, penyatuan kepentingan dan artikulasi kepentingan lanjutan.

Sedangkan Gaventa dan Valderma menyatakan, bahwa partisipasi politik melibatkan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik, dengan negara. Karena itu menurutnya, perilaku politik seringkali dihubungkan dengan demokrasi politik, perwakilan, dan perilaku politik tak langsung. Lebih lanjut ia mengatakan perilaku politik diungkapkan dalam tindakan individu atau kelompok terorganisasi untuk melakukan pemungutan suara, kampanye,

---

<sup>7</sup>Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999) 15.

<sup>8</sup>Lihat Gabriel Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach* (Boston: Little Brown and Company, 1966), 114.

protes, untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah.<sup>9</sup> Dengan demikian, Gaventa dan Valderma lebih melihat perilaku politik sebagai orientasi untuk mempengaruhi dan mendudukkan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dan langsung dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

Pendapat Gaventa dan Valderma di atas senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Anthony Downs, yang menyatakan bahwa perilaku politik adalah sikap atau koalisi organisasi yang terdiri dari individu-individu dalam sebuah negara, untuk mempengaruhi keputusan pemerintah melalui pemilihan anggota konstitusi dan kepala pemerintahan.<sup>10</sup> Jadi, pendapat Anthony ini memiliki substansi dan tujuan yang sama dengan pendapat Gaventa dan Valderma di atas, yakni sama-sama melihat perilaku politik sebagai sebuah upaya untuk mempengaruhi dan mendudukkan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

Selain itu, Huntington dan Nelson memberikan definisi bahwa perilaku politik adalah merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi atau perilaku politiknya bisa bersifat individual atau

---

<sup>9</sup>Lihat dalam John Gaventa dan Camilo Valderma, *Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21* (The British Council New Economics Foundation, 2001), 137.

<sup>10</sup>Lihat pendapat ini dalam bukunya Robert J. Huckshorn, *Political Parties in America Second Edition* (California: Cole Publishing Company, 1980), 9.

kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.<sup>11</sup>

Dari pengertian tersebut, Huntington dan Nelson memberi batasan perilaku politik pada beberapa hal diantaranya: Pertama, perilaku atau partisipasi politik lebih menyangkut kegiatan-kegiatan bukan sikap-sikap. Kedua, subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara atau lebih tepatnya orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional dalam bidang politik, seperti pejabat pemerintah dan partai. Ketiga, kegiatan yang menyangkut partisipasi dan perilaku politik hanyalah kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan mengubah dalam pengambilan keputusan pemerintah yang ditujukan kepada para pejabat negara, baik secara legal atau tidak, berhasil atau gagal. Keempat, partisipasi dan perilaku politik mencakup partisipasi otonom atas dasar kemauan sendiri dan partisipasi yang dimobilisasi karena keinginan dan digerakkan orang lain.<sup>12</sup>

Demikianlah batasan perilaku politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson. Sedangkan definisi dan batasan yang lebih luas mengenai perilaku politik dikemukakan oleh Miriam Budiarto. Ia memandang perilaku politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya dalam pemilihan pemimpin

---

<sup>11</sup>Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 4.

<sup>12</sup> Lihat Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 177-178.

negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Perilaku politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying*<sup>13</sup> dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Batasan yang dikemukakan oleh Miriam Budiarmo tersebut tidak memperlihatkan batasan yang begitu ketat, sehingga memungkinkan untuk memberikan cakupan partisipasi yang lebih luas dari pada yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson. Demikian pula mengenai subjek yang berpartisipasi (partisipasi) tidak dibatasi hanya pada warga negara biasa. Tapi walaupun memiliki perbedaan titik tekan dalam mendefinisikan perilaku politik, namun tetap memiliki substansi yang sama yakni perilaku politik merupakan tindakan sadar yang dilakukan oleh warga negara terhadap pemerintah atau sebaliknya, dalam membuat, melaksanakan, dan membuat keputusan politik dalam bentuk ikut pemilihan umum, ikut serta dalam partai politik dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> Lobbying merupakan bentuk perilaku politik yang mencakup usaha individu atau kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat menguntungkan pihaknya. Lihat B.N. Marbun, *Kamus Politik, Edisi Baru* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 321.

<sup>14</sup> Lihat Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

Selain perspektif behavioral di atas, perspektif lain yang dapat digunakan dalam melihat perilaku politik individu, kelompok, maupun organisasi, adalah: Pertama, persepektif teori struktural fungsional. Pada dasarnya perspektif ini melihat bahwa perilaku manusia dibentuk oleh fakta sosial, yakni sebagaimana yang dimaksudkan oleh Durkheim, bahwa fakta sosial berisikan norma-norma dan aturan yang sifatnya memaksa dan berada di luar individu, sehingga individu dikendalikan oleh fakta sosial dalam lingkungannya.<sup>15</sup> Dalam hubungannya dengan perilaku politik, pandangan demikian memberikan pemahaman bahwa perilaku politik merupakan suatu aspek perilaku sosial yang ditentukan oleh norma-norma dan aturan maupun melalui hubungan hubungan kekuasaan secara vertikal.

Pandangan struktural fungsional tersebut di atas, berupaya menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik tidak didasarkan atas kesadaran politik sebagai implementasi dari swadaya politik, melainkan lebih pada dominasi mobilisasi massa secara kolektif. Dengan prinsip kolektivisme, maka organisasi masyarakat mengikat individu sebagai suatu fakta sosial dalam melakukan partisipasinya. Apalagi jika melihat bahwa semua kelompok sosial atau organisasi memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, dan dengan partisipasi politik legal seperti voting mereka dapat dibenarkan dalam meraih

---

<sup>15</sup>Lihat Paul Doyle Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), 236

keinginannya.<sup>16</sup> Selain itu, pengaruh elit penguasa (*the rulling elit*) sebagai tuan (*patron*) dan hamba (*client*) merupakan strategi kekuatan dalam memobilisasi massa.<sup>17</sup>

Kedua, perspektif yang dapat digunakan dalam melihat perilaku politik individu, kelompok, maupun organisasi adalah perspektif teori tindakan sosial. Perspektif ini melihat perilaku politik sebagai tindakan sosial yang merupakan sesuatu proses dimana aktor (pelaku) terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih. Tindakan itu meliputi setiap jenis perilaku manusia, yang dengan penuh arti diorientasikan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan di waktu akan datang. Menurut Weber bahwa tindakan sosial (*social action*) adalah tindakan yang memiliki makna subjektif (*a subjective meaning*) bagi dan dari aktor pelakunya.<sup>18</sup>

Secara lebih luas tindakan sosial adalah seluruh perilaku manusia yang memiliki arti subjektif dari yang melakukannya, baik yang terbuka maupun yang tertutup, yang diutarakan secara lahir maupun secara diam-diam, yang oleh pelakunya

---

<sup>16</sup>Lihat Roy C. Marcridis dan Bernard E. Brown, *Comparative Politic Sixth Edition*, diterjemah dengan judul *Perbandingan Politik Edisi Keenam*, terj. Henry Sitanggang (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996), 282.

<sup>17</sup>Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam bukunya Lihat Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat; Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Polik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 104.

<sup>18</sup>Lihat Paul Doyle Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, 239.

diarahkan kepada tujuannya. Sehingga, tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang kebetulan, tetapi yang terstruktur atau memiliki pola tertentu dan makna-makna tertentu.<sup>19</sup>

Weber secara khusus mengklasifikasi tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe. Pertama, *instrumentally rational*, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan-harapan yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam kehidupan manusia. Kedua, *value rational*, yaitu tindakan yang didasari oleh kesadaran keyakinan mengenai nilai-nilai yang penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lain yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Ketiga, *affectual (especially emotional)*, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan aktor yang melakukannya. Keempat, *traditional*, yaitu tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang telah mendarah daging.<sup>20</sup>

Dengan itu, Weber berusaha menempatkan individu sebagai makhluk kreatif yang bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan yang hendak dicapainya. Ia bebas sebagai individu yang dapat menentukan sikapnya terhadap alam dan masyarakatnya. Ia dapat bertindak sesuai dengan harapan-harapan orang lain, tetapi ia juga dapat melawan harapan-harapan orang lain, termasuk juga individu dalam sebuah organisasi, kelompok dan lembaga, yang membuat berbagai keputusan. Karenanya

---

<sup>19</sup>Lihat Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer; Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008), 89.

<sup>20</sup>Lihat Paul Doyle Jhonson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*, 241.

individu bukanlah subjek pasif yang semata-mata bereaksi terhadap nilai-nilai di luarnya dan kondisi-kondisi struktural yang melingkupinya, akan tetapi juga melakukan perubahan pada kondisi struktural. Karena itu, dalam memahami segi kehidupan politik diperlukan dan penting untuk memberikan perhatian khusus pada nilai-nilai, motivasi-motivasi, dan persepsi individual dari aktor-aktor itu.

Kepentingan sebagai tujuan yang dikejar oleh aktor merupakan faktor yang penting dalam perilaku politik, individu maupun kelompok, yang selalu melekat dalam proses politik. Kepentingan merupakan kekuatan pendorong yang utama bagi manusia dan seperti tindakan manusia didasarkan atas pemilikan kepentingan.

Dengan demikian, menurut Martin, perilaku politik dalam perspektif tindakan sosial adalah tindakan individual dan kelompok yang dalam melakukan tindakan-tindakan politik memiliki keterkaitan dengan kesadaran dan tujuan politik dari aktor yang memainkannya. Bahkan tingkah laku politik merupakan hasil dari pertemuan faktor-faktor struktur keberibadian, keyakinan politik, tindakan politik individu, dan struktur, serta proses politik menyeluruh. Kesadaran yang dimaksud di sini adalah sebuah landasan ideologi yang tertuang dalam visi-misi dari sebuah partai politik untuk diperjuangkan melalui taktik dan strategi tertentu.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Pendapat Martin di atas dapat dilihat dalam bukunya Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer; Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, 93.

Lebih khusus Avery Leiserson, mengemukakan bahwa perilaku politik itu sendiri baik secara individu maupun kelompok pada dasarnya merupakan aksi dan reaksi dari sebuah suasana politik tertentu, sehingga dalam hal ini terdapat dua persepektif mengenai signifikansi tingkat perilaku tersebut. Pertama, individualisme, yakni pandangan bahwa kelompok tidak lain hanya terdiri atas anggota-anggota kelompoknya, misalnya perilaku lembaga peradilan merupakan perilaku sejumlah individu yang kebetulan menjadi anggota lembaga tersebut. Tidak ada sifat-sifat kelompok yang diturunkan dari sifat individu, dan begitu sebaliknya. Cara pandang ini digunakan oleh kaum behavioralis. Kedua, holisme, yakni pandangan tentang timbulnya sifat kelompok yang diturunkan, dalam hubungan ini diakui bahwa kelompok pada dasarnya merupakan serangkaian bagian-bagiannya, dan cara pandang ini digunakan oleh kaum tradisionalis.<sup>22</sup>

Dengan demikian, maka pendekatan perilaku politik kemudian, dipakai untuk melihat kegiatan dan dinamika yang terjadi dalam lingkup kelembagaan negara. Selain itu, perilaku politik juga dirancang sebagai suatu pendekatan ilmu politik yang menekankan pada perilaku individual sebagai objek utama analisis, dan juga lebih memusatkan perhatian pada perilaku kelompok, tetapi dengan asumsi bahwa kelompok tersebut adalah interaksi kolektif yang terjadi antar individu. Kemudian yang termasuk ke dalam kategori perilaku politik sebagaimana umumnya yang sering terjadi menurut oleh Gabriel Almond,

---

<sup>22</sup>Lihat Avery Leiserson, *Parties and Politics An Institutional and Behavioral Approach* (New York: Alfred A Knopf, 1958), 280-281.

adalah respon-respon internal atau yang sudah umum terjadi meliputi, aktivitas pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, *lobbying*, protes, dan bergabung dalam kelompok kepentingan.<sup>23</sup> Munculnya respon-respon internal dengan berbagai macam di atas, menurut Huntington kadang disebabkan karena tidak terdistribusinya kekuasaan dengan adil dan merata. Sehingga mengakibatkan munculnya protes, oleh kelompok penekan dan organisasi oposisi.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perilaku politik merupakan sebuah pendekatan politik atau persepektif politik yang dikembangkan dan digunakan untuk melihat—dengan lebih mengkonsentrasikan pada—perilaku seseorang dari pada lembaga politik. Artinya perilaku politik lebih menekankan pada aspek pola tingkah laku yang dilakukan individu dan kelompok dalam mengartikulasikan kepentingannya.

Selain itu, dalam konteks masyarakat yang majemuk atau heterogen seperti Indonesia, perilaku politik masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh adanya produksi faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologi, sejarah, politik, budaya, agama, maupun peta geopolitik dimana individu atau kelompok dalam suatu masyarakat tersebut berada.

---

<sup>23</sup>Lihat penjelasan ini dalam bukunya Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Persepektifnya* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), 207.

<sup>24</sup>Lihat Samuel P. Huntington, *Tertib Politik di Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Buku Kesatu*, terj. Suryatim (Jakarta: Rajawali Press, 1983), 216.

Untuk memperdalam kajian semacam itu, setidaknya terdapat juga tiga pendekatan yang selama ini menjadi basis utama dalam membaca perilaku pemilih tersebut yaitu:

***Pertama, Pendekatkan Sosiologis.*** Pendekatan sosiologis disebut juga model perilaku memilih Mazhab Columbia (*The Columbia School of Electoral Behaviour*), yang dipelopori oleh Lezarsfeild pada tahun 1940. Asumsi dasar dari pendekatan ini, bahwa karakteristik sosiologis dan pengelompokan sosial seperti umur, jenis kelamin, agama, kelas, status sosial, latar belakang keluarga akan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku memilih. Dimana dalam pengelompokan sosial memiliki andil yang besar dalam membentuk, sikap, persepsi dan orientasi individu.<sup>25</sup>

Dengan kata lain pendekatan ini mencoba memahami pengaruh proses yang terjadi di sisi luar individu seseorang (pemilih) terhadap sikap preferensi politiknya. Senada dengan hal tersebut, kaum sosiologis ini mengatakan bahwa keberadaan faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi, etnis, tradisional keluarga, keanggotaan terhadap yang lain, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal merupakan berbagai hal yang turut mempengaruhi perilaku memilih.

Menurut Roth, model sosiologis ini dapat memberi penjelasan yang sangat baik pada perilaku memilih yang konstan. Hal ini disebabkan kerangka struktural masing-masing

---

<sup>25</sup> Haryanto, *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17 No. 3, Maret 2014, 292.

individu yang hanya berubah secara perlahan. Namun, model sosiologis tidak dapat menjelaskan mengenai penyebab pindahnya pilihan politik individu. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa basis analisis utama dari model ini adalah kondisi sosial, bukan menjadikan individu sebagai pusat analisis. Adapun instrumen yang menjadi basis analisis sosiologis yakni agama, etnis, pendidikan, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, gender, umur dsb.<sup>26</sup> Begitu halnya dengan geopolitik (kedaerahan), juga merupakan basis analisa perilaku politik dalam model sosiologis.

***Kedua, Pendekatan Psikologis.*** Pendekatan ini dikembangkan dan berkembang pesat pada sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat melalui *Survey Research Centre Michigan University*, dan dipelopori oleh August Campbell. Sehingga pendekatan ini disebut juga sebagai Mazhab Michigan.

Berbeda dengan model sosiologis, dalam model psikologis, dengan adanya keterikatan atau dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang yang disebabkan oleh adanya perasaan kedekatan dengan partai atau kandidat tertentu, kemudian sangat berpengaruh terhadap pilihan dalam setiap pemilu. Secara sederhana menurut Roth, pendekatan psikologis berusaha untuk menerangkan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keputusan pemilu melalui *trias determinan*: identifikasi partai (Party ID), orientasi kandidat dan orientasi isu. Penggambaran ini dapat dilihat dari penjelasan Dalton

---

<sup>26</sup> Haryanto, *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*, 293.

bahwa proses perilaku memilih model psikologis seperti sebuah saringan dalam corong kausalitas (*funnel causality*).<sup>27</sup>

Selain itu, model pendekatan psikologis ini berusaha mencoba untuk menjawab kelemahan model pendekatan sosiologis yang sulit mengukur secara tepat indikator kelas sosial, tingkat pendidikan dan agama. Sehingga pendekatan ini mencoba menjelaskan aspek psikologis seseorang yang memberikan pengaruh kepadanya didalam menentukan pilihan politik seseorang. Menurut pendekatan ini, ada tiga hal yang sangat mempengaruhi perilaku memilih, yaitu (1) informasi politik yang diperoleh terkait dengan informasi kepentingan umum maupun kegiatan politik (seperti kampanye atau berita politik yang ada di media massa), (2) ketertarikan terhadap politik, dan (3) identitas partai atau *Party ID* yang terkait dengan perasaan dekat, sikap mendukung/setia atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu.

Model ini menjelaskan keputusan suara individu didasarkan dalam tiga sikap: *partisanship* (keberpihakan), pendapat terhadap isu, dan citra kandidat. Keyakinan inilah yang paling dekat pada keputusan suara dan karena itu memiliki dampak langsung dan sangat kuat terhadap perilaku memilih.<sup>28</sup> *Partisanship* sebagai salah satu konsep dalam pendekatan psikologis adalah kedekatan psikologis yang merupakan

---

<sup>27</sup> Haryanto, *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*, 293-294.

<sup>28</sup> Dalton, R. J, *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*, (New York: Chatham House Publishers, 2002), 173.

hubungan yang stabil dan bertahan lama dengan partai politik. Situasi di mana individu memilih kelompok rujukan, walaupun mereka tidak menyatu didalamnya dan mulai bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai aturan kelompok tersebut. Identifikasi dengan partai disebut dengan istilah *party ID*, yakni perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya, bahwa ia mengidentikan diri sebagai orang partai tertentu, atau bahwa ia merasa dekat dengan partai politik tertentu.

Lebih jauh, pendekatan ini juga menempatkan pengaruh signifikan dari dalam diri pemilih yakni peta kognisi tentang realitas sosial politik (bagaimana pemilih memiliki gambaran mengenai dunia politik di sekitarnya). Peta kognisi ini meliputi: *pertama*, persepsi terhadap berbagai informasi mengenai apa yang diterima seseorang akan mempengaruhi sebagian besar apa yang ingin mereka terima. *Kedua*, konseptualisasi terhadap bagaimana seseorang mengambil sebuah sinyal politik, bagaimana mereka menentukan rasa terhadap apa yang mereka terima. Dengan kata lain bagaimana mereka mengkonsepsikan realitas politik yang berkembang dan terjadi dilingkungan terdekat. Aspek-aspek seperti perasaan, pengalaman dan interpretasi dari kejadian-kejadian politik tersebut kemudian secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang.

***Ketiga, Pendekatan Rationalitas Choice.*** *Rational choice* adalah sebuah pendekatan perilaku memilih yang merupakan kritik terhadap dua model pendekatan yang sudah ada yaitu pendekatan sosiologis dan psikologis. Ada kegelisahan ilmuwan

melihat perubahan perubahan perilaku memilih yang tidak bisa dijelaskan oleh dua pendekatan tersebut. Latar belakang teoritis untuk penjelasan pendekatan ini berangkat dari teori ekonomi.<sup>29</sup>

Model ini merupakan upaya untuk menjelaskan perilaku memilih yang berhubungan dengan parameter ekonomi-politik. Premisnya sederhana, jika asumsi pilihan rasional mampu menjelaskan pasar, maka hal ini juga dapat menjelaskan fungsi politik, atau dengan bahasa lain menggunakan logika-logika ekonomi tersebut juga berlaku sama dengan logika-logika politik dalam rasionalitas choice. Operasi model ini didasarkan bahwa semua keputusan yang telah dibuat oleh pemilih bersifat rasional, yakni dipandu oleh kepentingan diri sendiri dan diberlakukan sesuai dengan prinsip maksimalisasi manfaat.<sup>30</sup> Pilihan politik pemilih yang rasional senantiasa berorientasi kepada hasil yang dicapai oleh partai atau kandidat tertentu dalam politik, baik hasil yang dipersepsikan maupun yang diantisipasi.

Pendekatan ini menjelaskan sikap memilih masyarakat lebih didorong oleh kepentingan kepentingan riil mereka, terutama yang menyangkut kepentingan material dan kesejahteraan. Pendekatan ini melihat perilaku memilih didasarkan pada kalkulasi untung-rugi. Mana yang menguntungkan, mampu memenuhi kepentingannya dan memberikan kemanfaatan yang

---

<sup>29</sup> Haryanto, *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*, 294.

<sup>30</sup> Haryanto, *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*, 294.

besar kepada individu, tentu saja akan dipilih, sehingga dalam batas tertentu rasionalitas choice ini identik dengan sikap-sikap pragmatism dalam politik.

Oleh karena itu, pemilih akan berhati-hati dan menggunakan rasionalitasnya dalam memilih. Pendekatan ini berguna untuk mengetahui sejauh mana sikap masyarakat sudah mengarah pada sikap pilihan yang rasional. Wujud konkretnya misalnya adalah dengan melakukan kontrak politik terhadap kandidat. Atau dengan melihat apakah kinerja partai maupun anggota legislatif pada periode sebelumnya secara ekonomi menguntungkan dirinya dan menilai apakah kinerja partai atau anggota legislatif dalam lima tahun ke depan secara ekonomi akan menguntungkan dirinya.

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku politik tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat setempat dimana individu tersebut berada. Ia bukan berada di ruang hampa. Ia banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sehingga dalam memahami perilaku politik seseorang dapat digunakan beberapa pendekatan di atas. Meskipun perilaku politik akan mudah secara konkret dilihat pada perilaku memilih ketika pemilu, namun dalam memahami sikap pemilih tersebut tidak dapat dilihat dari satu kacamata saja. Ia harus dipahami dari berbagai sudut pandang karena perilaku memilih merupakan salah satu wujud perilaku politik individu yang terbentuk dari interaksi antar berbagai komponen seperti struktur sosial, politik, budaya, agama dan ekonomi yang mempengaruhi komunitas dimana individu tersebut berada.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, ketiga model tersebut tidak harus bertentangan. Sebaliknya, ketiganya mempunyai pengaruh relatif terhadap pilihan. Singkatnya, dalam studi perilaku politik atau perilaku memilih, sejatinya dilihat dalam pendekatan probabilistik bukan deterministik, karena semua faktor yang ada di dalamnya dapat berpengaruh. Jadi, yang dilihat pada sisi proporsionalitas faktor, seberapa besar faktor yang dominan dan mampu menjelaskan pilihan politik dengan lebih baik seperti apa adanya di lapangan.

## **B. Model dan Fungsi Perilaku Politik**

Sebagai unit analisis dalam melakukan kajian politik dengan menggunakan pendekatan perilaku politik, maka Gabriel Almond telah mencoba mengungkapkan secara garis besar model atau bentuk-bentuk perilaku politik yang pernah digunakan di berbagai negara. Dari berbagai bentuk yang sempat diinventarisir, kemudian diklasifikasikan dalam dua pola dan model yang umum sifatnya, yaitu pola *konvensional* sebagai suatu bentuk perilaku politik yang dianggap umum berlangsung dalam demokrasi modern, serta pola perilaku politik non-konvensional, yang merupakan kebalikan dari bentuk yang pertama.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Lihat dalam bukunya Gabriel Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach*, 259. Dan Penjelasan terkait pendapat ini dapat dilihat dalam bukunya Cheppy Harichayono, *Ilmu Politik dan Persepektifnya*, 207

Lebih lanjut Almond berpendapat bahwa, model partisipasi atau perilaku politik yang sudah dianggap sebagai bentuk normal atau yang sudah umum (*pola konvensional*) dalam demokrasi modern adalah meliputi aktivitas pemberian suara dalam pemilu (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye, lobbying dan bergabung dalam kelompok kepentingan.<sup>32</sup> Bentuk perilaku politik yang berupa voting boleh jadi merupakan suatu bentuk yang paling umum digunakan dari masa lampau sampai sekarang, baik dalam masyarakat tradisional maupun yang modern. Di samping itu, sistem voting atau pemberian suara ini boleh jadi merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling luas tersebar di berbagai masyarakat di dunia. Asumsi ini diperkuat oleh pendapat Norman dan Sidney Verba yang menyatakan bahwa pemungutan suara (*voting*) merupakan satu-satunya tindakan politik dimana sebagian besar rakyat berpartisipasi. Bahkan menurutnya tidak ada tindakan politik lainnya yang melibatkan dengan lebih dari sepertiga warganya di suatu negara selain pemungutan suara tersebut.<sup>33</sup>

Sedangkan model perilaku politik *non-konvensional* menurut Almond adalah: pengajuan petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan terhadap harta benda maupun manusia, dan perang gerilya ataupun revolusi.<sup>34</sup> Walaupun

---

<sup>32</sup>Ulasan pendapat di atas dapat dilihat penjelasannya dalam bukunya Cheppy Harichayono, *Ilmu Politik dan Persefektifnya*, 207.

<sup>33</sup>Lihat pendapat itu dalam Roy C. Marcrdis dan Bernard E. Brown, *Comparative Politic Sixth Edition*, 253-254.

<sup>34</sup>Lihat dalam bukunya Gabriel Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach*, 230.

sering diasumsikan bahwa yang termasuk dalam pola non-konvensional ini adalah semua bentuk perilaku politik yang bersifat ilegal atau tidak normal, tetapi ada juga bentuk perilaku politik yang semula memang diakui legal, seperti pengajuan petisi dan demonstrasi.

Pendapat Almond di atas, juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson yang mengklasifikasikan perilaku politik dalam empat bentuk. Menurutnya dari berbagai studi mengenai partisipasi politik menggunakan klasifikasi yang berbeda-beda. Akan tetapi, riset yang kebanyakan dilakukan sekarang membedakan jenis-jenis perilaku dalam empat jenis berikut.<sup>35</sup>

- a. Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.
- b. Lobbying yang mencakup upaya-upaya, baik perorangan maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil.
- c. Kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

---

<sup>35</sup> Lihat Samuel P. Huntington Dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 7-8.

- d. Mencari koneksi (*contacting*), yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat baik hanya seorang atau beberapa orang.

Namun dalam klasifikasi dan pandangan yang berbeda, yang melihat berdasarkan dari motivasi yang melatarbelakangi munculnya partisipasi politik, maka Huntington dan Nelson, membagi perilaku politik dalam dua kategori yakni. Pertama, partisipasi otonom, yaitu perilaku politik yang didorong oleh keinginan pelakunya sendiri untuk melakukan tindakan tersebut. Kedua, partisipasi mobilisasi, yaitu perilaku politik yang digerakkan atau diinginkan oleh orang lain, bukan karena kesadaran atau keinginan pelakunya sendiri.<sup>36</sup>

Pendapat umum tentang model perilaku politik yang diajukan oleh Almond dan Huntington di atas, umumnya sudah mencakup semua aspek dari bentuk perilaku politik. Sebagaimana hal itu juga memiliki persamaan dengan para ilmuwan lain yang mengungkapkan substansi yang sama dan memiliki titik tekan yang sama yakni semua bentuk perilaku politik itu merupakan aksi dan reaksi dari sebuah suasana politik tertentu.

Hal ini senada dan terbukti melalui pendapat yang dikemukakan oleh Utsman Abdul Mu'iz Ruslan seorang pemikir politik dari Mesir, yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk perilaku politik tidak hanya terbatas pada pemberian

---

<sup>36</sup> Samuel P. Huntington Dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, 11.

suara atau pencalonan dalam pemilu, akan tetapi juga memiliki bentuk yang lain. Diantaranya: Pertama, memahami berbagai persoalan politik dan sosial dengan cara mengikuti berita-berita politik melalui media massa, seminar, simposium, kongres, dan diskusi formasl dengan orang lain. Kedua, ikut serta dalam kampanye politik. Ketiga, ikut serta dalam berbagai aksi atau demonstrasi politik yang bertujuan untuk memberi pengaruh terhadap keputusan politik. Keempat, memberi kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan berupa perbaikan lingkungan atau pelayanan masyarakat dengan usaha sendiri. Kelima, bergabung dalam satu partai politik atau pressur group, baik secara aktif maupun biasa-biasa saja.<sup>37</sup>

Selain itu, pendapat lain yang mengemukakan bentuk perilaku politik selain model di atas adalah pendapat yang diungkapkan oleh Robert J. Huckshorn. Menurutnya terdapat lima bentuk perilaku politik jika dilihat secara lebih luas dalam sebuah negara jika dilihat dalam konteks pemilihan umum dari awal hingga akhir, diantaranya: Pertama, memilih kandidat calon pemimpin. Ia melihat ini sebagai sebuah proses awal yang penting yang harus dilewati oleh individu atau kelompok sebagai calon pemilih. Kedua, memilih pemimpin yang visioner dan memiliki karakter kuat. Ketiga, mengawasi dan mengontrol pemerintahan. Ini bisa berupa memberikana masukan melalui domonstrasi dan protes. Keempat, sosialisasi politik. Kelima,

---

<sup>37</sup>Lihat Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *At Tarbiyah As-Siyasiyah 'Inda Jama'ah Al-Ikhwān Al-Muslimin, Fi Al-Fatrah Min 1928 Ila 1954 FiMishr, Dirasah Tahliliyah Taqwimiyyah* (Dar At-Tauzi' Wa An-Nasyr Al-Islamiyyah, 1989), 103-104.

ikut konsen dalam mengontrol kebijakan pemerintah dalam pelaksanaannya.<sup>38</sup> Nampaknya pendapat Robert di atas berbeda dengan pendapat yang lain dalam melihat model perilaku politik, walaupun pada dasarnya sama. Robert nampaknya lebih melihat bentuk perilaku politik itu dalam persepektif pemilihan umum dan bersifat lebih teknis, artinya pendapat Robert itu didasarkan pada pengalaman pemilu secara empiris.

Terdapat pendapat lain yang melihat bentuk perilaku politik jika dilihat dari jumlah pelakunya. Pendapat ini dikemukakan oleh Komarudin Sahid yang menyatakan ada dua bentuk yakni: Pertama, partisipasi individual, merupakan partisipasi yang dilakukan oleh orang perorangan secara individual, misalnya menulis surat resmi yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Kedua, partisipasi kolektif, yakni kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa.<sup>39</sup>

Tapi jika dilihat dalam persepektif karakter pemilih atau budaya politik, maka terdapat tiga tipe karakter pemilih sebagaimana yang diungkapkan oleh Gabriel Almond, yaitu: Pertama, partisipasi politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politik yang sangat rendah, yang disebabkan oleh faktor kognitif. Misalnya tingkat pendidikan yang relatif rendah. Kedua, partisipan politik kuala (*subject political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif

---

<sup>38</sup>Lihat lebih lanjut penjelasan di atas dalam Robert J. Huckshorn, *Political Parties in America Second Edition*, 21-24.

<sup>39</sup> Lihat Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, 182-183.

maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Ketiga, budaya politik partisipan (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.<sup>40</sup>

Pandangan Gabriel Almond di atas diperkuat oleh pendapat Charles Andrian dan James Smith, yang mengelompokkan tiga bentuk partisipasi politik, yaitu: pertama, partisipasi yang lebih pasif. Dalam hal ini partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana orang itu melihat politik sebagai suatu yang penting, memiliki minat terhadap politik. Kedua, partisipasi yang lebih aktif. Yang menjadi perhatiannya adalah sejauh mana orang itu terlibat di dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela. Ketiga, partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi.<sup>41</sup>

Sedangkan di sisi lain, sebagai suatu tindakan dan perilaku, baik secara individu maupun kelompok, perilaku politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi perilaku politik atau partisipasi politik bagi individu-individu. Diantaranya adalah.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Lihat Gabriel Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture* (Sidney: Princeton, 1963), 255.

<sup>41</sup>Lihat Charles Andrian dan James Smith, *Political Democracy, Trust, and Social Justice: A Comparative Overview* (Boston: Northeastern University Press, 2006), 67.

<sup>42</sup>Lihat dalam Robert Lane, *Political Life: Why People Get Involved in Politics* (Illionis: Glonce, 1959), 102 dan 114.

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Pendapat lain yang mengemukakan tentang fungsi dari perilaku politik adalah Arbi Sanit yang memandang ada tiga fungsi perilaku politik, yakni:<sup>43</sup>

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk mewujudkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, hura-hura, dan kudeta.

Selain itu, menurut Komarudin Sahid, Perilaku atau partisipasi politik juga memiliki fungsi bagi kepentingan pemerintah. Untuk kepentingan pemerintah, maka partisipasi politik memiliki fungsi berikut ini:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Lihat Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat; Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, 95.

<sup>44</sup> Lihat Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, 184.

1. Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintahan.
2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
3. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Politik**

Perilaku politik atau partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terdapat banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik; ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Berbagai pendapat tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini. Menurut Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, diantaranya adalah: pertama, keyakinan agama yang diimani oleh individu. Sebagai contoh Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, mengkritik dan mengawasi penguasa. Kedua, jenis kultur politik, atau bentuk nilai dan keyakinan tentang kegiatan politik yang mempengaruhinya. Ketiga, karakter lingkungan politik, artinya lingkungan tempat tinggal seseorang

dapat memberikan pengaruh terhadap kepedulian politik individu atau kelompok.<sup>45</sup>

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi perilaku politik yang datang dari dalam diri seseorang atau kelompok itu sendiri, diantaranya adalah: Pertama, tingkat partisipasi dan keaktifan seseorang dalam aktivitas politik. maksudnya motivasi seseorang dalam berpolitik sangat berpengaruh terhadap perilaku politik. Kedua, tingkat kemampuan dan kecakapan seseorang dalam politik. Misalnya kemampuan untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Ketiga, keyakinan individu akan kemampuannya dalam mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah merupakan dorongan psikologis untuk berpartisipasi.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Frank Lindenfeld, faktor utama yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan aktivitas politik adalah keputusan finansial. Dalam studinya, ia menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa tereliminasi dari kehidupan politik, dan orang yang bersangkutanpun akan menjadi apatis. Menurutnya, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki

---

<sup>45</sup> Lihat Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *At Tarbiyah As-Siyasiyah 'Inda Jama'ah Al-Ikhwān Al-Muslimin, Fi Al-Fatrah Min 1928 Ila 1954 Fi Mishr, Dirasah Tahliliyah Taqwimiyyah*, 101-102.

<sup>46</sup> Lihat Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *At Tarbiyah As-Siyasiyah 'Inda Jama'ah Al-Ikhwān Al-Muslimin, Fi Al-Fatrah Min 1928 Ila 1954 Fi Mishr, Dirasah Tahliliyah Taqwimiyyah*, 102-103.

kemampuan ekonomi.<sup>47</sup> Pendapat ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh S.M. Lipset yang menemukan bahwa tingkat sosio-ekonomi sangat mempengaruhi tingkah laku politik, terutama pada kegiatan pemilihan umum.<sup>48</sup> Pendapat ini juga diperkuat kembali oleh Arnold Steinberg, yang mengungkapkan bahwa tingkat ekonomi dan kesejahteraan seorang individu atau kelompok sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat aktivitas atau perilaku politik. Individu atau kelompok yang berkecukupan atau mapan biasanya lebih cenderung peduli atau banyak terlibat dalam aktifitas politik walaupun kadang ini bersifat relatif.<sup>49</sup>

Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi atau perilaku politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial dan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasi

---

<sup>47</sup> Lihat Frank Lindenfeld, *Economic Interest and Political Involvement*, *Public Opinion Quarterly* No. 28, 1964., 104-111.

<sup>48</sup> Lihat Seymour M. Lipset, *Political Man* (New York: Garden City, 1960), 184-185.

<sup>49</sup> Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam bukunya Arnold Steinberg, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, (Jakarta: Penerbit PT. Intermassa, 1981), 28-29.

terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.<sup>50</sup>

Namun secara lebih rinci ia menyebut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat individu atau kelompok adalah: Pertama, lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem kebudayaan dan media massa. Kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian masyarakat, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan atau komunitas. Ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi geografis, yaitu keadaan yang mempengaruhi masyarakat secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan intervensi serta intimidasi dari penguasa.<sup>51</sup>

Jadi, perilaku politik suatu individu atau kelompok juga bisa dipengaruhi oleh adanya unsur-unsur kekuasaan. Seorang pemimpin sebagai pemilik kekuasaan bisa dengan mudah dapat mempengaruhi, bahkan mengintervensi dan menggiring opini pemilih, menjadi pengikutnya dan bahkan memilihnya dalam pemilihan.

Adapun dalam pandangan lain Weimar menyebutkan paling tidak ada lima faktor berikut yang mempengaruhi partisipasi politik. Pertama, modernisasi di segala bidang berimplikasi pada

---

<sup>50</sup> Lihat Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 17.

<sup>51</sup> Lihat Ramlah Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 132-133.

komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, meluasnya peran media massa, dan peningkatan tingkat pendidikan. Kemajuan ini berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Kedua, terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Ketiga, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Keempat, adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Kelima, adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.<sup>52</sup>

Sedangkan Milbath memberikan empat alasan bervariasinya perilaku politik seseorang yang sekaligus menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Alasan Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Orang yang berwatak sosial dan punya kepedulian besar terhadap problem masyarakat biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik. Ketiga, faktor karakter sosial seseorang yang menyangkut status sosial ekonominya ikut mempengaruhi perilaku politiknya. Keempat, perbedaan keadaan geografis dan lingkungan. Keadaan lingkungan yang kondusif membuat orang dengan senang hati dan kompetitif dalam berpartisipasi politik.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Pendapat di atas dijelaskan dalam bukunya Sudjono Sastroatmojo, *Profil Budaya Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 72.

<sup>53</sup>Penjelasan dan pendapat di atas dapat dilihat dalam bukunya Toto Pribadi, dkk. *Sistem Politik Indonesia*, cet. 2 (Jakarta; Penerbit Universitas Terbuka, 2007), 3.6.

Pendapat Milbath di atas senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Avery yang menyatakan bahwa institusi atau lingkungan sekitar seperti ideologi, budaya, dan tradisi dapat mempengaruhi perilaku politik seseorang atau kelompok.<sup>54</sup>

Adapun dalam konteks Indonesia, Arbi Sanit menyebut lima faktor yang mendorong perilaku politik masyarakat Indonesia. Pertama, adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk bidang politik. Kedua, adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka. Ketiga, adanya keleluasaan untuk mengorganisir diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur. Keempat, adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat. Kelima, adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu pertimbangan kekuatan.<sup>55</sup>

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba, faktor lain yang juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi atau perilaku politik masyarakat adalah budaya kewargaan (*civic culture*). Bahkan, faktor ini merupakan sesuatu yang menjadi titik inti tumbuhnya perilaku politik warga. Budaya kewargaan (*civic culture*) pada haikatnya merupakan cermin dari tumbuh dan

---

<sup>54</sup> Lihat Avery Leiserson, *Parties and Politics An Institutional and Behavioral Approach*, 281.

<sup>55</sup>Lihat Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat; Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Polik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, 96-97.

berkembangnya nilai-nilai demokratis dalam masyarakat yang baik (*good citizen*).<sup>56</sup>

Selain pendapat-pendapat di atas, hal lain yang banyak mempengaruhi perilaku politik adalah faktor eksternal dari individu atau kelompok masyarakat itu sendiri. Atau dalam bahasa lain seseorang atau kelompok masyarakat tidak bisa dilepaskan dari konteks maupun variable-variabel lain yang ada disekitarnya, karena konteks dan variable-variabel tersebut memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan satu sama lain.

Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, masing-masing orang, lembaga, dan lain sebagainya memiliki peran dan fungsi yang berbeda saling memiliki keberkaitan satu sama lain dan tetap dalam sebuah sirkulasi kehidupan. Dengan demikian, faktor eksternal sedikit tidak berperan serta dalam mempengaruhi seseorang untuk menentukan perilaku politiknya, dan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik tersebut secara lebih rinci adalah:

Pertama, lingkungan sosial politik tidak langsung, yang termasuk dalam kategori ini adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. Khusus untuk media massa menurut Arnold Steinberg memberikan pengaruh yang begitu besar dalam mempengaruhi perilaku politik seorang. Menurutnya dengan peredaran media baik cetak maupun elektronik yang tidak terbatas dapat memberikan banyak informasi dan pengetahuan politik, sehingga dengan hal itu maka timbul kepedulian dan kepekaan terkait isu-isu politik

---

<sup>56</sup>Gabriel Almond and Sidney Verba, *The Civic Culture*, 250.

yang kemudian pada saatnya membentuk perilaku politik individu dan kelompok.<sup>57</sup> Kedua, lingkungan sosial politik langsung, berupa keluarga, agama, sekolah, dan lembaga-lembaga lain yang menjadi media dalam pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung ini seseorang mengalami sosialisasi, transformasi dan internalisasi nilai, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya.

Sedangkan menurut Hendrik yang menyimpulkan berdasarkan pendapat para ahli politik, ia berpendapat bahwa terdapat tujuh faktor yang dapat mempengaruhi perilaku politik seorang individu atau kelompok, diantaranya:<sup>58</sup>

Pertama, status sosial dan ekonomi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik. Kedua, situasi. Pendapat ini berdasarkan pendapat Ramlan Surbakti, yang mengatakan bahwa situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara

---

<sup>57</sup>Lihat dalam Arnold Steinberg, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, 65-66.

<sup>58</sup>Pendapat ini dapat dilihat dalam artikelnya Doni Hendrik, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*, *Jurnal DEMOKRASI* Vol. IX No. 2 Th. 2010, 141-142.

langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

Ketiga, afiliasi politik orang tua. Ini artinya perilaku politik seorang individu seringkali juga mengikuti afiliasi politik orang tuanya atau seniornya dalam sebuah organisasi. Keempat, pengalaman berorganisasi. Orang yang memiliki pengalaman organisasi biasanya memiliki minat dan perhatian yang tinggi terhadap politik, dikarenakan dia mengerti dan memahami konsep tentang politik.

Kelima, kesadaran politik. Ini artinya ia menyadari bahwa politik merupakan sebuah wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dengan demikian ia terdorong untuk ikut sebisa mungkin dapat berperan aktif dalam politik. Keenam, kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan. Ketujuh, Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal.

Dengan demikian, berdasarkan bahasan dan kerangka pemikiran tersebut, dapat dikatakan bahwa perilaku politik merupakan realitas sosial politik yang tidak bisa lepas dari pengaruh internal dan eksternal dari individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi yang bersangkutan. Secara internal perilaku politik merupakan tindakan yang didasarkan atas rasionalisasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Sedangkan secara eksternal perilaku politik merupakan

hasil dari proses sosialisasi dan interaksi atas nilai-nilai dari lingkungannya, atau yang lazim disebut oleh kaum behavioralis sebagai faktor stimulan.

Oleh karena itu, perilaku politik dipandang memiliki tujuan, atas adanya berbagai stimulus sebagai bentuk respon dari kondisi sosial-politik dari individu, kelompok, ataupun organisasi dan lembaga sebagai aktor yang berpartisipasi atau berperilaku politik. Dengan demikian, apa yang telah dipaparkan oleh para pakar dan pemikir politik di atas, sangatlah membantu dalam memberikan panduan dan langkah-langkah yang harus dipahami dalam menganalisa atau meneliti tentang perilaku politik.

#### **D. Potret Perilaku Politik Organisasi: Melihat Jejak Langkah Politik NW**

Sebagai langkah untuk mempermudah dalam memahami dinamika perilaku politik ditataran empiris terutama dalam melihat prototype perilaku politik kelompok atau organisasi, pada sub bab pembahasan dibawah ini kemudian penulis berusaha mengeksplorasi secara general jejak langkah politik NW yang dikenal merupakan ormas keagamaan terbesar di NTB. Kenapa NW bukan juga ormas keagamaan yang lain, karena NW sendiri dalam dua dekade terakhir cukup dominan menguasai birokrasi pemerintahan di NTB khususnya di Lombok. Ini disebabkan karena sejak kepala daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota dipilih langsung oleh rakyat dalam setiap Pilkada, calon yang diusung oleh NW

biasanya keluar sebagai pemenang. Fenomena ini kemudian menarik untuk coba dipotret dalam melihat jejak langkahnya, apalagi jika menapak tilas sejarah perilaku politik NW itu sendiri sejak awal didirikannya, kita akan melihat banyak dinamika yang cukup dinamis yang dilalui dalam mewarnai perjalanan politik NW itu sendiri.

Maka dalam mengawali bacaan potret perjalanan afiliasi politik NW tersebut, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari peran TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid selaku pendiri NW pada waktu itu. Hal ini disebabkan karena perannya yang begitu sentral dan dihormati di tubuh NW, sehingga dapat dikatakan semasa dia masih hidup persis perjalanan dan ketetapan-ketetapan penting yang diambil oleh NW pada masa itu tidak bisa lepas dari tokoh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Atas dasar itu, dalam melihat jejak perjalanan politik NW secara otomatis akan mulai dilihat dari perjalanan karir politik TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid.

Sejarah NW mencatat, bahwa karir politik TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dimulai sejak ia bersedia diangkat sebagai konsulat Nahdlatul Ulama (NU) Sunda Kecil pada tahun 1950.<sup>59</sup> Pada saat itu, organisasi NW dan NU memiliki kesamaan dalam pemahaman keagamaan dan bertemu secara historis pada diri TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Sehingga dalam perjalanannya ketika NU bersama ormas-ormas Islam lainnya bergabung dengan Partai Majelis Syura Muslimin

---

<sup>59</sup> Lihat Khirjan Nahdi, *Nahdlatul Wathan dan Peran Modal: Studi Etnografi-Historis Modal Spiritual dan Sosiokultural* (Yogyakarta: Insyira, 2012), 140.

Indonesia (Masyumi)<sup>60</sup> di tingkat nasional, dengan cepat Masyumi di NTB pun terbentuk, maka dia diangkat sebagai Ketua Badan Penasehat Paratai Masyumi untuk daerah Lombok pada tahun 1952.<sup>61</sup> Sikap politik yang diambil pada waktu itu merupakan sikap peribadinya sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dan disegani di pulau Lombok, akan tetapi hal ini sulit dilihat sebagai sikap peribadinya, karena ketika dia memutuskan untuk memasuki salah satu partai politik pada waktu itu, maka secara otomatis para santri dan jama'ahnya akan mengikuti apa yang diputuskan olehnya. Karena santri dan jama'ahnya pada waktu itu memiliki ketaatan yang tinggi terhadap TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid. Jadi, secara otomatis apa yang diputuskan dan dilakukan oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, akan diikuti pula oleh santri dan muridnya. Hal ini sudah menjadi bagian dari kultur dan tradisi masyarakat Lombok dan tradisi yang ada dalam pesantren NW pada waktu itu bahkan sampai sekarang, walaupun tingkat kepatuhan dan kadar militansinya berbeda. Dengan kepatuhan dan jaringan NW yang besar mulai dari tingkat pusat, wilayah,

---

<sup>60</sup> Pada waktu itu tanggal 7 November 1945 Masyumi memang dibentuk secara nasional sebagai partai Islam yang mewadahi aspirasi semua organisasi Islam dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara, dan di pimpin oleh H.M Natsir. Sehingga Masyumi terbentuk dari adanya federasi dari organisasi-organisasi Islam, seperti, NU, Muhammadiyah, PSII, PUI, Persis, NW, dan lain sebagainya. Lihat penjelasan ini dalam bukunya R, William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia Pada Awal Orde Baru*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), 176-177.

<sup>61</sup> Lihat Muahmmad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, cet. 1. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), 245.

daerah, cabang, dan ranting, menjadikan NW mempunyai posisi tawar yang cukup signifikan di tingkat lokal maupun nasional.<sup>62</sup>

Sejak NW didirikan secara resmi pada tahun 1953 sebagai sebuah organisasi sosial-keagamaan, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid menetapkan bahwa organisasi NW menganut kebijakan *politik bebas*, artinya sebetulnya organisasi ini memilih untuk tidak berafiliasi dengan kekuatan partai politik manapun. Sehingga, waktu itu TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, merestui terbentuknya Partai Nahdlatul Ulama (Partai NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan PSII di Lombok pada tahun 1953 dan 1954. Sikap ini ditunjukkan sebagai bukti bahwa pada waktu itu TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid begitu terbuka dengan partai politik manapun tanpa ada upaya untuk menghalangi atau menekan partai politik manapun untuk mendirikan cabang di Lombok Timur.

Namun, ketetapan NW untuk tidak berpolitik praktis yang telah disepakati ketika mendirikan NW itu tampaknya sudah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi dengan berbagai pertimbangan pada saat itu, salah satunya karena keyakinan bahwa jalur politik termasuk salah satu jalur dalam mendesiminasikan dan membersarkan gerakan dakwah dan pendidikan. Ini terbukti pada tahun 1955 TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dan organisasi NW menetapkan untuk berafiliasi dengan Partai Masyumi.<sup>63</sup> Apalagi Partai Masyumi pada waktu

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ust. Drs. H. Humaidi, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 20 Desember 2012.

<sup>63</sup> Partai Masyumi merupakan partai yang lahir dari suatu federasi dari seluruh organisasi sosial dan Partai-partai politik Islam, yang terbentuk pada

itu merupakan partai politik Islam terbesar di Indonesia pada akhir tahun 1940-an dan awal 1950-an.<sup>64</sup> Selain itu, sejak zaman pemerintahan RI Yogyakarta, Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia telah berhasil memainkan peran penting melalui Masyumi. Kemunculan partai politik yang diilhami oleh sekelompok pemimpin Islam ini bertujuan untuk mengisi kemerdekaan yang baru dibentuk. Partai ini juga bertujuan untuk merubah kedudukan umat Islam yang tidak menguntungkan pada awal kemerdekaan dan merasa berkewajiban untuk mengorganisasikan kekuatan dan tenaganya

---

bulan November 1945, dua bulan setelah Partai Nasional Indonesia. Partai ini lahir dari sebuah semangat dan keinginan bersama Organisasi-organisasi Islam untuk menjadikan Indonesia berideologi Islam atau berasaskan Islam. Namun, hal ini di tentang keras oleh kalangan nasionalis yang waktu itu di wakili oleh PNI. Sehingga, kelahiran dan eksistensi PNI waktu itu turut menjadi penyebab eksternal munculnya Partai Masyumi. Jadi, persis kelahiran dua partai besar disamping PKI, merupakan kelahiran atas pertentangan ideologi negara. Lihat penjelasan ini dalam bukunya Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), 27. Lihat juga penjelasan lebih lengkap dalam R. William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia Pada Awal Orde Baru*, ter. Tim Penerjemah Pustakan Grafiti (Jakarta: Pustaka Graffiti, 1992), 177. Disamping itu, partai ini juga lahir disebabkan oleh adanya Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Moh. Hatta yang intinya memberikan kebebasan dan menganjurkan untuk membentuk partai politik bagi organisasi-organisasi perkumpulan. Lihat penjelasan lebih lanjut tentang isi Maklumat dalam bukunya Kacung Marjan, *Quo Vadis Nu Setelah Kembali ke Khittah 1926*, 47.

<sup>64</sup> Lihat Anies Rasyied Baswedan dalam artikelnya "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory", *Asian Survey Journal* Vol. 44, No. 5 (2004), 671, <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>, diakses 3 September 2012.

dalam suatu wadah politik.<sup>65</sup> Atas dasar itu terbentuklah Masyumi sebagai wadah untuk mengorganisasi kekuatan Islam tersebut. Sehingga Masyumi, berdasarkan hasil analisis Herbert Faith, berhasil menjadi wakil rakyat yang terkuat dalam Kabinet Hatta dan dalam kepemimpinan nasional.<sup>66</sup>

Diantara beberapa organisasi Islam yang bergabung untuk menyatukan kekuatan Islam dalam sebuah wadah yang bernama Partai Masyumi pada waktu itu adalah: NU dan Muhammadiyah di Jawa, PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) di Sumatera Barat, Al-Jamiah Al-Washliyah dan Al-Ittihadiyah di Sumatera Utara, Mathla'ul Anwar dan Persatuan Umat Islam di Jawa Barat dan Banten, serta Nahdlatul Wathan (NW) di Lombok, PERSIS di Kalimantan, Al-Irsyad dan PUSPA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) di Aceh.<sup>67</sup> Bergabungnya sejumlah organisasi Islam dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda itu adalah disebabkan karena Partai Masyumi merupakan partai yang paling heterogen dan longgar ikatannya. Anggotanya kebanyakan dipersatukan oleh gagasan gerakan Islam terpadu.

---

<sup>65</sup> Lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Graffiti Press, 1987), 45 dan 47.

<sup>66</sup> Lihat Herbert Faith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1973), 135.

<sup>67</sup> Lihat Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, cet. 3, (Yogyakarta: LKIS, 2007), 99. Lihat juga Allan A. Samson dalam artikelnya Islam in Indonesian Politics, *Asian Survey Journal* Vol. 8, No. 12, 1005. <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>, diakses 5 September 2012.

Setelah bermusyawarah dengan tokoh NW yang lain pada waktu itu, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan. Maka, dengan tegas dan secara resmi bergabung dengan Partai Masyumi. Diantara alasan TGKH. M. Zainuddin bergabung dan mendukung Masyumi adalah:<sup>68</sup> Pertama, bahwa Masyumi merupakan partai politik Islam yang konsisten memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat Indonesia umumnya. Partai Masyumi lebih terbuka dan demokratis, namun tetap berpijak pada cita-cita politik Islam yang selalu lantang berbicara dibanding partai Islam lainnya. Kedua, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid memiliki banyak kesamaan visi dan misi dengan Partai Masyumi terutama dalam pandangannya tentang tujuan politik yang diperjuangkan dan ini sekaligus menjadi alasan kenapa dia tidak memilih bergabung dengan Partai NU ketika partai NU terbentuk karena banyak perbedaan visi misi politiknya dengan KH. Wahid Hasyim.<sup>69</sup> Ketiga, keterliban dalam dunia politik

---

<sup>68</sup>Lihat Muahmmad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 245.

<sup>69</sup> Namun selain itu, tidak bergabungnya NW kepada Partai NU pada waktu itu juga disebabkan oleh faktor internal Masyumi sendiri sebelum NU secara resmi mengeluarkan diri. Dimana pada waktu itu di tubuh Masyumi terdapat dua faksi kekuatan yakni faksi Sukiman dan faksi Natsir. Faksi Sukiman biasanya lebih dekat dengan Presiden Soekarno pada masa itu dan tokoh skuler nasionalis. Sedangkan faksi Natsir terdiri dari tokoh-tokoh muda yang kebanyakan terlihat mulai menonjol pada masa penjajahan Jepang dan kebanyakan dari luar Jawa, terutama dari Sumatera, dan termasuk pula TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dari Lombok. Dalam peta kelompok ini, maka NU bergandeng erat dengan faksi Sukiman yang lebih moderat dan luwes dalam politik dibanding kelompok Natsir yang lebih bersifat doktriner

menurutnya sebagai strategi dakwah baru yang kemudian disebut “*dakwah struktural*”. Sebab TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid beranggapan; “untuk mengubah sebuah tatanan kehidupan masyarakat secara cepat harus terjun ke dalam gelanggang politik”. Atas motivasi inilah ia terdorong untuk berpolitik sambil melakukan dakwah. Dalam hal ini dia memilih bergabung dengan Masyumi.<sup>70</sup> Sehingga dia diangkat sebagai anggota Konstituante periode 1955-1959, hasil dari pemilihan umum pertama pada tahun 1955.<sup>71</sup> Pandangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid itu juga senada dengan apa yang ditulis oleh Din Syamsuddin. Lebih jauh Din menyatakan bahwa disekitar pemilu 1955 dan pemilu lokal sekitar 1957, para

---

dan teknokratis. Adanya faksi di internal Masyumi tersebut ternyata berdampak serius terhadap perolehan suara Masyumi pada waktu itu dimana Masyumi hanya memperoleh dukungan yang sedikit dari rakyat dibanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang 85 persen Islam pada masa itu. Kenyataan ini menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan di dalam Masyumi, kepemimpinan modernis dan kepemimpinan tradisional. Suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan orang-orang Islam Indonesia dan mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan politik antara pemimpin-pemimpin Islam yang tergabung dalam partai politik. Maka dalam konteks ini NW lebih memilih bergabung dengan Masyumi ketimbang NU, walaupun pada kenyataan setelahnya Masyumi terjadi faksi di dalamnya. Diskusi ini dapat dilihat dalam bukunya Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, cet. 3 (Yogyakarta: LKIS, 2007), 99-100. Dan dalam bukunya Herbert Faith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, 135.

<sup>70</sup> Masnun, *Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat*, (Jakarta: Pustaka al-Miqdad, 2007). 227-228.

<sup>71</sup> Lihat Baharuddin, *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*, cet. 1. (Yogyakarta: Genta Press, 2007), 127.

pemimpin Islam atau elit Islam lokal maupun nasional, berfikir bahwa melalui politik yang dimainkannya merupakan salah satu cara dalam mengartikulasikan simbol-simbol Islam dan melalui politik pula Islam diperjuangkan.<sup>72</sup>

Sejak aktif di Partai Masyumi, semua warga NW dengan sendirinya memberikan dukungan kepada Masyumi karena selain mereka melihat kepada sosok TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid juga sebagian besar tokoh NW menjadi tokoh Masyumi. Selama menjadi anggota konstituante di Bandung, dia merupakan salah seorang ulama besar yang mendukung diberlakukannya ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai landasan hukum undang-undang negara dalam sidang konstituante. Dengan alasan dan bukti bahwa Islam secara normatif memuat seperangkat aturan dan nilai-nilai yang komplit dalam semua disiplin ilmu dan aspek kehidupan.

Namun dengan hal itu, sebagaimana yang dituturkan Muslihan Habib, bukan berarti ia setuju dengan gagasan tokoh Masyumi yang lain yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Akan tetapi dia tetap menginginkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan demokrasi pancasila dengan menghargai kemajemukan ras, agama, dan suku bangsa. Karena ia sangat menyadari bahwa Indonesia merdeka atas dasar perjuangan seluruh elemen yang ada di Indonesia, bukan hanya rakyat yang beragama Islam saja, tetapi banyak yang beragama

---

<sup>72</sup> Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), 45.

lain selain Islam. Atas dasar itu, maka dalam konteks ini dia merupakan tokoh yang berpikiran politik moderat.<sup>73</sup>

Selain itu, dalam sisi lain ia tidak setuju dengan konsep Soekarno mengenai NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) dan konsep demokrasi terpimpin. Meskipun argumen-argumen politiknya tidak diabadikan hingga sekarang. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid pernah menyatakan: “dengan diterapkannya konsep demokrasi terpimpin, membuat semua orang akan bersikap mono-loyalitas kepada figur dan sesungguhnya kondisi ini justru tidak demokratis”

Perkembangan selanjutnya setelah Partai Masyumi dikucilkan dari DPRGR pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden pada waktu itu memutuskan:<sup>74</sup>

1. Pembubaran Konstituante.
2. Kembali pada Undang-undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara 1950.
3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara.

Dengan keluarnya dekrit itu maka jelas secara otomatis konstituante dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah Orde Lama, maka konsultasi perpolitikan nasional mulai mengalami kegoncangan. Polarisasi kekuatan politik berubah menjadi

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Ust. Muslihan Habib, M.Ag, di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2013. Ia merupakan salah seorang pengasuh Pondok Pesantren NW Jakarta.

<sup>74</sup>Lihat dalam Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik; Kepolitikan Nahdaltul Ulama* (Jakarta: UI Press, 2008), 115-116.

tinggal tiga kekuatan besar, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akhirnya lahirlah gagasan NASAKOM.

Setelah Partai Masyumi dibubarkan, kalangan politisi muslim Indonesia berkembang gagasan untuk membentuk suatu wadah partai politik sebagai pengganti Masyumi. Maka, pada tanggal 20 Februari 1968, lahirlah Partai Muslim Indonesia (Parmusi) dengan keputusan SK Presiden No. 70 Tahun 1968. Partai ini didukung oleh Sembilan organisasi Islam, yakni Muhammadiyah, Al-Jami'atul Washiyah, Gasbindo, Persatuan Islam, Nahdlatul Wathan, Mathla'ul Anwar, Syarekat Nelayan Islam Indonesia, Persatuan Buruh Islam Merdeka dan Persatuan Umat Islam.<sup>75</sup>

Berdasarkan SK presiden No.70 Tahun 1968 di atas, maka Parmusi resmi berdiri, dengan menempatkan Djarwani Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai Ketua dan Sekretaris, susunan lengkapnya adalah sebagai berikut:<sup>76</sup>

Ketua Umum	: H. Djarwani Hadikusumo	(Muhammadiyah)
Sekretaris Umum	: Lukman Harun	(Muhammadiyah)
Ketua-ketua	: Agus Sudono	(Gasbindo)
	H.M Sanusi	(Muhammadiyah)
	J. Naro	(al-Washliyah)

---

<sup>75</sup> Lihat Abd. Rochim Ghazali, Matahari Bersinar di Atas Negara, *Jurnal Tanwir*, vol. 1, Nomor 1, Mei 2003, 9.

<sup>76</sup>Lihat pemaparan dan penjelasan lengkap mengenai kepengurusan awal Parmusi ini dalam bukunya Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional*, cet. 1 (Surakarta: Univrsitas Muhammadiyah Press Surakarta, 2003), 79.

	Daud Badaruddin	(KBIM)
	Chadidjah Razak	(Wanita Islam)
	Omar Tusin	(SNII)
Sekretaris	: Drs. Amura	(HSBI)
	Drs. Ali Imron	(al-Ittihadiyah)
	Siregar Pahu	(al-Washliyah)
	Anwar Bey	(PUI)
	Said Sungkar	(PUI)
	H. Syariki	(NW)
	Drs. Rafilus Ishak	(PGAIRI)
	Drs. Darus Samin	(PGAIRI)

Khusus di pulau Lombok, NW merupakan ormas Islam yang pertama kali dengan tegas mendukung terbentuknya Parmusi. Karena NW juga ikut membidani lahirnya Parmusi dengan organisasi Islam lainnya. Sehingga, NW menemptakan satu kadernya di kepengurusan pusat Parmusi yakni H. Syariki, seperti yang terlihat dalam susunan kepengurusan pertama Parmusi di atas. Adapun asumsi NW memilih bergabung dengan Parmusi adalah karena, Parmusi merupakan duplikasi dari Partai Masyumi dan memiliki kesamaan ideologi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya NW tidak dapat berperan signifikan dalam partai tersebut. Ini disebabkan oleh tidak terakomodirnya aspirasi NW sebagai ormas Islam yang memiliki basis konstituen terbesar di pulau Lombok.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup>Lihat Muahmmad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 246.

Hal ini disebabkan oleh kepengurusan Parmusi di tingkat pusat yang dikuasai oleh orang-orang Muhammadiyah, sehingga orang Muhammadiyah menganggap bahwa kepengurusan Parmusi untuk tingkat daerah I dan II hendaknya dipegang oleh orang-orang Muhammadiyah. Ini terbukti, dengan keinginan orang Muhammadiyah pusat untuk konteks kepengurusan NTB. Dimana kepengurusan Parmusi NTB baik yang tingkat satu maupun tingkat dua harus di pegang oleh orang Muhammadiyah. Maka terjadilah ketegangan politik antara NW dan Muhammadiyah. Akan tetapi selama NW berada dalam Parmusi, NW berhasil mengantarkan kadernya untuk duduk dalam anggota DPR-GR, seperti Zainal Mansyur dari Fraksi Alim Ulama, yang selanjutnya pada tahun 1969 diangkat Afifuddin Adnan Sebagai penggantinya.<sup>78</sup>

Terlepas dari konflik politik antara keduanya, bahwa duduknya salah seorang tokoh NW dalam kepengurusan Parmusi pusat masih dinilai oleh warga kurang memuaskan. Kondisi ini membuat NW melakukan konsolidasi baru dan mulai mengincar salah satu kekuatan partai politik baru yang dinilai mampu menjadi lokomotif pembangunan dan menguntungkan bagi perkembangan umat Islam dan NW ke depan khususnya. Oleh karena itu, NW melalui tokoh-tokoh pentingnya segera hengkang dari Parmusi dan mendukung Golkar melalui Fron Nasional. Menanggapi kepindahan afiliasi politik NW tersebut, dalam suatu acara kampanye, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid pernah mengatakan bahwa "*boleh kita*

---

<sup>78</sup>Lihat Masnun, *Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 232.

*mengganti baju, tetapi jangan berganti di dalam baju*". Pernyataan ini terkesan pragmatis, tetapi demi kemaslahatan umat hal ini diperbolehkan oleh agama.<sup>79</sup>

## **Mendukung Golkar Pada Masa Orde Baru (1967-1998)**

Perjalanan politik NW tidak berhenti sampai di situ. Setelah secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari Parmusi, melalui tokoh-tokohnya NW secara resmi bergabung dengan Golkar melalui Fron Nasionalnya. Sejarah mencatat pada tahun 1971, Fron Nasional ini kemudian hari melahirkan Sekber (Sekertaris Bersama) Golkar (Golongan Karya).<sup>80</sup> Merupakan suatu organisasi politik yang dibentuk atas gagasan Jenderal A.H. Nasution, yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok militer, agama, pemuda, buruh, pengusaha, dan kelompok-kelompok non ideologis lainnya.<sup>81</sup>

Dukungan yang diberikan oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dan NW kepada Sekber Golkar didasari atas beberapa pertimbangan politik. Pertama, Golkar adalah partai Orde Baru yang dinilai berhasil menumpas gerakan 30 S/PKI. Keberhasilan ini paling tidak adalah sebuah kemaslahatan bagi kaum muslimin. Fakta ini juga diperkuat oleh pernyataan

---

<sup>79</sup>Lihat Masnun, *Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 232.

<sup>80</sup>Lihat Masnun, *Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 233.

<sup>81</sup>Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), 40.

Muslihan Habib, yang menuturkan bahwa pada waktu itu NW memilih bergabung dengan Golkar karena Golkar dianggap berhasil menumpas gerakan PKI yang merupakan gerakan yang bertentangan menurut Islam sebagaimana yang diyakini oleh NW juga pada waktu itu.<sup>82</sup> Kedua, dalam organisasi politik ini, aspirasi NW lebih terakomodir dari pada partai politik lainnya.<sup>83</sup> Ketiga, keinginan organisasi NW untuk menyumbangkan pikiran bagi daerah Lombok melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjembatani itu, tentu saja diperlukan seorang wakil untuk meneruskan aspirasi itu. Keempat, pada waktu itu Golkar dipandang sebagai satu-satunya partai yang mampu mewujudkan keinginan dan cita-cita NW di atas, apalagi waktu itu Golkar merupakan partai besar dan memenangkan pemilu 1971 dengan meraih 73% suara nasional.<sup>84</sup> Pada pemilu ini pula TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid berhasil menjadi anggota MPR-RI dari Partai Golkar. Selain itu, bentuk akomodasi politik yang dilakukan oleh Sekber Golkar terhadap NW adalah penunjukan H. Zainuddin Mansur, MA, sebagai anggota Fraksi Alim Ulama di DPRGR

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Ust. Muslihan Habib, M.Ag, di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2013.

<sup>83</sup> Lihat Muahmmad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 246.

<sup>84</sup> Lihat Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi (ed), *Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), 190.

dan beberapa kader NW lainnya di daerah.<sup>85</sup> Selain itu selama bergabung dengan Golkar NW juga telah mengantarkan salah satu kader terbaiknya yakni Drs. H. Lalu Gede Wiresentane menjadi anggota DPR-MPR RI periode 1978-1982.<sup>86</sup>

Lebih dari itu, TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid tidak hanya mendukung Golkar, tapi bahkan menduduki posisi sebagai Dewan Penasehat Golkar di tingkat pusat selama dua periode. Pada masa-masa kampanye dia pun aktif sebagai juru kampanye tunggal dari Golkar. Berikut disajikan ringkasan kutipan mengenai sikap dan pernyataan beliau saat kampanye, sebagai mana yang ditulis dalam bukunya Masnun:

“Sudara-saudara, jika Golkar diberi kesempatan untuk memimpin bangsa melalui pemilu ini, ada lima program utama, yakni: Pertama, Golkar ingin semua rakyat Indonesia perutnya kenyang, sambil mengutip salah satu firman Allah surat Al-Imran ayat 149. Kedua, jika perut rakyat sudah kenyang maka program selanjutnya ialah sandang, sembari mengutip Al-Qur’an. Ketiga, setelah rakyat memiliki sandang, maka ia harus memiliki papan, sebab sekarang bukan lagi zaman perang. Pemerintah melalui Golkar telah mempunyai program mendirikan rumah di tanah kosong untuk rakyat, rumah sehat dan air bersih semua program Golkar. Keempat, supaya rakyat sehat dan pendidikannya sempurna. Dan kelima, beribadah kepada tuhan khusus’ dan tenang. Janganlah takabbur dengan memberikan janji kepada semua rakyat jika

---

<sup>85</sup>Lihat Muahmmad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 246.

<sup>86</sup>Lihat Baharuddin dan Rasmianto, *Maulana Lantera Kehidupan Ummat*, (Malang: Citra Mentari, 2004), 92.

tidak terbukti, dan jikalau Golkar menang korupsi, kolusi akan habis. Karena itu, kita sebagai orang beragama mari menjalankan syariat agama secara sempurna. Semoga Golkar tetap menang untuk ketiga kalinya.”<sup>87</sup>

Selain itu dalam kesempatan yang berbeda TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid pernah mengungkapkan kesetiaan dukungannya terhadap Golkar dengan syair berikut ini:

Golkar menang rakyat senang,  
Demokrasi tetap berkembang,  
Kota dan desa semua perang,  
Untuk teruskan pembangunan

Pemuda pemudi masa kini,  
Yang bergelar nama anti,  
Merelakan pembela RI,  
Wujudkanlah rukunan sejati.<sup>88</sup>

Melalui kutipan syair di atas, terlihat dengan jelas bagaimana semangat dan kesetiaan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dan NW pada waktu itu. Sampai-sampai TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid berani menjamin bahwa ketika Golkar memenangkan pemilu dan demokrasi Indonesia akan terus berkembang. Ini artinya prinsip kerakyatan dalam bidang ekonomi dan yang lainnya akan tetap berjalan.

Selanjutnya dalam pemilihan umum tahun 1971 dan 1977, masing-masing TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid terpilih

---

<sup>87</sup>Lihat Masnun, *Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 232.

<sup>88</sup> Dikutip dari arsip rekaman kampanye TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid tahun 1928 di lapangan Mataram NTB.

sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dari Partai Golkar periode 1969-1973, kemudian terpilih menjadi anggota MPR-RI kembali dari utusan daerah tahun 1973-1982.<sup>89</sup>

Setelah sekian lama NW berjuang bersama Golkar tapi ternyata tidak menjadikan NW dan Golkar utuh selamanya. Hal ini terbukti dari sejarah yang menunjukkan bahwa pada tahun 1982 NW menyatakan diri keluar dari Golkar setelah mencermati gaya kepemimpinan Soeharto yang secara tidak langsung memojokkan kekuatan politik Islam pada waktu itu dan menganggap bahwa kritik-kritik yang disampaikan dinilai ekstrim, maka ia dengan tegas mencabut dukungan dari Golkar.<sup>90</sup> Akibatnya, banyak para pengikutnya ditangkap atau di ancam oleh rezim Orde Baru, dan ini merupakan pengalaman kelam yang dilakukan Orde Baru terhadap NW. Selain itu, akibat keluarnya NW dari Golkar maka bantuan pemerintah untuk sekolah-sekolah NW pun dihentikan.<sup>91</sup>

Dengan problem dan segala dinamika politik bersama Golkar, maka NW secara resmi menyatakan diri keluar dari Golkar dan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid selaku tokoh yang mewakili NW sekaligus pendiri NW memilih lebih

---

<sup>89</sup>Lihat Muahmmad Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan Guru Kiyai Haji Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, 247.

<sup>90</sup> Lihat Masnun, *Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 234.

<sup>91</sup> Lihat Henk Schulte Nordholt, et.al, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Buku Obor, 2007), 380.

mengkonsentrasikan diri untuk memantapkan konsolidasi internal NW. Maka, dalam Mukhtar NW ke-VIII, dia mengajak seluruh warga NW untuk kembali ke khittah 1936 yang berada pada posisi netral politik. Namun bagaimanapun Golkar pernah berjasa terhadap NW, maka dia tetap memberi kesempatan kepada tokoh dan warga NW untuk tetap berada di gelanggang politik. Sehingga banyak tokoh NW yang tetap di Golkar untuk mewarisi dan merasakan pengaruh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid di Partai Golkar. Hasilnya cukup mengejutkan, pada pemilu tahun 1982 tercatat dari total jumlah 22 orang anggota DPRD Provinsi tingkat 1, sebanyak 18 orang diisi oleh tokoh-tokoh NW.<sup>92</sup>

Walaupun sebagian besar tokoh-tokoh NW masih aktif dan sukses di Golkar, tapi hubungan politik TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dengan Golkar tetap kurang baik.

### **Kembali ke Khittah 1936**

Karena munculnya berbagai persoalan di internal organisasi NW, sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan di atas, menyebabkan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid kemudian mengundurkan diri dari aktifitas dan hingar bingar dunia politik. Kemundurannya itu kemudian dikenal dengan "*gerakan tutup mulut*" atau tidak berpolitik praktis.

Berawal dari itu dan munculnya konflik internal sejak bergabung bersama Golkar, ditambah lagi dengan kekecewaan

---

<sup>92</sup> Lihat Masnun, *Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 235.

TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid setelah dua periode bergabung dan menjadi dewan penasehat Golkar di pusat, ikut menjadi pemicu yang lebih serius mundurnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dari dunia politik.

Apalagi konflik internal organisasi NW tidak saja berpengaruh pada keberadaan NW sebagai organisasi, tetapi juga pada NW sebagai pesantren, mengingat sebagian pengurus organisasi sekaligus sebagai pengurus NW keluar dari NW . Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1983. Pada momentum Hultah ke-47 NWDI, dideklarasikanlah bahwa NW sebagai organisasi akan kembali pada Khittah 1936, artinya bahwa NW akan kembali sebagaimana pada misi awal dulu dibentuk embrio dan cikal bakal NW itu sendiri, yakni pesantren al-Mujahidin yang menkosentrasikan diri untuk perbaikan masalah keummatan terutama dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Selain itu, diharapkan dengan gerakan kembali ke khittah itu, NW dapat lebih berkonsentrasi pada kerja-kerja kultural sebagaimana misi awal pendiriannya.<sup>93</sup>

Apalagi dalam firasat dan penilaian TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, partai politik sudah sulit untuk dipakai dalam memperjuangkan ummat karena sudah tidak proporsional lagi sebagai pembela dan penyalur kepentingan rakyat dan arah politik sudah tidak sesuai dengan perjuangan Islam. Sehingga

---

<sup>93</sup> Lihat Khirjan Nahdi, *Nahdlatul Wathan dan Peran Modal: Studi Etnografi-Historis Modal Spiritual dan Sosiokultural*, 141.

pada pemilu 1982 dan pada pemilu 1987, 1971, dan pemilu 1977, dia sudah tidak banyak ikut terlibat lagi dalam politik praktis.<sup>94</sup>

Kembali ke khittah 1936 pada waktu itu adalah langkah paling tepat yang di ambil oleh NW karena dengan demikian NW akan dapat menjalankan kembali peran utamanya sebagai organisasi keagamaan yang pada hakikatnya bertugas membimbing dan membina umat.

Sikap NW sebagai organisasi untuk kembali ke khittah di pertegas kembali oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dalam forum resmi NW, yakni pada Muktamar NW Ke-VIII pada tahun 1986. Pada waktu itu, dia mengajak seluruh warga NW untuk kembali ke khittah. Namun ajakan dan seruan tersebut menurut Masnun kurang mendapat respon dari kalangan tokoh NW. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa, keengganan mereka menuruti ajakan tersebut selain sudah terlanjur terjun ke politik juga disebabkan oleh kesempatan luas yang diberikan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid untuk tetap berjuang di jalur politik. Akibatnya, tidak sedikit tokoh NW yang keluar dari kepengurusan NW dan berkonsentrasi di gelanggang politik.<sup>95</sup> Sikap dan ajakan TGKH. M. Zainuddin ini nampaknya tidak terlalu menjadi prioritas dan tidak ditekankan harus semua mengikutinya, dalam arti masih sebatas himbauan saja sehingga wajar masih banyak kader yang meneruskan

---

<sup>94</sup> Lihat Baharuddin dan Rasmianto, *Maulana Lantera Kehidupan Ummat*, 94-95.

<sup>95</sup> Lihat Masnun, *Tuan Guru Kiyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan dan Gerakan Pembaruan Islam di Nusa Tenggara Barat*, 239.

perjuangan di jalur politik dan tidak sepenuhnya mengikuti ajakan kembali ke khittah.

Sejak saat itu, maka TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dan organisasi NW tidak terlalu banyak terlibat dalam aktifitas politik praktis, sehingga persis sekitar kurun waktu sepuluh tahunan hingga menjelang wafatnya eskalasi politik NW tidak begitu dinamis. Dan TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid banyak menghabiskan sisa umurnya untuk berdakwah dan mendidik masyarakat secara langsung melalui majelis-majelis pengajian dan kegiatan sosial dan NW secara organisasi banyak mengadakan konsolidasi kepengurusan untuk memperkuat kerja-kerja kulturalnya.<sup>96</sup>

### **Afiliasi Politik Pada Era Reformasi (1998-2013)**

Sejak TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam aktifitas politik pada sekitar tahun 1986, maka persis tensi dinamika politik di internal NW pun tidak sedinamis yang terjadi ketika TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid masih aktif. Ini sangat bisa dimaklumi karena posisi TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid yang begitu sentral dan power dalam organisasi NW, karena dia masih dianggap tokoh panutan yang segala-galanya dalam NW, termasuk segala-galanya dalam urusan politik. Walaupun, keputusan TGKH.

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Ust. Drs. H. Muhsin Sirsa, M.Pd.I, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 15 Januari 2013. Ia merupakan salah seorang tokoh NW, pernah menjabat sebagai Sekertaris Umum NW Daerah Lombok Timur dan sekarang menjadi Pimpinan Pondok Pesantren Darul Muhsinin NW Wakan.

M. Zainuddin Abdul Madjid tidak berpolitik praktis secara langsung tapi bukan berarti semua muridnya atau elit NW yang lain tidak berpolitik, akan tetapi pada waktu itu, keterlibatan politik oleh masing-masing murid TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid dan elit NW lebih merepresentasikan dirinya sebagai individu, bukan sebagai elit yang mewakili organisasi NW. Situasi ini terjadi hingga wafatnya pada tahun 1997. Sehingga, persis sekitar rentang waktu sepuluh tahunan tensi politik di internal NW tidak begitu dinamis, berbeda ketika TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid masih aktif berpolitik dan NW secara organisasi juga turut menjadi media perjuangan dalam bidang politik.

Namun sejarah membuktikan, tensi politik di NW pasca ditinggal wafat oleh pendirinya menunjukkan gejolak dan dinamika politik yang begitu serius. Apalagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdaltul Wathan (PBNW) di jabad waktu itu oleh Lalu Gede Wiresentane yang merupakan menantu dari TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid, suami dari Siti Raihanun, juga meninggal dunia kurang dari sebulan setelah TGKH. M. Zainuddin wafat. Akibatnya waktu itu terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum PBNW. Walaupun kemudian pada waktu itu, jabatan semetara PBNW dipegang oleh H. Maksun Ahmad. Situasi itu berlangsung sampai muktamar X pada 23-25 juli 1998 di Praya Lombok tengah.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Lihat Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi (ed), *Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia*, 192.

Namun justru pada muktamar ini, konflik antara kubu Siti Rauhun dan Siti Raihanun demikian memuncak. Ini berawal dari adanya perebutan kekuasaan siapa yang paling pantas untuk menggantikannya, baik sebagai Ketua Umum PBNW maupun sebagai pemain inti dalam dinamika politik NW maupun politik lokal di Lombok.<sup>98</sup> Dimana para peserta muktamar sedianya akan memilih Siti Rauhun sebagai pengganti Lalu Gede Wiresentane, namun Rauhun menolak dan mengundurkan diri karena ia menganggap hal ini menyalahi aturan AD/ART organisasi yang menyatakan seorang pemimpin tidak boleh dari kalangan perempuan. Kepemimpinan perempuan hanya boleh dilakukan jika organisasi ini beranggotakan hanya kaum perempuan, sementara NW beranggotakan laki-laki dan perempuan.<sup>99</sup>

Pada pemilihan tahap pertama muncullah tiga nama yang dicalonkan yakni Siti Rauhun, Siti Raihanun dan H. Maksun Ahmad. Tapi, Siti Rauhun kemudian mengundurkan diri secara otomatis dengan alasan seperti di atas, sehingga tinggal dua calon. Seperti yang sudah diduga Siti Raihanun kemudian terpilih menjadi Ketua Umum dan TGH. Hayyi Nu'man sebagai Sekertaris Jendral PBNW yang baru. Akan tetapi kubu Siti Rauhun menolak keputusan tersebut dengan alasan di atas, akan tetapi dewan mustasyar yang berada di belakang kubu Siti Raihanun yakin TGH. Ruslan Zain dan TGH. Hilmy

---

<sup>98</sup>Lihat Henk Schulte Nordholt, et.al, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Buku Obor, 2007), 380.

<sup>99</sup>Lihat Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi (ed), *Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia*, 192.

Najamuddin mengeluarkan fatwa perempuan boleh menjadi pemimpin.<sup>100</sup>

Karena kubu Siti Rahun tidak menerima keputusan tersebut, maka pada tahun 1999 kubu Siti Rahun mengadakan muktamar reformasi di Mataram, dan terpilihlah Dr. TGKH. M. Zainul Majdi sebagai Ketua Umum dan TGH. Abdul Hanan sebagai Sekertaris Jendral PBNW. Setelah itu, maka persis terjadi dualisme kepengurusan di internal NW.

Kondisi ini secara otomatis kemudian membentuk dinamika politik baru di kedua kubu, dimana masing-masing kubu memilih berafiliasi ke partai politik yang berbeda. Walaupun ini berwal dari perubahan sistem demokrasi dengan multi-partai di masa Era Reformasi. Apalagi pada waktu itu juga menjelang pemilu 1999, sehingga NW tidak tinggal diam dan ikut mensukseskan pemilu dengan ikut bergabung dengan partai pilihan masing-masing.

Sehingga, pada Pemilu 1999 kubu Siti Rahun bergabung dengan (Partai Daulat Rakyat) PDR dan kubu Siti Raihanun memilih tetap bersama Partai Golkar.<sup>101</sup> Namun dalam pemilu kali ini dan konteks politik NW pada saat itu, tidak terlalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NW karena pada waktu itu NW masih dipusingkan dengan urusan konflik dan dualisme kepengurusan. Sehingga waktu itu eskalasi politik

---

<sup>100</sup>Lihat Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi (ed), *Transformasi Otoritas Keagamaan Pengalaman Islam Indonesia*, 192.

<sup>101</sup> Lihat Khirjan Nahdi, *Nahdlatul Wathan dan Peran Modal: Studi Etnografi-Historis Modal Spiritual dan Sosiokultural*, 142.

NW tidak terlalu dominan dan bisa dikatakan NW secara organisasi tidak banyak menyerukan jama'ahnya untuk memilih salah satu partai. Artinya diberikan kebebasan dalam memilih sesuai dengan kehendak masing-masing elit dan jama'ah sehingga pada waktu itu sikap politik NW sangat berpariasi.<sup>102</sup>

Namun pada Pemilu 2004 kedua kubu kembali mengganti bendera partai politiknya masing-masing, kubu Siti Rahun berafiliasi ke Partai Bulan Bintang (PBB), dan kubu Siti Raihanun berafiliasi ke Partai Bintang Reformasi (PBR). Kedua partai afiliasi NW PBB dan PBR selalu masuk tiga besar dalam perolehan suara di tingkat lokal. Mereka juga berhasil mengantarkan salah satu kadernya sebagai anggota DPR RI khususnya dari PBNW Kubu Siti Rahun melalui PBB yakni TGKH. Zainul Majdi, MA, yang waktu itu masih menjabat Ketua Umum PBNW. Namun dikarenakan perolehan kedua partai ini tidak mencapai *Parliamentary Threshold (PT)* pada Pemilu 2009 di tingkat nasional, maka NW secara otomatis tidak dapat mengantarkan kadernya ke kursi DPR RI di senayan sehingga disinyalir akan berganti partai politik.<sup>103</sup>

Hal lain yang juga perlu di catat dalam konteks ini adalah, ketika kubu Siti Rahun pada Pemilu pada NTB tahun 2009, berhasil mengantarkan kadernya menjadi Gubernur NTB periode 2009-2013, yakni Dr. TGKH. Zainul Majdi yang

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ust. Drs. H. Muhsin Sirsa, M.Pd.I, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 15 Januari 2013.

<sup>103</sup> Lihat Saipul Hamdi, Politik Islah: Re-Negosiasi Islah, Konflik, dan Kekuasaan Dalam Nahdlatul Wathan Di Lombok Timur, dalam *Jurnal Kaswitara* Vol. 1, Nomor 1, April 2011, 4.

diusung oleh PBB dan PKS. Sedangkan pemilukada kali ini, di lain pihak, kubu Siti Raihanun mengusung pasangan *incumbent* waktu itu yakni Drs. Lalu Srinata yang banyak didukung oleh partai politik besar seperti Partai Golkar, PBR, PDIP, dan yang lainnya, tapi nyatanya kalah oleh pasangan yang diusung oleh kubu Siti Rauhun.

Namun perolehan dan prestasi politik di atas bagi NW khususnya kubu Siti Rauhun tidak menjadi jaminan bahwa mereka tidak berpindah partai atau afiliasi politiknya. Benar saja seperti yang sudah diduga oleh banyak kalangan bahwa NW berpindah afiliasi politik. Ini terbukti dari kenyataan yang kita lihat sekarang, dimana NW kubu Siti Rauhun berafiliasi ke Partai Demokrat sedangkan NW kubu Siti Raihanun berafiliasi ke Partai Gerindra. Fakta di atas sekaligus menunjukkan bahwa ternyata NW ketika bergabung dengan sebuah partai tidak terlalu mempertimbangkan faktor kesamaan ideologi, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Dalam arti selama partai itu dapat memberikan satu hal yang positif terhadap organisasi maka pertimbangan kesamaan ideologi menjadi tidak penting.<sup>104</sup>

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ali Mustofa sebagaimana dikutip oleh Muhammadun, yang menyatakan bahwa, maraknya fenomena kutu loncat atau pindah partai

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ust. Drs. Kholidi, M.Pd.I, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 22 Januari 2013.

biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:<sup>105</sup> Pertama, untuk mencari peluang karir politik yang lebih strategis. Karena dunia politik masih dimaknai sebagai pekerjaan utama sehingga masuk dunia politik pasti menaikkan karir. Ketika partai politik lain dipandang lebih dapat menjamin harta, maupun kedudukan, maka yang bersangkutan akan pindah partai. Kedua, insiden politik. Sebab kedua ini sudah jamak terjadi. Politisi meloncat ke parpol lain karena sudah tidak merasa nyaman di partai lama disebabkan karena adanya dis-harmonisasi atau komunikasi yang tidak sehat dengan tokoh partai. Ketiga, pragmatisme politik. Ini menjadi alasan karena ketika perpindahan partai maka disitu ada jaminan kekuasaan yang diberikan, atau ketika menjabat sebagai kepala daerah maka ada jaminan untuk selalu di dukung jika berpindah partai.

Maka dalam konteks ini kepindahan PBNW kubu Siti Rahun ke Partai Demokrat dalam rangka mempertahankan dan memuluskan perjuangan kadernya sebagai gubernur sampai akhir periode. Karena sebagaimana yang kita ketahui Partai Demokrat merupakan partai terbesar dan memenangkan pemilu 2009, maka sangat relevan jika mereka berpindah partai. Selain itu, ketika pemilukada berikutnya akan dengan mudah mengusung calon kepala daerah karena sudah memiliki kendaraan politik.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Lihat Muhammadun, *Politik Kutu Loncat dan Matinya Idieologi Politik*, dalam Kolom Opini *Media Indonesia*, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, 6.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ust. Drs. Kholidi, M.Pd, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 22 Januari 2013.

Jika melihat fenomena politik yang dilakukan oleh NW dewasa ini, menjadi suatu hal yang wajar. Karena keputusan untuk berjuang melalui jalur politik sudah menjadi agenda resmi yang mereka programkan. Ini terlihat dari materi hasil Konferwil NW XII NTB tahun 2011, yang salah satu program kerja prioritasnya dalam bidang politik. Berikut adalah petikan program prioritas dalam bidang politik:

“Sebagai jam’iyah NW perlu memperkuat peran politiknya dengan berupaya menempatkan kader-kadernya dalam lembaga eksekutif maupun legislatif. Sekarang ini pemilukada yang memilih pemimpin eksekutif dilaksanakan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan demikian NW yang memiliki massa rill memiliki modal sosial yang kuat untuk turut menentukan kepala daerah. Demikian pula dalam pemilihan anggota legislatif pusat, mupun daerah, massa NW dapat meraih sejumlah kursi legislatif pusat maupun daerah. Agar potensi tersebut tidak hanya dimannfaatkan dan dinikmati pihak lain, maka NW perlu mengambil peran politiknya dengan mengusung: kader-kader terbaik NW sebagai gubernur, bupati atau walikota. Pencalonan kader-kader terbaik sebagai anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah”.<sup>107</sup>

Dengan penegasan tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa NW sekarang benar-benar tidak dapat menghindari diri lagi dari percaturan politik. Karena itu, sudah menjadi salah satu pilihan dalam mempertahankan eksistensinya. Sehingga NW dewasa ini berhasil menempatkan kadernya di beberapa daerah di Lombok sebagai kepala daerah maupun anggota legislatif. Namun dalam

---

<sup>107</sup> Lihat Arsip Materi Konfrensi Wilayah (Konferwil) Nahdlatul Wathan Nusa Tenggara Barat ke-XII, 3-4.

sisi lain, fakta-fakta di atas terkait perilaku politiknya sejak bergabung dengan Golkar hingga sekarang NW terlihat lebih oportunistis, sangat berbeda dengan perilakunya ketika dulu bergabung dengan Masyumi yang lebih idealis.

Fakta tentang sikap oportunistis NW sejak bergabung dengan Golkar setidaknya dapat kita lihat dan buktikan melalui alasan-alasan yang dikemukakannya. NW bergabung dengan Golkar sejatinya atas dasar kepentingan menjaga eksistensi organisasi bukan atas dasar pertimbangan kesamaan ideologi dan visi, buktinya NW berasaskan Islam sedangkan Golkar nasionalis. Begitu juga hingga sekarang NW terlihat lebih oportunistis jika dibandingkan dengan sebelumnya, dimana NW bergabung dengan partai politik tertentu lebih didasari atas kepentingan sesaat dibanding dengan alasan kesamaan ideologi dan visi dengan partai tertentu.

Kesan itu kemudian menguatkan jika organisasi masyarakat (ormas) tidak hanya sebagai penghimpun kepentingan masyarakat berdasarkan persamaan-persamaan yang dimilikinya, tetapi juga menempatkan ormas sebagai broker antara masyarakat dan pemerintah.<sup>108</sup> Posisi ini mau tidak mau menempatkan ormas pada bagian yang nyaris sejajar dengan partai sehingga pola dan bentuk kerjasama keduanya tidak lagi bergantung hanya kepada organisasi politik, melainkan dapat pula terjadi sebaliknya. Dalam arti ormas dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui partai, sebaliknya partai dapat didukung

---

<sup>108</sup>Lihat Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: UI Press, 2008), 66.

ormas, sehingga hubungan keduanya saling membutuhkan. Hal ini kemudian jika diterjemahkan lebih khusus memberikan sebuah pandangan bahwa perilaku organisasi atau sikap kolektif merupakan langkah seterategis dan efektif jika memperjuangkan sebuah kepentingan.

Dalam hal ini, Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa lembaga atau organisasi keagamaan yang selama ini dipandang konservatif, statis dan keberadaannya sering diremehkan dalam kehidupan modern, ternyata menyimpan berbagai kekuatan yang luar biasa, bahkan organisasi keagamaan dalam berbagai kesempatan menjadi motor penggerak (*agent of change*) terjadinya perubahan.<sup>109</sup> Gibb juga mengungkapkan, bahwa lembaga sosial keagamaan di mana-mana sampai saat ini masih menjalankan fungsinya sebagai *agent of change*.<sup>110</sup> Tentu hal ini didasari dari sikap dan perilakunya atas dasar keputusan kolektif atau keputusan secara keorganisasian.

---

<sup>109</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1988), Dan Burhanuddin, *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*, 2.

<sup>110</sup> Burhanuddin, *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*, 2.



## **BAB IV**

# **PERSPEKTIF DASAR TENTANG BUDAYA POLITIK**

Pembahasan mengenai budaya politik masih sangat erat kaitannya dengan pembahasan dalam bab sebelumnya. Secara sederhana seolah bisa dianggap jika tidak ada perilaku politik maka tidak akan ada budaya politik. Begitu dekatnya dua terma ini menjadikan pembahasan satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Namun sejatinya kedua konsep ini berbeda jika dipahami secara lebih mendalam. Perilaku politik lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang disebabkan cara pandang individu, kelompok atau lembaga atas sistem politik yang dilaksanakan dalam aktivitas berpolitik seseorang, kelompok, atau lembaga. Sedangkan budaya politik lebih berkonotasi pada pelembagaan dari perilaku politik warga negara yang telah menyatu dalam aktivitas sosial dan politik itu sendiri.

Oleh karena itu, tujuan pembahasan budaya politik ini adalah supaya dapat mengenal lebih mendalam pembahasan terkait dengan budaya politik, mulai dari pengertian dasar budaya politik, tipologi budaya politik, realitas budaya politik, dan disertakan satu pembahasan tambahan mengenai model budaya politik yang terus aktual dan selalu mengemuka saat

menjelang pemilu dan ini salah satu menjadi ciri khas budaya di Indonesia, yakni sering kita sebut budaya politik pesantren.

Terlebih-lebih perbincangan terkait budaya politik dua dekade terakhir selalu menjadi salah satu tema ilmu politik yang terus menarik dan tidak pernah ada habis-habisnya untuk dikaji, bukan saja karena budaya politik merefleksikan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, namun karena budaya politik juga dapat mencerminkan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Dalam era globalisasi, budaya politik dalam suatu negara seringkali ambivalen dan cenderung mencair. Globalisasi juga mendorong masyarakat dunia lebih perhatian terhadap kultur masyarakat lainnya, maupun berbagai aspek perbedaan budaya. Banyak ahli berpendapat bahwa kemajuan suatu negara ditentukan oleh sikap dan budaya rakyat atau warga negaranya yang terbiasa berperilaku demokratis, kritis dan partisipatif. Hal ini merupakan salah satu indikator determinasi di mana suatu negara dapat dikatakan negara demokratis, dengan segala perangkat budaya yang menyertainya. Pada titik inilah kemudian budaya politik tersebut penting untuk difahami secara lebih mendalam terutama bagi para pemerhati politik itu sendiri.

## A. Definisi Budaya Politik

Sebelum membahas budaya politik lebih jauh, alangkah baiknya jika kita membahas definisi dan maksud budaya politik itu sendiri, baik secara etimologi maupun terminologi. Karena langkah ini akan sangat memudahkan dalam memahami berbagai aspek berikutnya yang menjadi pembahasan terkait budaya politik.

Dilihat secara etimologis budaya politik terdiri dari dua kata, kata budaya dan politik. Budaya berasal dari bahasa Sansekerta yakni *buddhaya*, yang merupakan bentuk jamak dari "*buddhi*" yang berarti budi atau akal. *Budhaya* atau kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa asing, kita sering menjumpai istilah *culture*, *cultus*, yang artinya sama dengan dengan budaya atau kebudayaan.<sup>1</sup> Dalam aras yang lebih luas E.B. Taylor, mengartikan kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup segala sesuatu yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan batasan ini, berarti kebudayaan terdiri atas segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif atau mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan (besikap), dan bertindak.

---

<sup>1</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2011), 147.

Sedangkan politik itu sendiri, merupakan kata yang sudah sangat familiar dan jamak kita pahami selama ini. Dimana politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*polis*” atau kota, negara kota. Dari *polis* berkembang konsep *polites* yang bermakna warga negara dan konsep *politicos* yang berarti kewarga negaraan. Plato dan Aristoteles seperti yang dikutip Budiardjo menganggap “*politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik”.<sup>2</sup> Secara umum politik dapat kita maknai sebagai tindakan nyata setiap individu atau kelompok untuk membentuk sebuah Negara yang didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan, kebijakan yang dibuat dalam bentuk undang-undang, baik terkait pembagian kekuasaan, proses pemilihan pemimpin, lembaga-lembaga Negara, lembaga politik, aktor-aktor politik, untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan antara pemerintah dan masyarakat.

Berangkat dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat kita lihat bahwa budaya memiliki ruang lingkup yang cukup luas didalamnya mencakup pola pikir, sikap, perilaku (tindakan), dan peralatan. Sementara itu, politik bertalian dengan kebijakan dan pemerintahan. Oleh karena itu, budaya politik secara umum dapat dimaknai sebagai pola pikir, sikap, perilaku, dan peralatan berkenaan dengan kebijakan dan pemerintahan. Dalam sikap politik yang dilandasi kearifan dapat tumbuh kebajikan politik (*political virtue*). Contoh peralatan dalam budaya politik yaitu alat komunikasi massa (*mass communication media*) yang termasuk ke dalam infrastruktur

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 14.

politik di samping empat infrastruktur politik lainnya yakni partai politik (*political party*), golongan kepentingan (*interest group*), golongan penekan (*pressure group*), dan tokoh politik (*political figure*).

Menurut Miriam Budiardjo, salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (*political culture*) yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik.<sup>3</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Rusadi Kantaprawira dalam memberikan pemahaman terhadap budaya politik lebih menekankan pada unsur pola tingkah laku politik individu, sebagaimana yang ia kemukakan, bahwa: Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu inheren (melekat) pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 49.

individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern.<sup>4</sup>

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula ke dalam pembentukan struktur<sup>5</sup> dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah (an), karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang.<sup>6</sup>

Sedangkan Soetjipto Wirosardjono, menjelaskan bahwa Budaya politik merupakan satu sisi penampilan dari kebudayaan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, orang akan sia-sia membayangkan sebuah tatanan dan perilaku politik,<sup>7</sup> semata-mata berdasarkan rujukan konstitusi. Juga tidak akan memadai mengukur derajat demokrasi atau konstiusionalnya konduk kenegaraan, semata-mata dari ukuran hadirnya kelembagaan politik dan wahana kedaulatan rakyat yang ada. Budaya politik merupakan rangkuman dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut. Di samping hadir dan berfungsinya kelembagaan politik yang ada, juga tak kalah pentingnya

---

<sup>4</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1977), (Bandung: CV. Sinar Baru, 1988), 25.

<sup>5</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, 40.

<sup>6</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, 25.

<sup>7</sup> Lihat dalam Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, 26.

peluang dan kendala pemanfaatan (*exercise*) wahana kedaulatan rakyat itu. Budaya politik hakikatnya juga mengandung dimensi pendidikan politik dan hasil guna serta daya guna berfungsinya lembaga dan wahana itu dalam kondisi nyata kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.<sup>8</sup>

Kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Dengan kata lain, budaya politik suatu bangsa dapat didefinisikan sebagai pola distribusi orientasi-orientasi yang dimiliki oleh anggota masyarakat terhadap objek-objek politik atau bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat itu. Lebih jauh dinyatakan, bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik. Rusadi Sumintapura menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan

---

<sup>8</sup> Soetjipto Wirosardjono, *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-esai Tentang Agama, Negara, dan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 1995), 107.

orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.<sup>9</sup>

Masih senada dengan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, *Almond* dan *Verba* mendefinisikan budaya politik sebagai: “Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.”<sup>10</sup> Larry Diamond menyatakan bahwa budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide, sentimen dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu. Sementara itu, Samuel Beer menyatakan bahwa budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa budaya politik cenderung dipahami sebagai sikap dan perilaku (tindakan) politik individu atau kelompok dalam kehidupan politik pada suatu sistem politik. Rumusan tersebut dapat dimaknai sebagai pengertian budaya politik dalam arti sempit. Namun, apabila ditarik dari dua variabel budaya politik yaitu budaya dan politik, maka budaya politik mencakup pola pikir,

---

<sup>9</sup> Rusadi Sumintapura, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1988),. 23.

<sup>10</sup> Verba dalam Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Pelajar,) 101.

<sup>11</sup> Herning Suryo, *Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan*, Dalam *Jurnal Transformasi* Vol. 1 No. 27 Tahun 2015, 33.

sikap, perilaku (tindakan), dan peralatan berkenaan dengan kebijakan dan pemerintahan bagi perorangan atau kelompok dalam suatu sistem politik. Rumusan terakhir ini dapat dimaknai sebagai pengertian budaya politik dalam arti luas.

Selain itu menjadi semakin jelas jika budaya politik yang terbentuk didalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh dimensi psikologis suatu sistem tatanan sosial yang sudah ada jauh sebelumnya, seperti sikap, sistem kepercayaan, atau simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat sekaligus harapan-harapannya. Alfian, menganggap bahwa lahirnya budaya politik juga sebagai bentuk pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat.<sup>12</sup> Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian nampaknya menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu terbentuknya orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.<sup>13</sup>

Secara lebih operasional kemudian Almond dan Powell juga mencatat, bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan rasa percaya

---

<sup>12</sup> Dr. Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), 244-245.

<sup>13</sup> Dr. Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 24.

(*trust*) dan permusuhan (*hostility*).<sup>14</sup> Perasaan ini dalam realitas sosial berwujud dalam kerjasama dan konflik yang merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain. Sebaliknya kelompok-kelompok yang bekerjasama memungkinkan timbulnya konflik. Dengan demikian, kerjasama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan masyarakat, tetapi juga merupakan ciri budaya politik.

Karena itu, menurut Almond dan Verba, pembicaraan mengenai budaya atau kebudayaan politik persis sama dengan kebudayaan ekonomi dan kebudayaan keagamaan. Perbedaannya hanya terletak pada objeknya. Objek kebudayaan politik adalah sistem dan proses politik, objek kebudayaan ekonomi adalah sistem dan proses ekonomi, sedangkan objek kebudayaan keagamaan adalah sistem dan proses religi.

Menyimak penjelasan di atas, tampaknya konsepsi budaya politik lebih sempit dan lebih terfokus daripada pengertian budaya secara antropologis, baik domain subjek yang hanya menekankan pada segi pikiran, perasaan, dan sikap manusia atau yang oleh Almond dan Verba disebut orientasi, maupun objeknya yang berfokus pada sistem politik dan bagian-bagiannya serta proses politik.

Dikatakan oleh Almond dan Verba, di dalam objek yang terfokus pada sistem politik terdapat tiga komponen yang saling

---

<sup>14</sup> Gabriel A. Almond and Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach* seperti dikutip Rusadi K, 1988, 42.

menunjang yaitu komponen kognitif, afektif, dan evaluatif.<sup>15</sup> Komponen Kognitif adalah Suatu komponen yang meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Hal ini berkaitan dengan aspek pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik. Komponen Afektif adalah Suatu komponen yang menunjuk kepada aspek perasaan atau ikatan emosional seorang individu terhadap sistem politik. Dan komponen Evaluatif adalah Suatu komponen yang berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik, selain itu juga menunjukkan pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik tentang kinerja sistem politik.

Adanya perbedaan tingkat pemahaman tentang perkembangan masyarakat pada setiap individu kemudian menyebabkan ketiga komponen tersebut saling berkaitan atau sekurang-kurangnya saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sehingga jika ditelisik semakin mendalam kita akan menemukan bahwa hakekat pokok dari budaya politik tersebut adalah menyangkut masalah nilai-nilai. Dimana nilai-nilai tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin atas suatu pandangan hidup. Nilai-nilai yang dimaksud ini berhubungan dengan masalah tujuan, seperti nilai-nilai pragmatis atau utopis sekalipun.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, 151.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut:

*Pertama:* bahwa konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non-perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan **Gabriel Almond** memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.

*Kedua :* hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari struktur dan fungsi dalam sistem politik seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, dengan melihat fokus yang diorientasikan, apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misal orientasi politik terhadap lembaga politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya.

*Ketiga :* budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per-individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara

secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

## B. Tipologi Budaya Politik

Seperti dikatakan oleh Almond dan Verba, jika budaya politik merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus individu terhadap objek-objek politik di antara masyarakat bangsa. Berdasarkan definisi ini, maka tipe budaya politik suatu masyarakat atau bangsa akan dapat terlihat setelah terlebih dahulu dilakukan pengamatan terhadap individu-individu atau kelompok masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dengan kata lain, definisi ini dapat digunakan untuk mengukur dan menilai budaya politik suatu masyarakat atau bangsa menurut tipe-tipe budaya politik tertentu.

Atas dasar itu, Almond dan Verba kemudian membagi budaya politik dalam tiga tipe, yakni *budaya politik parokial*, *budaya politik kaula atau subjek* dan *budaya politik partisipan*.<sup>17</sup>

*Pertama, budaya politik parokial (parochial political culture)* adalah spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik yang ada.

---

<sup>17</sup> Almond, dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (terj. Sahat Simamora), (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) 20-22.

Budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil, sehingga pelaku-pelaku politik belum memiliki tugas-tugas husus spesifik yang terencana dan terprogram. Tetapi peranan yang satu dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain seperti aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan peranannya baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun keagamaan atau spritual.

Dalam budaya politik parokial ini individu atau masyarakat sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik, situasi dimana para elite, ktua adat, kepala suku, atau pemimpin spiritual diberlakukan dengan sedemikian rupa. Pada budaya politik ini biasanya tidak adan ide yang berkembang cendrung monoton dan konvensional.<sup>18</sup>

Melihat beberapa point penjelasan di atas, kita dapat merumuskan beberapa ciri-ciri dari budaya politik parokial tersebut diantaranya:

- a. Frekuensi orientasi masyarakat terhadap dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali.
- b. Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus.
- c. Peran-peran pemimpin masyarakatnya sangat berperan baik dalam bidang politik, ekonomi dan keagamaan.

---

<sup>18</sup> Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006), 41-42.

d. Partisipasi masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya.

*Kedua, budaya politik subyek atau kaula*, biasanya memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang tinggi terhadap sistem politiknya, namun perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) sangat rendah. Subjek individual menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi, ia bahkan secara afektif mengorientasikan diri kepadanya, ia memiliki kebanggaan terhadapnya atau sebaliknya tidak menyukainya, dan ia menilainya sebagai otoritas yang absah.

Namun demikian, posisinya sebagai subyek (kaula) mereka pandang sebagai posisi yang pasif. Diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Mereka beranggapan bahwa dirinya adalah subyek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Dengan demikian secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi apalagi ditentang.

Dengan bahasan yang lebih sederhana bahwa budaya politik kaula adalah dimana posisi individu atau masyarakat lebih bersikap pasif atau patuh pada system (elite) dan keputusan (perundang-undangan) sehingga tidak terlalu jauh mau

melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara pada pemilihan.<sup>19</sup>

Sedangkan ciri-ciri dari budaya politik kaula tersebut diantaranya:

- a. Frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
- b. Pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan.
- c. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sistem politik.

*Ketiga, budaya politik partisipan* adalah suatu budaya politik dimana para warga masyarakat memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik dan administratif. Dengan perkataan lain, perhatian dan intensitas terhadap masukan maupun keluaran dari sistem politik sangat tinggi.

Dalam budaya politik ini partisipasi dirinya atau orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik, ia memiliki kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya. Dengan demikian, masyarakat dalam budaya politik partisipan ini tidak begitu saja menerima keputusan politik. Hal

---

<sup>19</sup> Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, 41-42.

ini karena masyarakat telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu.<sup>20</sup>

Adapun ciri-ciri dari budaya politik patisipan tersebut diantaranya:

- a. Masyarakat sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai penentu budaya politik.
- b. Masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan.
- c. Berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung.
- d. Masyarakat sudah ikut terlibat dalam sistem politik pemerintahan.

*Keempat, budaya politik campuran (mixed political cultures)* yaitu gabungan karakteristik tipe-tipe kebudayaan politik yang murni.

Lalu bagaimana kecendrungan model budaya politik Indonesia yang terbangun kuat hingga saat ini? Ditengah banyaknya keanekaragaman budaya yang ada, sehingga sudah pasti membawa pengaruh yang besar terhadap wajah budaya politik di negeri ini. Belum lagi ditambah dengan luas wilayah bangsa ini dengan geografis yang sangat luas. Ditambah lagi dengan kondisi yang agak sedikit sulit untuk mengidentifikasi

---

<sup>20</sup> Almond, dan Sidney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, 20-22.

wujud asli budaya politik Indonesia, namun yang dapat dilakukan adalah menggambarkan pola budaya politik dominan yang berasal dari kelompok etnis besar atau dominan, yaitu kelompok etnis Jawa. Budaya ini kemudian sangat mewarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik kalangan elit politik Indonesia pada umumnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, pendapat yang dikemukakan oleh Affan Gaffar dapat mengawalinya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam teori politiknya ia menyebutkan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia dengan kondisi tersebut, sejak awal membaginya menjadi tiga kelompok, yakni: *hierarkhi tegar*, *patronage (patron-client)*, dan *neo patrimonialistik*.

*Hierarki tegar* dapat dipahami sebagai sikap dimana dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial sangat kuat mempengaruhi cara pandang penguasa ke rakyat. Sehingga kalangan birokrat sering menampakkan diri dengan *selfimage* yang bersifat *benevolent*. Seolah-olah mereka sebagai kelompok pemurah, baik hati dan pelindung rakyat, sehingga ada tuntutan rakyat harus patuh, tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap penguasa akan menjadi ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, suatu upaya untuk melindungi hak mereka sendiri pun diartikan sebagai perlawanan pula. Dalam pemahaman budaya politik yang bersifat hierarkhi tegar maka pola hubungan yang terjadi terpisahkan antara penguasa (negara) dan yang dikuasai (rakyat).

Budaya politik *patronage* menurut Gaffar sebagai budaya yang paling menonjol di Indonesia. Pola hubungan dalam

budaya politik *patronage* ini bersifat individual, yakni antara si *patron* dan si *client*, majikan dan pembantu, atasan dan bawahan, dalam tempat dan kondisi tertentu juga terlihat pada hubungan guru dan murid. Antara keduanya terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga, dukungan, materi, dan loyalitas. Budaya-budaya politik semacam ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik KKN dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Berikutnya adalah budaya politik *neo-patrimonialistik* karena negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi disamping juga memperlihatkan atribut yang bersifat patrimonialistik. Ini mengandung pemahaman bahwa negara modern dan rasional akan didukung oleh birokrasi, namun dalam praktiknya pola tradisional dengan bercirikan patrimonialistik tetap ada dalam penyelenggaraan negara. Dalam model yang ketiga ini pola KKN lebih dapat ditutupi melalui tameng kebijakan atau hukum. Sehingga dalam tataran permukaan, masyarakat umum melihat bahwa sistem politik negara berjalan baik. Padahal sejatinya ia masih sebagai budaya politik yang bercirikan *patronage*.<sup>21</sup>

Pendapat di atas juga senada dengan apa yang sudah disebutkan jauh-jauh hari oleh Max Weber yang menyebutkan bahwa negara patrimonialistik memiliki sejumlah karakter, antara lain;

---

<sup>21</sup> Aos Kuswandi, *Membangun Gerakan Budaya Politik Dalam Sistem Politik Indonesia*, dalam *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 1, November 2010, 47.

- a. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya.
- b. Kebijakan seringkali bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik.
- c. *Rule of Law* bersifat skunder jika dibandingkan kekuasaan penguasa (*rule of man*).
- d. Penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan politik.

Memperkuat pendapat di atas, Herbert Feith, juga menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai dua budaya politik yang dominan, yakni *Aristokrat Jawa* dan *Wiraswata Islam*.<sup>22</sup> Secara sederhana aristokrat jawa yang ia maksud disini adalah kaum terdidik atau elit tokoh muda jawa yang tergabung dalam organisasi atau partai politik dengan ideologi nasionalis, sedangkan wiraswasta islam yang dimaksud disini adalah kaum terdidik atau elit tokoh muda yang tergabung dalam organisasi, atau partai politik dengan ideologi Islam. Perselisihan kuat antara kedua kelompok ini misalkan pernah terjadi saat sidang konstituante dalam rangka menyusun UUD untuk mengganti UUDS 1950. Aristokrat jawa misalkan menginginkan jika Negara harus berdasarkan pada nilai-nilai yang bersifat nasional atau Pancasila, sedangkan wiraswasta islam menginginkan syariat Islam atau berdasarkan ajaran Islam.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Clifford Gertz, yang mengelompokkan masyarakat Indonesia atas subbudaya politik,

---

<sup>22</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, 160.

yaitu *santri*, *abangan*, dan *priyayi*.<sup>23</sup> Ia menjelaskan jika santri yang dimaksud adalah varian masyarakat di Jawa yang taat kepada ajaran Islam, abangan lebih longgar dan tak terlalu taat pada ajaran Islam. Sedangkan priyayi adalah golongan bangsawan atau ningrat yang tak terlalu taat pada ajaran Islam, terpesona pada adat dan kebiasaan yang datang dari leluhur. Tipologi tersebut didasari dari proses pembacaan secara antropologis-geografis berdasarkan dari kelompok petani pedalaman Jawa dan Bali, masyarakat Islam pantai, dan masyarakat pegunungan, yang kemudian ia sebut secara keseluruhan sebagai pembacaan sosio cultural.

Sementara itu, Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, menyebutkan ada tiga model kebudayaan politik berdasarkan proporsi ketiga tipe budaya politik di atas sebagaimana disebutkan oleh Almond, yaitu<sup>24</sup> :

*Pertama*, masyarakat demokratis industrial: Dalam sistem ini jumlah partisipan mencapai empat puluh hingga enam puluh persen dari penduduk dewasa. Mereka terdiri atas para aktivis politik dan para peminat politik yang kritis mendiskusikan masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Mereka adalah kelompok-kelompok pendesak yang mengusulkan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara, jumlah yang berbudaya politik

---

<sup>23</sup> Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, 160.

<sup>24</sup> Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006), 42-43.

subyek kurang lebih tiga puluh persen sedangkan parokial kira-kira sepuluh persen. Pada kelompok ini dapat digolongkan sudah berada pada fase sistem sosial politik yang cukup modern sehingga masyarakatnya dominan kritis dan rasional karena secara geografis mereka tinggal di daerah perkotaan atau wilayah industri.

*Kedua*, masyarakat dengan sistem politik otoriter: Dalam sistem ini sebagian besar rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. Mereka mengakui pemerintah dan tunduk pada hukumnya, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Sebagian kecil rakyat lainnya berbudaya politik partisipan dan parokial. Kelompok partisipan berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha dan tuan tanah. Mereka menentang dan bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sementara kaum parokial yang sedikit sekali kontakannya terhadap sistem politik terdiri dari petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di perkebunan-perkebunan. Dalam kelompok ini dapat digolongkan masih berada pada fase menengah dengan sistem sosial politik yang masih sederhana namun cukup terbuka, cenderung secara geografis masih bermukim di wilayah pinggiran kota atau desa.

*Ketiga*, sistem demokratis praindustrial: Dalam sistem ini sebagian besar warganegaraanya menganut budaya politik parokial. Mereka hidup di pedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatannya mereka dalam kehidupan politik sangat kecil. Sementara itu, kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya berasal dari profesional terpelajar, usahawan, dan tuan tanah. Demikian pula proporsi jumlah

pendukung budaya politik subyek juga relatif kecil. Pada kelompok masih digolongkan berada dalam fase masyarakat dengan sistem sosial yang masih sangat sederhana, dan masih banyak mendiami di wilayah pedalaman atau desa dengan akses publik yang cenderung jauh dan sulit.

Dari pendapat di atas yang mencoba mengklasifikasikan model budaya politik di Indonesia terlihat cukup bervariasi, hal ini masih dianggap sangat relevan jika melihat kecenderungan adanya heterogenitas budaya dan suku yang ada, sehingga secara konseptual apa yang disebut budaya politik nasional adalah bentuk kombinasi antara semua subbudaya politik yang ada. Baik dari pengelompokan sosiokultural yang dikemukakan oleh Feith dan Geerts, maupun budaya politik daerah yang diangkat ketingkat nasional oleh para pelaku politik yang menyebabkan terjadinya interaksi antar subbudaya politik, yang bisa berwujud kerja sama, persaingan, bahkan pertarungan politik.

Dengan melihat penjelasan tersebut setidaknya perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat sebagai kunci utama perkembangan budaya politik masyarakat.
- b. Tingkat ekonomi masyarakat; semakin tinggi tingkat ekonomi/ atau tingkat kesejahteraan masyarakat, maka partisipasi masyarakat pun semakin besar.
- c. Reformasi politik atau political will (semangat merevisi dan mengadopsi sistem politik yang lebih baik) juga turut menjadi faktor.

- d. Supremasi hukum (adanya penegakan hukum yang adil, independen, dan bebas).
- e. Media komunikasi yang independen (berfungsi sebagai kontrol sosial, bebas, dan mandiri).<sup>25</sup>

Disisi lain jika ditelaah lebih jauh, kita akan melihat bahwa terdapat beberapa unsur juga yang berpengaruh dalam proses pembentukan budaya politik Indonesia tersebut, antara lain:

*pertama*, unsur subbudaya politik yang berbentuk budaya politik asal. Artinya budaya politik yang cenderung ditunjukkan dalam perilakunya dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan tempat tumbuh kembangnya, yang didalamnya ada fanatisme kesukuan, daerah, dan lainnya.

*Kedua*, aneka rupa sub budaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya asal itu berada. Dalam interaksi antar budaya politik asal dengan budaya politik dari luar, telah berlangsung suatu proses akulturasi budaya politik yang saling mempengaruhi.

*Ketiga*, budaya politik nasional itu sendiri. Peranan budaya politik nasional tergantung pada tahap yang telah ditempuh dalam proses pembentukannya. Pertumbuhan budaya politik nasional memiliki tiga tahap yaitu budaya politik nasional yang sedang dalam proses pembentukannya, telah mengalami proses pematangan, sudah mapan.

---

<sup>25</sup> Khoirul Saleh dan Achmat Munif, *Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi*, dalam Jurnal, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, 313.

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pematangan budaya politik Indonesia pada dasarnya melibatkan suatu tahap penyerasian antar sub-subbudaya politik dengan struktur politik nasional yang ada di berbagai wilayah nusantara. Menjadi wajar kemudian, jika terdapat bermacam pendapat mengenai model budaya politik Indonesia. Namun dalam hal ini, Nazarudin Syamsudin, menyebutkan bahwa budaya politik Indonesia kemudian semuanya bermuara dalam konsep dan semangat *Bhineka Tunggal Ika* yang merupakan bagian penting dari ideologi pancasila yang hingga saat ini masih teruji kuat masih menjadi simpul pemersatu bangsa kita, dan itulah yang menjadi wujud nyata dari budaya politik Indonesia yang sesungguhnya.

### **C. Realitas Budaya Politik Era *Post Truth***

Lalu bagaimana gambaran budaya politik yang sering terjadi dalam aktivitas politik masyarakat Indonesia dewasa ini? Nampaknya masih jauh panggang dari api, antara realitas yang terjadi dan kondisi ideal yang diharapkan. Dari berbagai fenomena yang terjadi masih mengindikasikan bahwa budaya politik Indonesia belum memiliki identitas yang jelas dan ajeg.

Realitas yang terjadi didalam realitas budaya politik akhir-akhir ini, mayoritas masyarakat menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya partisipan di pihak lain. Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat. Masih kuatnya hubungan paternalisme dalam budaya politik Indonesia menjadikan pola orientasi dan

sikap politik masyarakat menjadi bersifat patronage.<sup>26</sup> Hal ini nampak dalam pola-pola perilaku masyarakat termasuk pula dalam perilaku birokrat dan elite politik di pemerintahan kita. Budaya politik masyarakat lebih didominasi parokial kaula dan pada sisi lain diikat oleh primordialisme, maka hal ini cenderung tidak akan membangun demokrasi Indonesia yang konstruktif sarat kemajuan.

Nilai-nilai yang dianut masyarakat telah membatasi dirinya untuk tidak bebas bergerak, termasuk dalam pengambilan keputusan dibidang politik baik pada aras pemerintahan pusat maupun di daerah. Benturan-benturan nilai yang terjadi relatif tidak bisa berkolaborasi secara positif dengan etika dan prinsip-prinsip demokrasi modern yang ada seperti keadilan, keterbukaan, persamaan hak dimata hukum, dan kesejahteraan. Warga masyarakat telah terpolakan dalam budaya sungkan, dan ewuh pakewuh atau acuh tak acuh. Sehingga realitas yang terbangun di masyarakat saat berinteraksi dengan birokrat di dalam pelayanan birokrasi kita, budaya politik balas jasa seolah bagian yang telah menyatu dalam diri mereka dan membatasi diri dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Hal ini kemudian dapat menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya budaya politik konstruktif tersebut.

Jika dilihat lebih jauh, selain penyebab di atas, penyebab lain mengapa budaya politik masyarakat tidak berkembang secara konstruktif, salah satunya dikarenakan terjadinya krisis

---

<sup>26</sup> Aos Kuswandi, *Membangun Gerakan Budaya Politik Dalam Sistem Politik Indonesia*, 47.

keteladanan pada proses kaderisasi kepemimpinan didalam masyarakat sosial dan masyarakat politik. Krisis keteladanan menjadi salah satu penyebab muramnya wajah perpolitikan kita, dibuktikan betapa sulitnya kita menemukan sosok pemimpin yang mampu menjadi panutan bagi setiap masyarakat, jikapun ada sosok yang dapat dicotoh saat ini, itu tidak lepas dari kamufalse-kamuplase yang sengaja dilakukan dengan agenda setting tertentu.

Maka untuk membangun keteladanan sebagai wujud dari gerakan budaya politik Indonesia, diperlukan sikap dari para elite politik, pejabat negara dan tokoh-tokoh yang duduk pada lembaga tinggi maupun lembaga publik di tingkat daerah maupun pusat. Proses membangun kualitas keteladanan para pelaku politik tersebut memang tidak bisa berlangsung secara instan, karena harus terpolakan dan tersistematisasi atau terprogram secara baik, dan berjenjang. Hal tersebut jelas memerlukan upaya serius dari berbagai komponen bangsa dan para pengambil keputusan.

Dengan demikian, upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia bisa dilakukan melalui program pendidikan, baik jalur pendidikan formal melalui bangku kuliah di kampus, sekolah, dan pendidikan-pendidikan politik oleh lembaga dan partai politik, maupun non formal melalui advokasi-advokasi langsung ke masyarakat. Sebagai alasannya bahwa pendidikan tidak dapat terpisah dari struktur kebudayaan, di mana proses pendidikan itu terjadi. Artinya penanaman nilai-nilai positif bagi masyarakat bisa dimulai dari pendidikan ini. Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan dan ilmu

pengetahuan, tetapi merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan, terutama kebudayaan politik. Tentu saja nilai-nilai, norma, etika dan cara bersikap dalam berpolitik merupakan bagian utama yang diberikan dalam program pendidikan tersebut nantinya.

Terutama dalam hal pendidikan politik tersebut, peranan partai politik sangatlah penting. Sebagai lembaga yang merepresentasikan kelompok masyarakat politik dalam ideologi maupun nilai-nilai yang dianut, harus mampu menjadikan dirinya sebagai mesin produksi SDM unggul berkualitas yang sarat dengan pengalaman dan integritas, sehingga dapat berperan besar bagi perubahan orientasi dan sikap politik masyarakat, dan partai politik harus bisa menjadi rumah siapapun yang hendak belajar politik, tanpa membedakan asal usul dan latar belakang, bukan sebaliknya hanya menjadi rumah bagi keluarga, kolega atau kelompok yang orang yang menjadi pemilik atau pengurus yang menguasai partai, atau kondisi yang lebih parah, partai hanya menjadi milik elit yang punya modal dan uang saja, yang akhir-akhir ini cenderung tampak menguat menjelang momentum politik, jika pendidikan politik tersebut dapat diatensi sedemikian rupa, maka proses kaderisasi akan semakin baik dan kadernya menjadi semakin berkualitas dan berintegritas.

Selain itu, kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) dan LSM yang berorientasi pada peningkatan kapasitas warga masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun perbaikan budaya politik Indonesia. Karena kelompok ini memiliki predikat

sebagai masyarakat yang melek politik. Di dalamnya terdiri dari individu-individu yang mengerti dan memahami sistem politik dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Idealnya Ormas dan LSM ini harus mengambil andil dalam proses gerakan membangun budaya politik. Peran serta yang dapat dilakukan adalah melalui pendampingan, advokasi dan peningkatan kapabilitas masyarakat melalui pelatihan dan kegiatan lainnya. Bukan sebaliknya, malah elit ormas dan LSM tersebut justru terjebak sebagai “makelar” politik atau proyek yang terus mengambil keuntungan pribadi dengan menjual atas nama aspirasi masyarakat, yang juga akhir-akhir ini menggrogoti elit-elit ormas dan LSM kita di daerah maupun di pusat.

Maka untuk membangun gerakan budaya politik yang konstruktif seperti diuraikan di atas, hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena ini terkait dengan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan politik. Tujuannya ke depan agar dalam setiap perhelatan politik, maupun proses dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan main dan UU yang berlaku. Masyarakat akan semakin dewasa dalam berpolitik dan tingkat konflik politik semakin berkurang, sehingga stabilitas politik negara akan tetap terjaga dalam koridor hukum yang menjadi landasan pijaknya.

Komitmen yang tidak kalah penting juga dalam upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia tersebut adalah kesadaran bersama secara kolektif akan tanggung jawab segenap elemen bangsa, mulai dari akademisi, politisi, birokrat, dan siapapun yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang

bersinggungan dengan aktifitas politik untuk secara bersama-sama menyadari pentingnya membangun budaya politik yang beradab tersebut. Ini bertujuan agar pola-pola tindakan politik warga negara dapat terarah dan terprogram menuju pada proses pencapaian kesejahteraan masyarakat mulai dari hulu hingga ke hilir, terhadap semua rakyat Indonesia.

#### **D. Budaya Politik Pesantren: Telaah Pola Hubungan Kiyai dan Santri dalam Patronase Politik**

Masih berkaitan dengan pembahasan model-model budaya politik di atas, pembicaraan tentang karakteristik budaya politik terkait pola hubungan kiyai (atau *tuan guru* dalam istilah orang Sasak Lombok) dan santri di pondok pesantren menjadi salah satu elemen penting yang terus aktual dan menarik untuk diulas, seolah tidak ada habisnya untuk dicermati. Keberadaan kiyai dalam pesantren sangat sentral sekali. Suatu lembaga pendidikan Islam disebut pesantren apabila memiliki tokoh sentral yang disebut kiyai. Jadi kiyai dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai dengan pola yang dikehendaki. Ditangan seorang kiyailah pesantren itu berada. Oleh karena itu kiyai dan pesantren merupakan dua sisi yang selalu berjalan bersama. Bahkan kiyai bukan hanya pemimpin pondok pesantren bahkan pemilik pondok pesantren.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Lihat Bahri Ghazali, *Pesantren Berwawasan Lingkungan* (Jakarta: Prasasti, 2002), 21.

Bahkan lebih jauh menurut Zamakhsyari Dhofier, kiyai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Tidak seorang pun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kiyai dalam lingkungan pesantrennya, kecuali kiyai lain yang lebih besar pengaruhnya. Para santri selalu berharap dan berfikir bahwa kiyai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri, baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren. Profesi mereka sebagai pengajar dan penganjur Islam membuahkan pengaruh yang melampaui batas-batas desa, bahkan kabupaten, dimana pesantren mereka berada.<sup>28</sup>

Selain itu, para kiyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, seringkali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan tuhan dan rahasia alam, hingga mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan masyarakat awam. Dalam beberapa hal mereka menunjukkan kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan simbol kealiman, yaitu kopiah dan surban.<sup>29</sup> Kiyai bukan hanya mengabdikan diri kepada tuhan, tetapi juga ia dapat melakukan kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, politik. Para kiyai mengajarkan segala bidang kegiatan dalam hubungannya dengan Al-Quran

---

<sup>28</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1988., 56.

<sup>29</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, 56.

dan Hadis, maka pengaruh terhadap santri dan masyarakat sekitarnya sangat besar.

Apalagi pesantren-pesantren yang berlokasi di pedesaan, otoritas kiyai begitu dominan dan sangat dihormati oleh santri (hubungan *patron-client*<sup>30</sup>). Santri mempunyai kewajiban taat dan tunduk kepada kiyai hampir-hampir sampai pada batas mutlak. Deliar Noor bahkan mengatakan bahwa kiyai dianggap sebagai orang "*ma'sum*" tanpa salah.<sup>31</sup>

Sehingga nilai kepatuhan dan keterikatan yang tinggi para santri terhadap kiyai dan warga sangat tinggi, merupakan tradisi unik dan khas yang dibangun melalui pendidikan pesantren.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Kata *patron* berasal dari bahasa latin *pater* yang berarti bapak, dari *pater* berubah menjadi *patri* dan *patronis* yang berarti bangsawan atau *patricius* yang berarti seorang yang dianggap sebagai pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi pengikutnya. Sedangkan klien atau *client* berasal dari kata *cliens* yang berarti pengikut. Jadi *patron-client* merupakan hubungan tidak setara yang terjalin secara perorangan antara seorang pemuka masyarakat (*patron*) dengan sejumlah pengikutnya (*client*). Hubungan itu biasanya berdasarkan pertukaran jasa, dimana ketergantungan *client* pada *patron* diimbali oleh perlindungan *patron* pada *cliennya*. Lihat penjelasan ini dalam Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 41. Biasanya hubungan *patron-client* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, adanya ketidakseimbangan status antara *patron* dan *client*. Kedua, meskipun *patron* juga mengharapkan bantuan dari *client*, tetapi kedudukan *patron* lebih tinggi dari *client*. Ketiga, ketergantungan *client* pada *patron* karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan *client* dari *patron* yang menyebabkan adanya rasa utang budi *client* pada *patron*. Keempat, utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan. Lihat dalam Philipus juga, 44.

<sup>31</sup>Lihat dalam bukunya Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dan Pacasila Sebagai Dasar Negara* (Jakarta: LP3ES, 2002), 58.

<sup>32</sup> Dalam konteks ini antar tradisi pesantren dalam organisasi NW dan NU sama, dalam arti pola dan model hubungan santri dan kiyai serta jama'ah

Hal ini terjadi karena pondok pesantren merupakan dasar dari bangunan struktur sosial agama Islam. Tradisi pesantren disini juga mempunyai kaitan yang erat dengan budaya masyarakat, yang merupakan basis mobilisasi lewat kekuatan emosi dan perilaku, dan terfokus pada norma atau nilai. Antara mobilisasi dan organisasi memiliki kaitan yang sangat erat, terutama tradisi dalam organisasi agama yang berperan penting sebagai basis untuk mengorganisasikan masyarakat agama untuk mewujudkan tujuan tertentu. Misalnya, kesetiaan santri dan masyarakat (*jama'ah*) direfleksikan dalam tata ibadat ataupun dalam kegiatan organisasi serta pemilu. Dari situlah kepemimpinan dapat ditegakkan, baik di bidang keagamaan maupun dalam pemilu untuk memobilisasi, dilandasi oleh hubungan yang kuat antar kiyai dan santri. Pola hubungan ini telah menjadi semacam tradisi yang melekat pada masyarakat dan belangsung secara turun-temurun.

Pola hubungan kiyai-santri yang signifikan itu cukup menunjukkan tingkat kepatuhan dan rasa utang budi yang sangat tinggi atas pengajaran kiyai, dan mentradisi dari generasi ke generasi yang didasarkan pada aspek religius (agama) yang begitu kuat dan mengikat antara keduanya, atau keduanya, atau yang sering disebut dengan “tradisi pesantren”.<sup>33</sup> Tradisi ini dibangun dan dipertahankan melalui transemisi ilmu, ataupun

---

memiliki corak kepatuhan dan ketaatan yang sama. Sehingga tradisi pesantren dalam NW dan NU memiliki kesamaan.

<sup>33</sup> Lihat Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: UIP, 2008), h. 47.

hubungan kekerabatan melalui sistim perkawinan di antara keluarga kiyai.

Sikap tradisi semacam ini telah melahirkan sikap tersendiri terhadap politik. Sikap itu, bukan hanya peristiwa dan kegiatan politik, dianggap bagian integral dalam agama, tetapi juga tindakan-tindakan politiknya, baik yang sifat kompromisme ataupun radikalisme terhadap pemerintah. Dalam kehidupan politik, biasanya kaum santri — lewat kiyainya — menunjukkan sikap; sikap yang tidak kompromistis atau sikap yang sebaliknya.<sup>34</sup>

Salah satu contoh real terkait tradisi pesantren tersebut misalnya masih terbudaya kuat seperti yang ada dalam pesantren yang umumnya di hampir seluruh NTB khususnya di Organisasi NW. Dimana tradisi pesantren sangat erat dengan organisasi NW karena pesantren merupakan basis struktur sosial agama Islam dan NW yang terbentuk serta menyebar melalui relasi guru dan murid.<sup>35</sup> Tradisi pesantren berkaitan dengan sistem pendidikan ilmu agama Islam antara kiyai dan santri dimana santri menaati ajaran agama Islam dan status kiyai dalam lingkungan pondok pesantren peroleh secara turun temurun. Organisasi NW dan warga NW sangat berpegang teguh pada tradisi pesantren, yang menempatkan hubungan antara kiyai dan santri sebagai faktor yang sangat dominan dan selalu menjadi target oleh banyak kalangan dalam perolehan

---

<sup>34</sup> Lihat Kang Young Soon, *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*, h. 48.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ust. Drs. Kholidi, M. Pd, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 22 Januari 2013.

suara pada setiap pemilu,<sup>36</sup> yang dalam kajian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari faktor yang mendorong terciptanya perilaku politik dalam NW. Kuatnya jaringan relasi antara kiyai-santri dalam NW kemudian membentuk hubungan yang solid dan sulit dipisahkan, bahkan terlembagakan dalam bentuk organisasi NW itu sendiri.

Sehingga, hubungan kepatuhan dan keterkaitan antara tuan guru dan santri dalam tradisi pesantren NW terwujud pula dalam kehidupan politik, terutama dalam pengembangan partisipasi politik masyarakat. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan tuan guru adalah keturunan darah biru dari tokoh-tokoh atau pemimpin pada masanya, dan sudah sering terlibat dalam percaturan politik daerah khususnya di Lombok dan umumnya di NTB dan bahkan percaturan politik nasional, dari dulu hingga sekarang. Ini setidaknya dapat ditelaah atau diamati melalui gerakan kulturalnya. Maka disinilah letak peranan tradisi pesantren antara hubungan tuan guru dan santri atau jama'ah dalam kepolitikan NW.

Oleh sebab itu, potensi politik NW dalam konteks daerah memang sangat besar, karena adanya hubungan patronase yang kuat antara santri dan tuan guru. Apapun yang dikatakan dan diperintahkan oleh tuan guru kepada santri maka santri akan senantiasa dengan senang hati mengikutinya dan mentaatinya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ust. Drs. H. Humaidi, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 20 Desember 2012.

<sup>37</sup>Lihat Khirjan Nahdi, *Nahdlatul Wathan dan Peran Modal: Studi Etnografi-Historis Modal Spiritual dan Sosiokultural*, 133.

Apalagi pada umumnya jika para santri akan terjun ke masyarakat, maka ia selalu meminta nasihat dari tuan gurunya dalam hal bertingkah laku dan bersikap. Sikap ini juga tercermin dalam kehidupan politik atau dalam aktifitas politik. Misalnya ketika banyak partai bermunculan para santri atau jama'ah NW akan bertanya kepada tuan gurunya tentang partai mana yang benar dan yang terbaik yang akan dipilih. Tuan guru akan memberi masukan mana yang terbaik yang akan dipilih, dan santri dan jama'ah NW akan memilih sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh tuan guru.

Maka dalam konteks ini, tuan guru kadang terlihat berperan sebagai individu yang memberikan advokasi terhadap kepentingan umat dan santri, atau juga sebagai mediator di antara kelompok-kelompok kepentingan. Berperan sebagai advokator bilamana mereka aktif melakukan pembelaan terhadap rakyat lemah dalam menghadapi persoalan. Sedangkan tuan guru disebut sebagai mediator bilamana ia bertindak sebagai penghubung antara berbagai kelompok kepentingan.<sup>38</sup>

Dalam melakukan peran itu, umumnya tuan guru kadang terus berdialog dan menjalin komunikasi aktif dengan perwakilan santri atau jama'ah yang menanyakan apa yang diinginkan santri tersebut, lalu tuan guru memberikan solusi. Disinilah letak kearifan tuan guru, yakni memberi keleluasaan pada para santri dan jama'ah NW untuk melihat dan memutuskan sendiri pilihannya secara objektif. Namun, banyak

---

<sup>38</sup>Lihat Imam Suprayoga, *Kiyai dan Politik Membaca Citra Politik Kiyai* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 46.

juga tuan guru yang menentukan pilihan santrinya dan jama'ah, tanpa memberi alasan apapun. Jika tuan guru mengatakan partai A yang bagus maka santri harus ikut untuk memilih partai A tanpa harus bertanya dan tau alasannya, dan seterusnya.<sup>39</sup>

Demikian juga para santri sangat mematuhi dan menghormati para elit politik NW dan elit politik lainnya yang bukan warga NW, sebagaimana dia menghormati tuan gurunya. Jika seorang elit politik dihargai oleh tuan guru, sekalipun dia bukan warga NW, maka para santri dan jama'ah NW juga akan bersikap demikian. Akan tetapi sebaliknya, jika elit politik bukan NW atau NW sekalipun, tidak dihargai atau kurang dihargai oleh tuan guru, maka santri dan jama'ah pun akan ikut-ikutan kurang menghargai elit politik tersebut.

Ketaatan santri terhadap tuan guru ini disebabkan karena santri tersebut telah belajar langsung dari tuan gurunya. Namun jika seorang santri tidak pernah belajar pada seorang tuan guru maka penghormatannya hanya didasarkan pada kapabilitas ilmu pengetahuan keagamaan yang dimilikinya oleh seorang tuan guru pada umumnya.<sup>40</sup>

Disamping pengaruh hubungan unik tuan guru-santri sebagaimana dijelaskan di atas, tuan guru juga sangat mempengaruhi jama'ah NW melalui kedudukannya dalam

---

<sup>39</sup>Dituturkan oleh Ust. Drs. H. Humaidi, dalam Wawancara di Pancor Lombok Timur pada tanggal 20 Desember 2012.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Ust. H. Syahdan, S.Ag, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 22 Januari 2013.

struktur atau hierarki NW. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak kelahirannya, NW dikenal sebagai organisasi keagamaan yang unik dan khas di Lombok. Alasan didirikannya organisasi ini adalah untuk memperjungkan pendidikan dan memperbaiki kualitas hidup orang Lombok baik dalam keberagaman maupun dalam kehidupan bersosial. Oleh karena itu, NW memiliki dua dimensi, dimensi struktural dan dimensi kultural.<sup>41</sup> Dimensi struktural adalah dimana NW merupakan organisasi yang memiliki susunan struktur kepengurusan dari tingkat pengurus besar sampai pengurus ranting, dan tercermin dalam kepengurusan NW. Sedangkan dimensi kultural adalah dimana NW terdiri dari kelompok masyarakat santri dan jama'ah (pesantren dan warga NW). Sehingga dua dimensi dalam organisasi NW ini juga dapat menjadi pola dalam melihat hubungan santri dengan tuan guru dalam politik, dan menjadi ciri khas dari organisasi NW.

Dengan demikian, fenomena hubungan tuan guru dengan santri di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mahrus Irsyam yang menyebutkan misalnya terdapat dua pilar kekuatan politik NU yaitu: satu, basis massa (struktur sosial), yang bertumpu pada massa pondok pesantren yang umumnya terdapat di daerah pedesaan, dimana keduanya tampak utuh sebagai satu kesatuan, kedua, basisi ulama-politisi yang digambarkan memiliki konsistensi gerakan karena berfungsinya struktur yang saling melengkapi; struktur formal yang diatur

---

<sup>41</sup> Lihat penjelasan lebih rinci dalam bukunya Khirjan Nahdi, *Nahdlatul Wathan dan Peran Modal: Studi Etnografi-Historis Modal Spiritual dan Sosiokultural*, 183-187.

secara organisasi dan struktur non-formal yang tumbuh dari interaksi antara ulama dan politisi, tradisi yang dimanifestasikan dalam pola hubungan ulama-poliitsi-massa (santri dan jama'ah) menjadi tradisi-tradisi yang dianut secara teguh.<sup>42</sup>

Walaupun hal itu merupakan pilar kekuatan dalam politik NU, tapi setidaknya dalam pilar kekuatan politik NW juga terdapat corak dan model yang sama. Karena NW juga terbangun dan tersebar luas melalui basis pesantren yang di dalamnya terdapat peran penting tuan guru dan ulama yang memiliki gerakan dan komitmen kuat dalam membangun tradisi keilmuan dan kekuatan sosial, baik secara kultural dan juga melalui organisasi struktural yakni NW. Oleh sebab, itu dalam hal ini NW juga dapat dikatakan memiliki dua pilar kekuatan politik yakni, basis massa (struktur sosial), yang bertumpu pada kekuatan jaringan pondok pesantren dan basis tuan guru dan politisi.

---

<sup>42</sup> Lihat Mahrus Irsyam, *Bendera Hijau dan Cakrawala Politik Indonesia*, dalam *Majalah Panji Masyarakat*, No.283, 1981, 37-39.



## **BAB V**

# **DESIMINASI PERILAKU POLITIK LEWAT PEMILU**

**S**etelah bangsa Indonesia resmi diproklamlirkan merdeka, maka Indonesia wajib mempertahankan kemerdekaannya tersebut, salah satu caranya adalah dengan memiliki pemerintahan dan penyelenggaraan Negara yang sah dan berdaulat. Pemerintahan dan penyelenggaraan Negara yang sah dan berdaulat tersebut dihasilkan lewat proses-proses yang demokratis sesuai amanat yang tertuang dalam dasar Negara kita.

Dengan demikian, pemerintahan dan penyelenggara Negara yang sah dan berdaulat tersebut dihasilkan lewat pemilu yang demokratis. Selama ini Indonesia telah mengelat pemilu puluhan kali, dengan segala dinamika dan sejarah yang mengiringinya, mulai dari proses penyelenggaraannya, partai peserta pemilu, pemenang pemilu dan seterusnya. Untuk mengetahui lebih jauh semua ini, dapat dibaca dalam pembahasan dibawah ini.

## A. Demokratisasi Lewat Pemilu

Dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Artinya, demokrasi memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, di antara kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintahan, kelompok dan pemerintahan, bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>1</sup> Ini juga sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Ayat 3 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, yang menyatakan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar otoritas sebuah pemerintah.<sup>2</sup> Dalam kesempatan yang lain, Ahmed Vaezi juga menegaskan bahwa demokrasi tidak saja ideal tapi juga dalam prakteknya membutuhkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan tertentu. Suatu pemerintah demokratis sejati hanya dapat dibentuk dalam kultur politik yang dengan gigih mendukung persamaan hak-hak dan kebebasan.<sup>3</sup> Itulah sebabnya mengapa pendukung demokrasi selalu menekankan hubungannya dengan kebebasan dan memandang demokrasi sebagai sitem politik yang terbaik dan secara maksimal

---

<sup>1</sup> Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1999) cet. 4, 228.

<sup>2</sup> Guy S. Godwin-Gill, *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional*, (Jakarta: Piraq Kerjasama dengan The Asia Foundation, 1999), 1.

<sup>3</sup> Ahmed Vaezi, *Agama dan Politik Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Citra, 2006), 216-217.

melindungi kebebasan umum seperti kebebasan beropini, berekspresi, dan bahkan beragama.

Sehingga dalam konteks kebebasan, keterbukaan dan persamaan itulah demokrasi menjadi alternatif pilihan yang diterapkan dalam sistem pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, apalagi jika melihat latar belakang bangsa Indonesia yang sangat majemuk, terdiri dari bangsa-bangsa dan suku yang berbeda. Dalam konteks ini tentu demokrasi menjadi pilihan yang paling tepat. Kaitan dengan itu, dalam sistem pemerintahan yang demokratis maka pemilu<sup>4</sup> merupakan sebuah sikap yang sangat terbuka terhadap adanya perbedaan, karena didalamnya nanti akan terdapat berbagai macam pilihan beragam dan berbeda.

Disejumlah negara yang menerapkan atau setidaknya mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dan suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat

---

<sup>4</sup> Secara sederhana pemilu dapat diartikan sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu dalam sebuah pemerintahan. Atau secara lebih konseptual pemilu merupakan sebuah metode untuk menterjemahkan pilihan warga ke dalam kursi badan perwakilan, sebagai wujud penranseferan kedaulatan rakyat kepada wakilnya. Lihat misalnya, Arend Lijphart yang dikutip oleh Dhurorudhin Mashad dalam bukunya *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999). 1.

warga negara.<sup>5</sup> Alasannya, pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintahan. Apapun alasannya hanya pemerintahan yang representatif yang dianggap memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengatur pemerintahan. Dengan melalui pemilu pula, maka kalaim bahwa jajaran elite pemerintah bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi dapat diakui.

Sehingga pemilu menjadi semacam sebuah keniscayaan dalam proses demokrasi. Apalagi Negara Indonesia yang berdasarkan pancasila telah mendeklarasikan diri sebagai negara yang demokratis, maka sangatlah wajar dan nalar apabila instrumen pemilihan umum sebagai cara untuk memulai melembagakan tatanan baru tersebut.<sup>6</sup> Dengan demikian pemilu Ibarat pohon besar, yang merupakan proses metamorfosis pergantian daun dan ranting yang baru dan segar, menggantikan daun dan ranting yang sedang menguning. Melalui pemilu, rakyat hendak memperbarui kontrak sosial dengan wakilnya baik di eksekutif maupun legislatif atau mungkin akan memillih putra-putri terbaik bangsa atau daerah yang lain.<sup>7</sup> Karena melalui proses pemilu akan memungkinkan terjadinya proses demisioner dari pejabat lama ke pejabat baru

---

<sup>5</sup> Lihat Dhurorudhin Mashad dalam bukunya *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999). 1.

<sup>6</sup> Lihat Matori Abdul Jalil, *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, (Jakarta: KIPP Jakarta, 1999), 33.

<sup>7</sup> Lihat Komaruddin Hidayat, *Politik Panjat Pinang, Dimanakah Peran Agama*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), cet. I. 49

yang terpilih, tapi jika incumben yang memenangkan pemilu, maka pemilu lebih kepada pembaruan kontrak politik atau memperkokoh kekuasaannya kembali.

## **B. Hakikat Pemilu: Pembaruan Kontrak Sosial**

Dalam negara yang menerapkan demokrasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan, pemilu merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal, pemilu atau general election bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh konstitusi.<sup>8</sup> Dan secara teoritis normatif Komaruddin Hidayat menyatakan pemilu merupakan moment untuk menjaring wakil rakyat dan presiden serta wakilnya yang memperoleh mandat dan kepercayaan rakyat karena pertimbangan integritas dan kompetensinya.<sup>9</sup> Dengan harapan masyarakat dapat segera mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Dengan demikian, pemilu menjadi prasyarat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara demokratis sehingga melalui pemilu sebenarnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan secara tidak langsung akan: *pertama*, memperbarui kontrak sosial; *kedua*, memilih pemerintahan baru; dan *ketiga*,

---

<sup>8</sup> Lihat Caroline Paskarina dan Dede Mariana, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 5

<sup>9</sup> Komaruddin Hidayat, *Politik Panjat Pinang, Dimanakah Peran Agama*, 56

menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru.<sup>10</sup> Tiga hal ini menjadi penting karena pada dasarnya dan substansinya pemilu merupakan moment untuk mencoba membangun sistem dan pelaksanaan pemerintahan kedepan yang lebih baik.

Istilah kontrak umumnya kita kenal dalam ilmu hukum dan ekonomi yang mengandung makna sebagai sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang berkepentingan, dimana kedua belah pihak menyepakati sejumlah persyaratan yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dan dalam kajian ilmu politik, istilah kontrak digunakan oleh J.J. Rousseau (kontrak sosial) untuk menyebutkan konsep negara yang dilandasi perjanjian antara pemerintah dan yang diperintah atau antara rakyat dan penguasa.<sup>11</sup> Namun, hakikat maknanya sama dengan kontrak dalam ilmu hukum maupun ilmu ekonomi, yakni adanya pihak-pihak yang bersepakat mengadakan perjanjian untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah ikatan yang berkekuatan secara hukum.

Sebagai suatu bentuk kontrak sosial, pemilu memuat perjanjian antara rakyat dengan mereka yang diberi mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kontrak ini dibuat dengan partai pemenang pemilu sebagai bukti bahwa program-programnya sesuai dengan aspirasi rakyat. Ketika seseorang memberikan suaranya pada salah satu partai atau kandidat,

---

<sup>10</sup> Caroline Paskarina dan Dede Mariana, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, 5

<sup>11</sup> Caroline Paskarina dan Dede Mariana, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, 5

maka hakikatnya suara tersebut menjadi simbol persetujuan rakyat terhadap program-program partai atau kandidat yang bersangkutan. Dengan model dan harapan seperti itu rakyat secara tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap terlaksananya tantan demokrasi yang terbuka dan akuntabel.

Tentunya, sebagai konsekuensi dari kontrak sosial yang baru tersebut, maka akan terbentuk pemerintahan yang terdiri dari mereka yang terpilih dalam pemilu. Pemerintah baru inilah yang kemudian akan bekerja sesuai kontrak yang telah disepakati dalam pemilu. Sebagai suatu kontrak, idealnya rakyat telah mengetahui isi dari kontrak tersebut sehingga bersedia mengikatkan diri dengan pihak lainnya. Artinya setelah masyarakat melewati moment pemilu maka masyarakat terus dituntut terus berperan aktif dalam mengontrol dan mengawasi pemerintahan yang telah dipilih sehingga pemerintahan tersebut dapat berjalan sesuai dengan kontrak yang telah dibuat.

Oleh karena itu, transparansi selama proses pemilu menjadi nilai prinsipil yang tidak mungkin diabaikan. Kejelasan ideologi, tujuan, program, serta cara partai politik atau kandidat melaksanakan program tersebut untuk mencapai tujuan menjadi elemen-elemen penting yang harus diketahui selama proses kampanye berlangsung.

Pergantian kekuasaan yang tercermin dari terbentuknya pemerintahan baru akan membawa harapan baru bagi rakyat, yakni harapan bahwa penyelenggaraan pemerintahan akan lebih berpihak pada rakyat sebagaimana telah disepakati dalam kontrak sosial. Karena didasari oleh suatu kontrak, maka

asumsinya kedua belah pihak saling percaya sehingga terbentuknya pemerintahan baru ini akan memperoleh legitimasi<sup>12</sup> politik dalam bentuk kepercayaan sebagai besar rakyat. Tentu ini merupakan modal yang sangat berarti bagi pemerintah yang terpilih karena secara langsung rakyat memberikan kepercayaan penuh terhadapnya dalam mengelola pemerintahan.

Legitimasi politik ini diperlukan selama masa pemerintahannya untuk menjalankan program-program yang telah disepakati dalam kontrak. Di sisi lain, legitimasi politik yang diperoleh akan menjadi dasar yang kuat untuk membangkitkan dukungan dan komitmen seluruh komponen negara dan masyarakat. Dengan demikian, hakikat pemilu jauh lebih penting dibanding sekedar memberikan suara. Setiap suara yang diberikan sangat bermakna bagi terbentuknya pemerintahan baru yang legitimet, suatu pemerintahan yang dipercaya dan didukung rakyatnya. Pemilu tidak berakhir ketika seseorang sudah memberikan suaranya, tapi lebih jauh lagi, pemilu hanyalah awal dari terbentuknya hubungan penguasa dengan pemegang kedaulatan (yakni rakyat) yang sederajat. Itu artinya rakyat dituntut untuk terus berperan aktif dalam melihat dan mengawasi pemerintah yang dia pilih sehingga pemerintahan tersebut tetap berjalan dalam rel kontrak sosialnya tersebut.

---

<sup>12</sup>Secara sederhana legitimasi dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan atau membenaran menurut hukum (atau undang-undang yang berlaku); hak kekuasaan; bukti sah jati diri seseorang. Lihat Pius A Partanto dan Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arloka, 1994), 404.

### C. Sejarah dan Perjalanan Pemilu di Indonesia

Sepanjang sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, telah terjadi sepuluh kali pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan presiden dan wakilnya, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 (pemilu anggota DPD pertama dan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung oleh rakyat), pemilu 2009<sup>13</sup>, pemilu 2014, dan pileg dan pilpres terakhir tahun 2019 .

Pemilu pertama di Indonesia sebagai negara merdeka, terjadi pada tahun 1955. Waktu itu Indonesia baru berumur 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, lalu apakah berarti selama 10 tahun Indonesia tidak demokratis? Tidak mudah juga untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamirkan dan dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal Tahun 1946. Hal ini dicantumkan dalam Maklumat X melalui Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik.<sup>14</sup> Dan adapun pokok pikiran maklumat tersebut menurut Hatta yang dikutip oleh Syamsuddin Haris adalah:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 47.

<sup>14</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, h. 47.

<sup>15</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 112.

1. Pemerintah menyukai timbulnya Partai-partai politik, karena dengan adanya Partai-partai politik itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap, supaya Partai-partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Maklumat tersebut secara rinci juga menyebutkan, pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelahnya, kemudian tentu bukan tanpa sebab. Akan tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksud oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan yang kedua, pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR.<sup>16</sup>

Keterlambatan pelaksanaan pemilu tersebut bukan berarti tidak ada sebab. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula faktor dari luar negeri. Umumnya sumber penyebab dari dalam, antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedia perangkat Perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari

---

<sup>16</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 47

dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan pergantian (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Sedangkan penyebab dari luar, antara lain adalah karena adanya serbuan dari kekuatan asing yang mengharuskan negara terlibat peperangan.

Namun bagaimanapun pula, pemilu demokratis pertama yang diadakan pada 1955 merupakan tonggak sejarah. Ini berarti bahwa meskipun usia kemerdekaan masih sangat muda, ternyata negara baru ini bisa menyelenggarakan pemilu sebanding dengan yang berlangsung di negara-negara demokratis lainnya yang sudah mapan. Hampir tanpa halangan yang berarti, para kontestan pemilu yang ikut dalam proses sirkulasi elit tersebut dengan nyaman, dan menerima hasilnya dengan nyaman.<sup>17</sup>

Selain itu yang menarik pada pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu waktu itu dilakukan untuk keperluan memilih anggota DPR dan memilih Anggota Konstituante.<sup>18</sup> Dan

---

<sup>17</sup> Lihat Bahtiar Effendy, *Etika, Agama, Demokrasi, dan Pemilu 2004: Persepektif Islam*. Jurnal Politik Islam, Volume 1, Nomor 1, 2006, 2

<sup>18</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 50.

pemilau 1955 berhasil mengeluarkan Partai Nasional Indonesia menjadi pemenang dengan 22,32% suara, diikuti kemudian oleh Masyumi dengan 20,92 dan Partai Nahdlatul Ulama di urutan ketiga dengan 18,41% suara dari 30 lebih parpol peserta. Hasil pemilu 1955 yang dicapai NU merupakan karya terbesar dari partai politik ini dan sebuah perestasi politik yang sulit untuk diulang kembali pada masa-masa selanjutnya. Praktis periode 1952-1957 adalah masa keemasan dalam sejarah kehidupan NU.<sup>19</sup>

Setelah itu, pemilu kedua dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dilakukan pada tahun 1971. Ketika Jendral Soeharto diangkat oleh MPRS 1967, dia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah, ketetapan MPRS XI tahun 1966 yang mengamanatkan agar pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.<sup>20</sup> Sebagai pejabat presiden, Soeharto tetap menggunakan MPRS dan DPR GR bentukan Soekarno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau orde lama. Dan waktu itu merupakan transisi sekaligus pergantian rezim dimana rezim orde lama tumbang dan digantikan oleh rezim orde baru.

---

<sup>19</sup>Ini bisadi lihat di buku Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta: Yayasan Perhidmatan, 1984), h. 38

<sup>20</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 52.

Pada praktiknya, pemilu kedua baru bisa diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah empat tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu, ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan presiden Soekarno. Dan hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada pemilu 1955, pejabat negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai, bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi, pada praktiknya, pada pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar.<sup>21</sup> Jadi, pemerintah sesungguhnya telah merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar, seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta pemilu.

Sehingga pemilu pada Tahun 1971 ini dimenangkan oleh Golkar dengan memperoleh 62,80% suara yang kemudian kedua dan ketiga di ikuti oleh NU dan PNI dengan masing memperoleh 18,67% suara dan 6,94% suara dari sepuluh parpol peserta pemilu.<sup>22</sup> Yang kemudian menarik untuk dilihat dari hasil pemilu ini adalah posisi NU dan PNI. NU kali ini masih mampu bertahan di urutan kedua walaupun pemilu kali ini jauh dari kesan demokratis, justru malah PNI yang mengagetkan dimana pada pemilu sebelumnya menjadi pemenang tapi pada pemilu kali ini malah turun drastis perolehan suaranya. Ini bisa

---

<sup>21</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 53

<sup>22</sup> Ini bisadi lihat di buku Mahrus Irsyam, *Ulama dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis*, 45.

terjadi karena tidak bisa lepas dari adanya kudeta militer yang dilakukan Soeharto kepada Seokarno.

Dalam sejarah bangsa ini tercatat pemilu ketiga terjadi pada tahun 1977. Setelah pemilu 1971, persis pelaksanaan pemilu yang sistematis dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan enam tahun lebih setelah pemilu 1971, yakni pada tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam lima tahun. dilihat dalam segi waktu maka sejak itulah pemilu mulai dilakukan secara teratur dilaksanakan.<sup>23</sup>

Jelasnya, terdapat satu perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah sejak pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, jika pada pemilu sebelum-sebelumnya diikuti oleh lebih dari lima parpol maka pada pemilu tahun 1977 diikuti hanya oleh tiga parpol yakni partai Golkar, PDIP dan PPP. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975, tentang partai politik dan Golkar. Dan ini tidak lepas dari rekayasa usaha Peresiden Soeharto waktu itu yang terus menginginkan jabatan presiden selama-lamanya.

Dan hasil pemilu kali ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, dimana seperti yang sudah diprediksi Golkar keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 62,11% yang kemudian diikuti urutan kedua dan ketiga oleh PPP dan PDIP dengan masing-masing memperoleh 29,29% dan 8,60% suara.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 54

<sup>24</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 54

Ini artinya Presiden Soeharto kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya karena mayoritas suara di DPR di kuasai oleh Golkar yang notabene sebagai partainya Soeharto.

Kemudian pemilu keempat dilakukan pada lima tahun berikutnya yakni pada tahun 1982. Pemungutan suara pada pemilu 1982 dilangsungkan secara serentak sebagaimana pada Pemilu-pemilu sebelumnya. Namun seperti yang sudah diprediksi oleh banyak pengamat politik, lagi-lagi pemilu kali ini masih menjadi milik Golkar. Karena Golkar mampu keluar sebagai pemenang dengan memperoleh suara 64,34%, selanjutnya diikuti oleh PPP dengan 27,78% suara dan PDIP memperoleh 7,88% suara.<sup>25</sup> Dan ini artinya rezim Soeharto masih bercokol dan mampu bertahan sampai lima tahun yang akan datang.

Diakui atau tidak, pemilu berikutnya yakni pada tahun 1987, tidak membawa perubahan yang berarti dalam perolehan hasil pemilu, dimana Golkar tetap keluar menjadi pemenang karena sistem dan jaringan yang massif yang telah dibangun oleh Soeharto melalui PNS, TNI dan ABRI serta para kepala daerah masih bekerja dengan baik. Sehingga Golkar pada pemilu kali ini mampu meraih suara sebesar 73,16%, PPP dengan 15,97% dan PDIP diurutan ketiga dengan perolehan suara 10,87%.<sup>26</sup> Dan

---

<sup>25</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 57

<sup>26</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 58, mengenai mesin politik Suharto ini juga disebutkan oleh Bahtiar Effendy yang menyatakan bahwa Golkar selalu meraih kemenangan dalam setiap pemilu selama dikendalikan oleh Soeharto karena tetap di dukung oleh tiga pilar dukungan yaitu dukungan dari birokrasi, Golkar dan Militer. Ini dapat dilihat

ini artinya Soeharto tetap menjadi presiden dalam periode berikutnya dan rezimnya terus tetap berjalan.

Juga pada pemilu berikutnya yakni pada tahun 1992 dan 1997 tidak terlihat adanya perubahan perolehan suara yang signifikan dan proses pemilunya itu sendiri, karena lagi-lagi dalam pemilu pada waktu itu sama halnya dengan apa yang terjadi seperti sebelumnya yaitu pemilu dilaksanakan dengan suasana yang tidak kompetitif dimana intimidasi, tekanan, penipuan dan kecurangan menjadi bagian integral dari pesta pemilu itu sendiri.<sup>27</sup> Hal ini selalu terjadi semenjak rezim Suharto eksis. Sehingga dalam pemilu pada waktu itu Golkar kembali keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 68,10%, PPP 17,01%, dan PDIP diurutan ketiga dengan 14,89% suara.<sup>28</sup> Lagi-lagi pada pemilu kali ini rezim Presiden Soeharto masih terus berjalan mulus tanpa halangan yang berarti. Dan persis dalam lima kali pemilu yang berturut-turut hanya diikuti oleh tiga partai yakni Golkar, PPP dan PDIP dan lima tahun pula Golkar selalu keluar menjadi pemenang. Dan ini artinya selama periode itu pula Soeharto berkuasa atau tepatnya kurang lebih 32 tahun rezimnya berkuasa.

Dalam konteks politik Indonesia era Orde Baru tersebut, sistem dan mekanisme yang ideal itu tampaknya sengaja tak diciptakan. Oleh sebab itu, upaya kelompok yang bersaing

---

dalam bukunya Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009), Cet. II, h. 370.

<sup>27</sup> Lihat Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, h. 392.

<sup>28</sup> Rumidah Rabiah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*, 59.

dalam mencari legitimasi akhirnya tidak lagi mencari melalui rakyat, melainkan justru lewat pemerintah yakni Soeharto. Mekanisme inilah yang telah menyebabkan tumbuhnya persaingan tak sehat dengan segala implikasinya saling curiga dan iri hati.<sup>29</sup> Namun secara jujur harus diakui bahwa keberhasilan pemerintahan Orde Baru yang paling layak dicatat adalah kemampuannya mewujudkan dan menjaga stabilitas keamanan. Dengan bermodalkan kondisi stabil itulah akhirnya pembangunan dapat dilangsungkan tanpa gangguan, modal asing lancar mengalir, dan akhirnya pertumbuhanpun dapat dicapai.

Belajar dari era kelabu itu, kiranya tidak ada jalan lain untuk membenahi situasi ini kecuali hanya dengan mengembalikan kekuasaan kepada pemiliknya yaitu rakyat. Berdayakan rakyat melalui pelaksanaan pemilu secara luber dan jurdil. Melalui mekanisme itulah tangan rakyat akan menjadi ibarat tangan tuhan yang dapat mengubah nasib elit pemerintahan. Siapapun yang akhirnya keluar jadi pemenang dan yang tersingkir, maka berdasarkan konstitusi dan sistem yang legal semua pihak akhirnya legowo untuk menerima kenyataan mengingat hal itu memang merupakan refleksi kehendak rakyat.

Dengan komitmen dan harapan seperti itu serta runtuhnya rezim Orde Baru,<sup>30</sup> maka pemilu kedelapan dalam perjalanan

---

<sup>29</sup> Lihat Dhurorudhin Mashad dalam bukunya *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*,56.

<sup>30</sup> Keruntuhan kekuasaan Presiden Soeharto atau yang lazim di kenal dengan Rezime Orde Baru minimal di pengaruhi oleh bebrapa faktor diantaranya adalah adanya tuntutan mundur oleh mahasiswa yang disuarakan melalui demo besar-besaran yang hampir merata terjadi di seluruh Indonesia,

bangsa Indonesia dilaksanakan. Pemilu pada Tahun 1999 ini nampaknya lebih dinamis dan terbuka jika dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya, karena pemilu kali ini sudah tidak berada lagi dalam bayang-bayang rezim Orde Baru. Bahtiar Effendy berpendapat pemilu pada Tahun 1999 ini, merupakan pemilu yang paling demokratis yang kedua yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia.<sup>31</sup> Walaupun, harus diakui bahwa pada pemilu 1999 tersebut, situasi sosial-politik terasa lebih hiruk-pikuk. Sebagaimana diketahui, pada waktu itu, Indonesia baru saja memasuki masa transisi dari otoritarianisme ke demokratis. Suasana krisis multidimensi yang berlangsung sejak 1998 hanya menambah keinginan publik untuk segera

---

dan tuntutan mundur itu juga ikut disuarakan oleh para intelektual terkemuka dan para aktivis politik. Disamping itu runtuhnya perekonomian negara yang dimulai dengan terjadinya devaluasi nilai rupiah pada Agustus 1997, yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis moneter, ikut andil pula menjadi penyebab mundurnya Soeharto. Kondisi itu diperparah lagi oleh terjadinya pertumpahan darah, perusakan dan kondisi Soeharto yang di tinggalkan oleh orang-orang dekatnya atau kepercayaannya dalam masa pemerintahannya, sehingga Soeharto tidak ada pilihan lain selain mundur. Oleh sebab itu, pada tanggal 21 Mei 1998 secara resmi akhirnya Soeharto mengundurkan diri dengan hormat dan hal ini sebagai tanda pula ia mengakhiri rezimnya yang sudah bercokol selama 32 tahun. lihat penjelasan ini dalam Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009), Cet. II, h. 369-371. Namun sebelum 21 Mei sebenarnya sejak tanggal 18 Mei juga sudah terjadi demo di kampus IKIP Jakart (UNJ sekarang) dan bergerak menuju gedung DPR sehingga itu merupakan awal dari pergerakan mahasiswa waktu itu. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kronologisnya dapat dilihat dalam Tabrani Sabirin (ed), *Mengantar Bangsa Menuju Demokrasi*, (Jakarta: KPU-LPSI, 2000), 14.

<sup>31</sup> Lihat Bahtiar Effendy, *Etika, Agama, Demokrasi, dan Pemilu 2004: Persepektif Islam*. Jurnal Politik Islam, Volume 1, Nomor 1, 2006, 2.

berada pada situasi transformatif yang lebih pasti.<sup>32</sup> Dan pemilu 1999 dipandang sebagai salah satu keharusan untuk menuju situasi yang diinginkan yakni pemerintah yang lebih pasti yang dihasilkan melalui mekanisme pemilihan yang lebih terbuka dan adil.<sup>33</sup>

Walaupun demikian, hasil dari pemilu 1999 tidak ada yang terlalu mengejutkan dimana dua partai besar sebelumnya tetap keluar sebagai pemenang yakni di urutan pertama diraih oleh PDIP dengan 35,7% suara, kedua diraih oleh Golkar dengan perolehan 23,7% suara dan ketiga diraih oleh PKB dengan perolehan 13,3% suara, kemudian urutan keempat dan kelima masing-masing di tempati oleh PPP dan PAN.<sup>34</sup> Yang agak sedikit berbeda dan membuat orang tercengang adalah keberhasilan PDIP keluar sebagai pemenang walaupun tidak menguasai separuh suara di DPR. Selain itu yang menarik adalah munculnya partai baru yang notabene baru kemarin mengikuti

---

<sup>32</sup> Lihat Bahtiar Effendy, *Etika, Agama, Demokrasi, dan Pemilu 2004: Persepektif Islam*. Jurnal Politik Islam, Volume 1, Nomor 1, 2006, 2.

<sup>33</sup> Namun pendapat yang berbeda disampaikan oleh Syafi Alieha yang mengatakan bahwa, pemilu 1999 meski banyak dibilang relatif jujur, jelas merupakan pemilu yang belum bisa disebut sebagai 'pesta demokrasi'. Ia lebih merupakan representasi dari praktek demokrasi politik yang semu (*pseudo political-democracy*). Sebab lebih lanjut kata dia, pemilu tersebut dilaksanakan berdasarkan pada UU Politik yang jelas masih jauh dari aspirasi demokrasi. Pemilu 1999, lebih tepat disebut sebagai pesta memperebutkan kursi ketimbang sebagai pesta demokrasi. Lihat Syafi Alieha, *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, (Jakarta: KIPP Jakarta, 1999), 109-110.

<sup>34</sup> Lihat Maswadi Rauf, *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, (Jakarta: KIPP Jakarta, 1999), 159.

pemilu dan berhasil menjadi lima besar seperti PKB dan PAN. Tentu ini merupakan hal yang menarik dalam dinamika pemilu 1999 yang sangat terbuka dan adil.

Bagaimanapun pula, setidaknya pemilu 1999 telah mampu mendinginkan dahaga masyarakat Indonesia akan cita-cita pemilu yang terbuka dan adil. Dan melalui pemilu 1999 merupakan tonggak sejarah kembali dan pintu masuk untuk kemudian dapat terselenggaranya pemilu-pemilu yang lebih demokratis dan benar-benar terbuka, jujur dan adil, sebagaimana yang dicita-citakan oleh demokrasi dan masyarakat Indonesia.

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia kembali mencatat sejarah dalam perpolitikannya. Pada tahun 2004 bangsa Indonesia kembali menggelar pemilu kesembilan untuk pemilihan anggota legislatif dan eksekutif. Dan pada pemilu kali ini terlihat sangat terbuka dan dinamis. Hal ini terbukti dengan banyaknya parpol kontestan yang ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Tercatat sebanyak 24 partai politik ikut berpartisipasi baik partai politik yang berasaskan pancasila dan islam. Setelah pelaksanaannya pemilu kali ini ternyata dimenangkan oleh partai golkar dengan perolehan suara 21,58%, kemudian diurutan kedua disusul oleh PDIP dengan perolehan suara 18,53%, diposisi ketiga ditempati oleh PKB dengan perolehan suara 10,57% , dan di posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh PPP dan Partai Demokrat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU 2004.

Melihat hasil pemilu legislatif kali ini sesungguhnya tidak ada yang terlalu mengejutkan jika dibandingkan dengan pemilu 1999, karena pemenang tiga besar masih didominasi oleh pemain lama dalam arti dimenangkan oleh partai yang sejak lama sudah ada. Hanya saja pada pemilu kali ini posisi PDIP berada di urutan kedua kalah dengan Golkar. Dan yang agak menyita perhatian adalah munculnya Partai Demokrat yang notabene merupakan partai baru namun mampu menjadi urutan kelima dengan perolehan suara 7,45%, ini artinya partai ini walaupun baru tapi mampu menarik simpatai masyarakat jika dibandingkan dengan parati lain yang sudah lama.

Lalu bagaimana dengan pemilu tahun 2004, yang didalamnya terdapat perubahan besar diantaranya, pertama, presiden dipilih secara langsung, kedua, dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ketiga, hadirnya Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Komisi Pemilihan Umum). Pada pemilu kali ini diikuti oleh 24 Partai Politik dan dilaksanakan pada 5 April 2004 untuk pemilihan DPR,DPD, dan DPRD. Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka.

Pemilu presiden pertama ini dilangsungkan sebanyak dua putaran. Putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004 dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Pemenang Pilpres 2004 akhirnya dimenangi oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Tapi bagaimanapun, dalam konteks pemilu legislatif pada 2004, barangkali masyarakat memang tidak terlalu “berharap” adanya banyak perubahan.<sup>36</sup> Perhatian mereka justru diarahkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden, yang untuk pertama kalinya diadakan secara langsung. Berbeda dengan periode sebelumnya, kepemimpinan nasional tak lagi ditentukan oleh MPR, akan tetapi oleh masyarakat luas. Dan inilah arti penting bagi pemilu demokratis yang ketiga.<sup>37</sup> Dan tentu juga ini menjadi sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia serta Susilo Bambang Yodoyono dan Jusuf Kalla, karena pada pemilu langsung presiden ini pasangan SBY dan JK mampu keluar sebagai pemenang dan kemudian dilantik menjadi presiden periode 2004-2009.

Disampign itu, kemenangan SBY dan JK sesungguhnya merupakan lompatan politik sepektakuler dalam mengubah sejarah peta polit Indonesia. Karena paling tidak kemenangan SBY dan JK ini dalam realitas politik, telah meruntuhkan mitos politik aliran di Indonesia yang dalam sepanjang sejarah Indonesia belum pernah mengalami keberanjakan.<sup>38</sup> Dan politik

---

<sup>36</sup> Ini diungkap oleh Frans Maniagasi yang menyatakan bahwa pemilu 2004 tidak akan banyak membawa perubahan baik dalam tataran normatif yaitu demokrasi dan tataran emperis yakni yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam Fran Maniagasa, *Pergulatan Paratai Politik di Indonesia*, dalam Idris Thoha (ed), (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 70.

<sup>37</sup> Bahtiar Effendy, *Etika, Agama, Demokrasi, dan Pemilu 2004: Persepektif Islam*. Jurnal Politik Islam, Volume 1, Nomor 1, 2006, 2.

<sup>38</sup> Agus Riewanto, *Ensiklopedi Pemilu Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*, (Yogyakarta: el-Sab, 2007), h. 161.

aliran yang dimaksud disini adalah politik aliran antara nasionalis dan islamis.

Lima tahun kemudian sejak 2004, bangsa Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu eksekutif dan legislatif. Pemilu kesepuluh dalam perjalanan bangsa ini diselenggarakan pada tahun 2009, yang diawali dengan pemilihan anggota legislatif baru kemudian disusul dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam konteks pemilu legislatif, setelah diselenggarakannya pemungutan suara ternyata hasilnya cukup membuat banyak orang tercengang. Bagaimana tidak Partai Demokrat yang terhitung sebagai partai baru dan minim pengalaman justru dapat keluar sebagai pemenang dan dapat mengalahkan partai besar yang sudah puas dengan asam garam perpolitikan di Indonesia sejak lama.

Ini tentu menjadi fenomena tersendiri yang sangat menarik untuk dianalisis jika melihat perolehan suara yang diraih oleh oleh Partai Demokrat yang mencapai 20,85%, kemudian di urutan kedua dan ketiga masing-masing ditempati oleh Partai Golkar dan PDIP dengan perolehan suara 14,45% dan 14,03%, kemudian di urutan keempat dan kelima ditempati oleh PKS dan PAN dengan perolehan suara 7,88% dan 6,01%.<sup>39</sup> Yang terpenting juga pada pemilu kali ini adalah perolehan PKS yang relatif cukup baik apalagi dia merupakan partai baru juga. Dengan melihat realitas itu, maka dapat dilihat ada sebuah kecenderungan baru dalam masyarakat Indonesia, dimana ada

---

<sup>39</sup> Lihat Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU 2009.

indikasi bahwa masyarakat lebih tertarik dengan partai baru yang barangkali bagi mereka dapat memberi harapan baru.

Kemudian dalam konteks pemilu presiden, pemilu kali ini tidak terlalu mengagetkan dan membawa perubahan yang cukup berarti. Seperti yang sudah banyak diprediksi oleh para pengamat pemilu kali ini juga dimenangkan oleh SBY yang berpasangan dengan Budiono. Oleh sebab itu dalam konteks pemilu presiden bagi kebanyakan orang barangkali tidak terlalu menarik dan membawa harapan baru yang cukup berarti karena masih dimenangkan oleh incumben.

Sedangkan untuk pemilu berikutnya diselenggarakan tahun 2014, dalam Pemilu 2014 saat itu dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrad yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 2009-2014, serta Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Pemilihan

umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>40</sup>

Adapun pada pemilu Tahun 2019 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti oleh dua pasang calon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU yakni: *Pertama*, Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. *Kedua*, Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum Tahun 2019.<sup>41</sup>

Pilpres yang dilaksanakan pada 17 April 2019 tersebut akhirnya dimenangkan oleh Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berdasarkan hasil rekapitulasi resmi KPU pada 21 Mei, dengan perolehan suara sah nasional yakin pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih 85.607.362 suara atau 55,5 persen, unggul 16,95

---

<sup>40</sup> Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU 2014. <https://pemilu2014.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

<sup>41</sup> Info Pemilu KPU 2014. <https://pemilu2014.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

juta suara dari Prabowo-Sandiaga yang mendapatkan 68.650.239 suara atau 44,5 persen dari total suara sah nasional. Lebih lanjut berdasarkan data rekapitulasi di KPU, jumlah suara sah nasional tercatat 154.257.601.<sup>42</sup> Dengan demikian tanggal 20 Oktober 2019 Jokowi resmi kembali dilantik sebagai presiden untuk periode kedua.

## **D. Analisis Berbagai Model Sistem Pemilihan Presiden Dalam Kerangka Penguatan Demokrasi di Indonesia.**

### **1. Pemilihan Presiden oleh MPR**

Dalam hukum positif Indonesia, maksudnya hukum yang berlaku di Indonesia pada saat itu (*ius constitutum*), ketentuan mengenai pemilihan presiden tercantum di dalam Undang-undang dasar 1945, Pasal 6 ayat 2, yang berbunyi<sup>43</sup>:

“Presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan suara terbanyak”.

Dari analisis ketentuan Pasal 6 ayat 2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa: pertama, presiden dan wakilnya tidak diangkat oleh sebuah lembaga negara (MPR), melainkan dipilih oleh MPR atas nama rakyat. Jadi pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung. Artinya anggota MPR dipilih oleh rakyat lalu kemudian anggota MPR ini yang memilih presiden atas nama rakyat. Kedua, presiden dipilih melalui voting suara

---

<sup>42</sup> Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu KPU 2014. <https://pemilu2014.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

<sup>43</sup>Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 121.

terbanyak bukan melalui musyawarah atau mufakat, artinya disini masih terdapat unsur demokratis walaupun sangat mudah dikuasai oleh golongan tertentu. Ketiga, yang berhak menjadi presiden adalah yang memperoleh suara terbanyak dari calon yang lain.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum adanya ketetapan MPR No. XI/MPR/2001, belum pernah ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum 3 Juli 1971 mengeluarkan ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tentang tata cara pemilihan presiden dan wakilnya.<sup>44</sup> Dengan demikian pemilihan presiden dan wakilnya selama orde baru menggunakan dasar hukum selain Pasal 6 ayat 2, Pasal 6 ayat 1 tentang syarat-syarat presiden dan wakilnya. Jadi, yang menjadi “kaidah yang hidup” sejak sidang Umum MPR 1973 sampai 1998 ialah, Tap MPR No. II/MPR/1973, yang didalamnya secara tidak langsung menguntungkan golongan tertentu. Sehingga rezim orde baru mampu bertahan sampai 32 tahun.

## 2. Pemilihan Presiden Secara Langsung

Melalui adanya amendemen UUD 1945 melalui ketetapan MPR No. XI/MPR/2001 telah membuka sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Melalui amendemen UUD 1945 Pasal 6 ayat 2 maka presiden tidak lagi

---

<sup>44</sup> Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Demokrasi di Indonesia*, 123.

dipilih oleh MPR melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Tentu perubahan sistem ini bagi bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk kemajuan dalam sistem ketatanegaraan dalam rangka menegakkan sistem yang lebih demokratis.

Setidaknya, dengan pemilihan presiden secara langsung bisa lebih demokratis dengan alasan bebrapa hal: pertama, karena dipilih langsung oleh rakyat maka rakyat tidak perlu menitipkan suaranya kepada anggota MPR, sehingga presiden dan wakilnya betul-betul seperti apa yang dikehendaki mayoritas masyarakat. Kedua, presiden terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat sebagai konsekuensi yang pertama. Ketiga, rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden yang betul-betul dikenalnya, sehingga bisa terhindar dari adagium yang mengatakan bagaimana membeli kucing dalam karung. Dengan pertimbangan seperti itu, maka tentu pemilihan presiden secara langsung merupakan bentuk pemilihan yang lebih demokratis.

## **E. Pemilu dan Upaya Membangun Pemerintahan *Good Governance***

Antara pemilu dan upaya membangun sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*), secara normatif dan empiris, memiliki korelasi pengaruh yang signifikan. Pemilu yang dilakukan dengan baik, akuntabel dan terbuka, tentu akan melahirkan hasil yang memuaskan dalam arti semua pihak dapat menerimanya atau legitimed. Sedangkan pemilu yang dilakukan dengan penuh kecurangan dan penuh intrik, tentu sebaliknya akan menghasilkan sebuah hasil yang

mengandung banyak polemik dan akan cacat pula secara yuridis.

Sementara pemerintahan yang baik (good governance) sendiri mengharapkan kehadiran karakteristik-karakteristik yang society oriented dan unsur-unsur yang visible, rasional dan realistis. Dengan kata lain untuk sampai pada cita-cita good governance, kita harus mengawasi penyelenggaraan pemilu dengan bersih, fair, jujur dan adil. Sehingga untuk mencapai sistim pemerintahan yang baik maka syarat mutlak yang harus menjadi prasyarat adalah harus dimulai dengan proses pemilu yang terbuka, jujur dan adil.

Apalagi paradigma good governance telah menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata hanya disandarkan pada pemerintah atau negara, melainkan juga harus melibatkan seluruh elemen, baik itu masyarakat, militer dan komponen-komponen negara lainnya. Paradigma ini merupakan perubahan dari paradigma lama yaitu rule government yang dirasa sudah tidak sejalan lagi dengan proses perubahan sosio-politik melainkan tuntutan civil society yang semakin kuat.<sup>45</sup>

Disamping itu, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi wajib bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok,

---

<sup>45</sup> Lihat Chozin Chumaidy, *Etika Politik dan Esensi Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006), Cet. II, 146.

fungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Agar para pejabat publik dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja mereka dalam memberikan layanan publik sesuai harapan, kontrol efektif terhadap mereka merupakan suatu keharusan. Kontrol yang bersifat internal maupun eksternal harus dikelola dengan baik dan profesional agar tindakan yang menyimpang dari etika administrasi negara dan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dan dilakukan koreksi dan perbaikan. Fungsi ini salah satunya dimiliki oleh DPR baik tingkat pusat dan daerah sebagai hasil dari proses pemilu, dan disinal menurut hemat saya juga letak pemilu yang nota bene sebagai proses untuk memilih wakil rakyat, memiliki andil yang besar dalam menciptakan sistem yang demokratis.

Sedangkan good governance menurut Lembaga Administrasi Negara mengandung dua pengertian sekaligus sebagai orientasinya. *Pertama*, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. *Kedua*, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.<sup>46</sup> Nampaknya Lembaga Administrasi Negara dalam hal ini lebih melihat prinsip dan sistem good governance secara luas dalam arti secara nasional sehingga tidak terlihat indikator-indikator yang menjadi elemen penting dalam good governance itu sendiri.

---

<sup>46</sup> Chozin Chumaidy, *Etika Politik dan Esensi Demokrasi*, 147-148.

Namun terdapat penjelasan lebih lengkap terkait dengan karakteristik konsep good governance itu sendiri seperti yang dirumuskan oleh United Nation Development Programme (UNDP) yang dikutip oleh Chozin Chumaidi sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Participation, setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui sistem perwakilan. Maka dalam hal ini melalui sistem pemilu-lah rakyat ikut berperan aktif secara langsung.
2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Dalam arti semua warga negara memiliki kedudukan yang sama didepan hukum tanpa melihat status dan lain sebagainya. Sehingga hukum harus mampu memberikan keadilan terutama dalam kasus-kasus HAM.
3. Tranparency. Tranparansi dibangun atas dasar keterbukaan. Oleh sebab itu, dalam seluruh bentuk informa dan laporan apapun pemerintah atau penyelenggara negara yang lain harus tetap terbuka dalam setiap apapun kepada rakyat demi terciptanya stabilitas sosial.
4. Resvonsiveness. Lembaga-lembaga dan penyelenggara negara lainnya dituntut harus tetap berperan aktif dan tanggap dalam setiap apapun masalah negara yang terjadi. Dalam arti negara dan pemerintah harus bersiap sedia melayani dan mengabdikan untuk bangsa dan negara.

---

<sup>47</sup> Penjelasan ini dapat dilihat dalam bukunya Lihat Chozin Chumaidy, *Etika Politik dan Esensi Demokrasi*, 148.

5. Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. Dalam arti, pemerintah harus memperhatikan kepentingan publik.
6. Equity. Semua warga negara mempunyai jaminan kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Ini dimaksudkan guna memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas ekonomi guna kesejahteraan mereka.
7. Effectiveness and Efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga negara sebaik mungkin menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Dan yang terpenting adalah lembaga-lembaga negara harus lebih hemat dalam penggunaan anggaran.
8. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder, untuk melaporkan segala apa yang pernah dilakukan sebagai bentuk profesionalisme kerja.
9. Strategic Vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai persepektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Dalam arti pemerintah harus memiliki komitmen yang

kuat untuk terus membangun dan mengembangkan setiap potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat dan mengamati konsep dan karakteristik good governance di atas maka sudah jelas bahwa prinsip itu dapat diaktualisasikan dalam pemerintahan jika diawali dengan proses yang baik. Maka dalam hal ini, proses yang dimaksud adalah proses perekrutan para pemegang kebijakan yang dilakukan melalui proses pemilu. Maka dari itu, untuk mencapai pemerintahan yang good governance diperlukan sebuah proses pemilu yang terbuka, tidak terdapat intimidasi dan kecurangan apapun. Tidak seperti proses pemilu-pemilu yang terjadi pada zaman Orde Baru, yang selalu didesain untuk memenangkan satu partai atau golongan. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan lain jika menginginkan pemerintahan yang baik maka harus diawali dari proses pemilihannya yaitu pemilu, karena dari proses itu nantinya DPR, presiden dan wakilnya akan dipilih yang notabene juga akan mengangkat dan mengawasi para wakilnya.



## BAB VI

# EPILOG

Setelah dicermati lebih jauh, tampaknya budaya politik di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari nilai-nilai luhur untuk mencapai kesejahteraan rakyat, menjadi hanya tiang penyangga politik bagi kelompok tertentu. Politik yang sebenarnya bertujuan mencapai kesejahteraan rakyat tersebut telah berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dan sarana penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Fenomena budaya politik Indonesia masih cenderung feodal dan masih bersifat *patron-client*.

Hal ini mengindikasikan belum terjadinya kesesuaian antara cita-cita yang diharapkan dengan realitas yang terjadi dalam budaya politik Indonesia. Mendasarkan pada kenyataan tersebut, maka aspek yang perlu dibenahi dan diharapkan mampu memperbaiki kualitas budaya politik Indonesia adalah penguatan gerakan pendidikan politik warga negara baik secara formal maupun non formal. Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia ini menjadi tanggung jawab semua pihak: pemerintah, partai politik dan warga masyarakat itu sendiri. Ketiganya memegang tanggung jawab dan peranan penting dalam mewujudkan budaya politik masyarakat Indonesia yang semakin baik.

Karena sangat kita sayangkan jika budaya politik Indonesia yang didalamnya terdapat nilai-nilai luhur yang menjadi tujuan bersama, kita abaikan begitu saja tanpa ada kepedulian dari semua elemen bangsa. Oleh sebab itu sekali lagi, kita semua perlu terus memperkuat karakter budaya politik bangsa kita, sehingga kegiatan politik bukanlah panggung bermain-main lagi bagi para elite penguasa, tetapi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dalam menciptakan kemaslahatan bersama. Masyarakat dalam negara modern harus diperlakukan sebagai raja yang harus dilayani oleh para pejabat atau penguasa, bukan sebaliknya, pelayan yang harus melayani segala kebutuhan penguasa seperti dalam hierarki sistem politik kuno. Amanah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara Negara lainnya harus diimbangi dalam bentuk pelayanan prima atas segala kebutuhan masyarakat, bukan malah dijadikan ladang menumpuk kekayaan, kekuasaan, dan kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir elite yang bertengger di puncak piramida kekuasaan tersebut. Akhirnya kesadaran akan kemaslahatan umat manusialah yang menjadi modal dan tujuan utama yang harus terus diperjuangkan.[]

## Daftar Pustaka

- Ardiantoro, Juri F (ed). *Transisi Demokrasi, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*. Jakarta: KIPP Jakarta, 1999.
- Almond, Gabriel and Bingham Powell, *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little Brown and Company, 1966.
- Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Abd. Rochim Ghazali, Matahari Bersinar di Atas Negara, *Jurnal Tanwir*, vol. 1, Nomor 1, Mei 2003.
- Azwar, Syaifuddin, *Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Abdul Mu'iz Ruslan, Utsman. *At Tarbiyah As-Siyasiyah 'Inda Jama'ah Al-Ikhwah Al-Muslimin, Fi Al-Fatrah Min 1928 Ila 1954 FiMishr, Dirasah Tahliliyah Taqwimiyah*. Dar At-Tauzi' Wa An-Nasyr Al-Islamiyah, 1989.
- Andrian, Charles F. dan James T. Smith. *Political Democracy, Trust, and Social Justice: A Comparative Overview*. Boston: Northeastern University Press, 2006.
- Akurat.com. (2019). Calon PM Inggris Johnson Dipanggil Pengadilan Atas Hoaks Brexit. Diakses 26-07-2020, from

akurat.co website: <https://akurat.co/ekonomi/id-640121-read-calon-pm-inggris-johnson-dipanggil-pengadilan-atas-hoaks-brexit>

- Al-Rodhan, N. (2017, June 7). *Post truth* Politics, the Fifth Estate and the Securitization of Fake News. *Global Policy Journal*. Retrieved from <https://www.globalpolicyjournal.com/blog/07/06/2017/post-truth-politics-fifth-estate-and-securitization-fake-news>.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Burhanudin, Jajat dan Ahmad Baedowi, (ed). *Transformasi Otoritas Keagamaan, Pengalaman Islam Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Burhanuddin. *Nahdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*. cet. 1. Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Baharuddin dan Rasmianto. *Maulana Lantera Kehidupan Ummat*. Malang: Citra Mentari, 2004.
- Baswedan, Anies Rasyied, dalam artikelnya Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory, *Asian Survey Journal* Vol. 44, No. 5 (2004), 671, <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>, diakses 3 September 2012.
- Chilcote, Ronald, *Teori Pebandingan Politik*. Terjemah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010.
- David E. Epter. *Pengantar Analisa Politik* terj. Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta: Rajawali Press, 1987.

- Detik.com. (2017). Samuel Aribjani Kasus Hoaks dan 324 Hate Speech Sepanjang 2018. Retrieved August 23, 2019, from Detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-4272642/Samuel-ada-53-kasus-hoaks-dan-324-hate-speech-sepanjang-2017>. Dakses tanggal 10-6-2020.
- Doyle Jhonson, Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Effendy, Bahtiar, *Etika, Agama, Demokrasi, dan Pemilu 2004: Persepektif Islam*. Jurnal Politik Islam, Volume 1, Nomor 1, 2006.
- , *Islam dan Negara*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009), Cet. II.
- Frank Lindenefeld, Economic Interest and Political Involvement, *Public Opinion Quarterly* No. 28, 1964.
- Faith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1973.
- Fealy, Greg. *Ulama and Politics in Indonesia a History of Nahdlatul Ulama 1952-1957*, edisi Indonesia, Greg Fealy, ed. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1957*, penerjemah Farid Wajidi, et al., cet. 4. Yogyakarta: LKIS, 2009.

- Gaventa, John dan Camilo Valderma, *Mewujudkan Partisipasi: Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*. The British Council New Economics Foundation, 2001.
- Ghazali, Bahri. *Pesantren Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Prasasti, 2002.
- Godwin-Gill, S. Guy. *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standar Internasional*. Jakarta: Piraq Kerjasama dengan The Asia Foundation, 1999.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta, 1999.
- Heywood, Andrew. *Politik Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Hidayat, komaruddin. *Politik Panjat Pinang, Dimanakah Peran Agama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Haris, Syamsuddin, *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Huntington, Samuel P dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Huntington, P. Samuel dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Haryatmoko. (2017, November 15). Ketika Emosi Dominasi Politik. *Kompas.Id*. Retrieved from <https://kompas.id/baca/opini/2017/11/15/ketika-emosi-dominasi-politik>.
- Harichayono, Cheppy. *Ilmu Politik dan Persefektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986.

- Henk Schulte Nordholt, et.al. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor, 2007.
- Haryanto. *Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia*. dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 17 No. 3, Maret 2014.
- Hendrik, Doni. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008*, *Jurnal DEMOKRASI* Vol. IX No. 2 Th. 2010.
- Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Renika Cipta
- Hamdi, Saipul. *Politik Islah: Re-negosiasi Islah, Konflik, dan Kekuasaan Dalam Nahdlatul Wathan Di Lombok Timur*. dalam *Jurnal Kaswitara* Vol. 1, Nomor 1, April 2011.
- Humaidi, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 20 Desember 2012. Wawancara.
- Irsyam, Mahrus, *Ulama dan Partai Politik Upaya Mengatasi Krisis*. Jakarta: Yayasan Perhidmatan, 1984.
- Irsyam, Mahrus . *Bendera Hijau dan Cakrawala Politik Indonesia*, dalam *Majalah Panji Masyarakat*, No.283, 1981
- Jum'ah,, Sa'd Ibrahim *As-Syabab Wa Al-Musyarakah As-Siyasiyah*. Kairo: Dar Ats-Tsaqafah Li' An-Nasyr wa At-Tauzi, 1984.
- Kholidi, M.Pd.I, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 22 Januari 2013. Wawancara.

- Kharisma Dhimas Syuhada, *Etika Media di Era Post Truth*, dalam Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol.V No.1, April 2017.
- Kamus *The Oxford English Dictionary*. London: Oxford University Press, 1993), Volume 1, cet. I.
- Kompas. (13 Maret 2019). Lunturnya Kearifan Berpolitik di Era “Post-Truth.” *Kompas.Com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/09014261/lunturnya-kearifan-berpolitik-di-era-post-truth?page=all>. Dakses tanggal 10-6-2020.
- Kuswandi, Aos. *Membangun Gerakan Budaya Politik Dalam Sistem Politik Indonesia*, dalam Jurnal Governance, Vol. 1, No. 1, November 2010, 47
- Kantaprawira, Rusadi. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Cetakan Kelima (Cetakan Pertama 1977). Bandung: CV. Sinar Baru, 1988.
- Leiserson, Avery. *Parties and Politics An Institutional and Behavioral Approach*. New York: Alfred A Knopf, 1958.
- Liddle, R. William. *Partisipasi dan Partai Politik: Indonesia Pada Awal Orde Baru*, ter. Tim Penerjemah Pustaka Grafiti. Jakarta: Pustaka Graffiti, 1992.
- Lusi, S. S. (2019, May 3). Melampaui “Post-Truth.” *Detik.Com*. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4534507/melampaui-post-truth>, tanggal 25-07-2020.
- Lane, Robert. *Political Life: Why People Get Involved in Politics*. Illionis: Glonce, 1959.

- Mashad, Dhurorudhin. *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1999.
- Maniagasa, Frans, *Pergulatan Paratai Politik di Indonesia*, dalam Idris Thoha (ed). Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Mastel. (2017). *HASIL SURVEY MASTEL TENTANG WABAH HOAKS NASIONAL*. Retrieved from <https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoaks-nasional-2017>. Dakses tanggal 02-7-2020.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik, Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Marcridis, Roy C. dan Bernard E. Brown. *Comparative Politic Sixth Edition*, diterjemah dengan judul *Perbandingan Politik Edisi Keenam*, terj. Henry Sitanggang. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996.
- Muh. Noer, dkk. *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, cet. 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.
- Masnun. *TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid: Gagasan Pembaruan di Nusa Tenggara Barat*. cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Miqdad, 2007.
- Mas'oe'd, Mohtar dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2006.
- Muslihan Habib, M.Ag, di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2013. Ia merupakan salah seorang pengasuh Pondok Pesantren NW Jakarta. Wawancara

- Nahdi, Khirjan. *Nahdlatul Wathan dan Peran Modal: Studi Etnografi-Historis Modal Spiritual dan Sosiokultural*. Yogyakarta: Insyira, 2012.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Graffiti Press, 1987.
- Sabirin, Tabrani (ed). *Mengantar Bangsa Menuju Demokrasi*. Jakarta: KPU-LPSI, 2000.
- Surbakti, Ramlan *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Shobron, Sudarno. *Muhammadiyah dan NU Dalam Pentas Politik Nasional*, cet. 1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press Surakarta, 2003.
- S.P. Varma, *Modern Political Theory*, di terjemhkan edisi Indonesia dengan judul *Teori Politik Modern*, cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Soon, Kang Young. *Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama*. Jakarta, UI Press, 2008.
- Setiawan, I. (2017). Media sosial, politik post-truth, dan tantangan kebangsaan. website: <http://matatimoer.or.id/wp-content/uploads/2017/09/Media-sosial.pdf>
- Steinberg, Arnold. *Kampanye Politik Dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 1981.
- Sastroatmojo, Sudjono. *Profil Budaya Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Syamsuddin, Din. *Islam dan Politik Era Orde Bar.*, Jakarta: Logos, 2001

- Sulistyo, E. (2017, November 28). Medsos dan Fenomena "Post-Truth". *Koran Sindo*. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1261141/18/medsos-dan-fenomena-post-truth->. Tanggal 26-07-2020
- Setiadi, M. Elly dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Sanit, Arbi. *Swadaya Politik Masyarakat; Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Suryo, Herning. *Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan, Dalam Jurnal Transformasi Vol. 1 No. 27 Tahun 2015*, 33.
- Saleh, Khoirul dan Achmat Munif, *Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi*, dalam Jurnal, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015, 313.
- Syafii Ma'arif, Ahmad. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Suprayogo, Imam. *Kiyai dan Politik Membaca Citra Politik Kiyai*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Syahdan, S.Ag, di Pancor Lombok Timur pada tanggal 22 Januari 2013. Wawancara
- Partanto, A Pius dan Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Penerbit Arloka, 1994.
- Paskarina, caroline dan Dede Mariana, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

- Rabiah, Rumidah, *Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Prego, V. (2017, March). Informative Bubbles. *UNO-Magazine*, 20–21. Retrieved from [https://www.uno-magazine.com/wp-content/uploads/2017/03/UNO\\_27\\_ENG\\_alta.pdf](https://www.uno-magazine.com/wp-content/uploads/2017/03/UNO_27_ENG_alta.pdf). Dakses tanggal 20-6-2020.
- Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Pribadi, Toto dkk. *Sistem Politik Indonesia*, cet. 2. Jakarta; Penerbit Universitas Terbuka, 2007.
- Riewanto, Agus, *Ensiklopedi Pemilu Analisis Kritis Instropektif Pemilu 2004 Menuju Agenda Pemilu 2009*. Yogyakarta: el-Sab, 2007.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Rush, Michael & Althof, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Robert J. Huckshorn. *Political Parties in America Second Edition*. California: Cole Publishing Company, 1980.
- R. J, Dalton. *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. New York: Chatham House Publishers, 2002
- Triwahyuningsih, *Pemilihan Presiden Langsung Dalam Kerangka Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).

- Upe, Ambo. *Sosiologi Politik Kontemporer; Kajian Tentang Rasionalitas Perilaku Politik Pemilih di Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- Vaezi, Ahmed, *Agama dan Politik Nalar Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Citra, 2006.
- Verba dalam Afan Gaffar, *Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Wirosardjono, Soetjipto. *Dialog Dengan Kekuasaan, Esai-esai Tentang Agama, Negara, dan Rakyat*. Bandung: Mizan , 1995.



## Tentang Penulis

Ihsan Hamid, lahir di desa Wakan, salah satu desa yang terletak di wilayah Selatan Pulau Lombok. Anak pertama dari tiga bersaudara ini menamatkan pendidikan dasar hingga menengah pertama di desa kelahirannya, dan menengah tingkat atas diselesaikan di Selong Lombok Timur. Pengembangan ilmu berikutnya berlabuh di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Humaniora dan Budaya, dengan beasiswa dari Kementerian Agama, hingga 2011 dapat menyelesaikan studinya dengan predikan Cumlaude.

Merasa masih sangat kekurangan secara keilmuan dan pengalaman, Ihsan memutuskan kembali merantau meninggalkan kampung halamannya menuju ibu kota untuk melanjutkan studi magisternya. Ditahun yang sama 2011 akhirnya nekat mendaftarkan diri di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi kajian *Politik dan Agama*, juga diselesaikan dengan beasiswa dari LPDP Kemenkue RI, kepercayaan yang diberikan oleh negara dijawab dengan kesungguhan dalam menuntaskan studinya sehingga dapat menyelesaikan studi magisternya tiga semester dengan predikat Cumlaude.

Perestasi sederhana ini kemudian pada akhirnya mengantarkan ia kembali meraih beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi ke jenjang doktor yang kembali ia tempuh di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

kosentrasi yang sama dengan magisternya, dan awal tahun 2019 ia memutuskan balik ke kampung halamannya dengan menjadi Dosen Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, setelah hampir satu dekade pengembaraannya.

Namun sebelumnya, selama tinggal di Jakarta Ihsan tercatat sudah pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi diantaranya UNMA Jakarta, STAI Bina Madani, dan STAI AL-Hasyimiyah Jakarta. Selain kesibukan mengajar, ia juga tercatat pernah menjadi konsultan di beberapa lembaga dan Tenaga Ahli di DPR RI, yang kemudian menjadikan penguasaan dalam bidang kelembagaan politik menjadi semakin lengkap. Hal ini kemudian menjadikan ia kerap kali diminta analisisnya terkait dengan dinamika politik yang berkembang oleh media-media mainstream di NTB seperti TVRI, Lombok Post, Suara NTB, Radar Lombok, dan media-media lainnya, baik cetak maupun online, juga tercatat sering diundang sebagai Narasumber atau pembicara di seminar-seminar.

Selama menjadi mahasiswa ia pernah aktif dan banyak terlibat dalam organisasi intra maupun ekstra diantaranya: Pengurus HMJ BSA UIN Maliki Malang (2008-2009), Pengurus BEM Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki Malang (2009-2010), Pengurus LKP2M (Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa) UIN Maliki Malang (2008-2009), Pengurus PMII Rayon Fakultas Humaniora dan Budaya UIN Maliki Malang (2008), Menteri Keagamaan TUNAS (Terune Dedare Sasak) Malang Raya (2009-2010), Ketua Umum FORSKIMAL (Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok) UIN Maliki Malang (2009-2010), Pengurus di

organisasi primordial IMSAK (Ikatan Mahasiswa Sasak) Jakarta. Ketua Penerima Beasiswa LPDP Kemenkeu RI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017).

Diantara karya tulis yang pernah dihasilkan adalah *Shalawat Nahdlatain Syaikh Zainuddin Abdul Madjid; Studi Analisis Semiotika Menggunakan Teori Charles Sander Pierce*, Menerjemahkan novel Nugaib Mahfudz “*Qolbul Lail*” dengan kawan-kawan, edisi Indonesia menjadi “*Malam Tak Bertepi*”, (Malang; Hudaya Press, 2010), Madrasah Research: Kontibutor Editor di Impresaa Publishing (2012), *Peta Politik NTB Menjelang Pilkada 2013*. Buku diantaranya, *Perilaku Politik NW: Dari Kultur Pesantren ke Komplik Elit* (Impresaa Publishing). *Perilaku Politik: Dialektika Teoritis Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth* yang ada ditangan pembaca saat ini. Selain menulis buku, Ihsan juga tercatat aktif menulis di berbagai Jurnal, tulisan jurnalnya dapat diakses langsung di Jurnal Politea UIN Mataram.[]